

FOKUS HILIR

BULETIN HILIRISASI HASIL PETERNAKAN



TEROBOSAN

**Peluang Besar
Pernak
Nasional:
Pengelolaan
Dam Haji dari
Indonesia**

**Kenapa Standar Kalsium pada
Susu MBG Perlu Disesuaikan?
Yuk, Kenali Faktanya!**

**Why Does the Calcium Standard in MBG Milk
Need to Be Adjusted? Let's Take a Look at the
Facts!**

Desember 2025

Volume 4 | No 3

ISSN 2829-5773



9 772829 577001

Daftar Isi

table of contents

Daftar Singkatan List of Abbreviations

iii



vi

Sambutan Direktur
Director's Welcome



vii

Catatan Redaksi
Editorial Notes

Bangun Sinergi dan
Inovasi, Ditjen PKH
Warnai Nusantara
Livestock & Poultry
Expo 2025

*Building Synergy and
Innovation, the
Directorate General of
Livestock and Animal
Health Enlivens the
Nusantara Livestock &
Poultry Expo 2025*



1



2

Pengolahan Tepung Telur di Tani on Stage,
Agrinex 2025
Egg Powder Processing at Tani on Stage, Agrinex 2025



3

Workshop Fasilitasi Ekspor Komoditas Pertanian
untuk Pangan Jemaah Haji 2026 Digelar, Pelaku
Usaha Harapkan Kepastian Ekspor ke Arab Saudi
*Workshop on Facilitating the Export of Agricultural
Commodities for Hajj Pilgrims' Food 2026 Held, Business
Actors Hope for Export Certainty to Saudi Arabia*



4

Kenapa Standar Kalsium
pada Susu MBG Perlu
Disesuaikan?
Yuk, Kenali Faktanya!
*Why Does the Calcium
Standard in MBG Milk
Need to Be Adjusted? Let's
Take a Look at the Facts!*



5

Peluang Besar
Pernak Nasional:
Pengelolaan Dam Haji
dari Indonesia
*Major Opportunity for
National Farmers:
Management of the Hajj
Dam from Indonesia*



6

Menjembatani Investasi:
Ditjen PKH Mengurai
Hambatan Regulasi untuk
Perkuat Subsektor
Pernakan

*Bridging Investment:
The Directorate General of
Livestock and Animal Health
Addresses Regulatory
Barriers to Strengthen the
Livestock Subsector*



7

Retrospektif Investasi Sapi
(Sebuah Catatan Reflektif)
Cattle Investment
Retrospective
(A reflective note)



8

Kapal Ternak Kian Eksis:
Inovasi Transportasi yang
Menjaga Bobot, Harga, dan
Harapan
*Livestock Vessels Gaining
Ground: A Transportation
Innovation that Preserves
Weight, Prices, and Hope*

Daftar Isi

table of contents

Dari Kandang ke Lahan: Transformasi Cerdas Pupuk Organik Bersertifikat

From Barn to Field: The Smart Transformation of Certified Organic Fertiliser

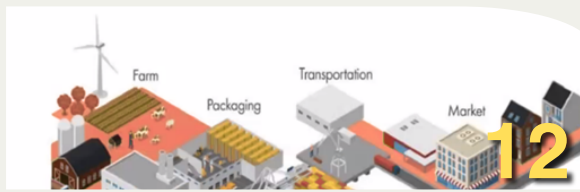


Dari Kandang Ke Kelas Dunia: Hilirisasi Peternakan sebagai Mesin Nilai dan Daya Saing Bangsa

From Farm to the Global Stage: Livestock Downstreaming as a Value Engine and Driver of National Competitiveness



Pasar Ternak, Penggerak Ekonomi Peternakan Rakyat
Livestock Markets: A Driving Force of Smallholder Livestock Economics



Logistik yang Terlupa: Peran Distribusi Produk Peternakan dalam Ketahanan Pangan Nasional
The Overlooked Logistics: The Role of Livestock Product Distribution in National Food Security



Kapan Investasi Peternakan Bisa 'Show Off'?
When Can Livestock Investment 'Show Off'?



ISO: Standar Global untuk Mutu, Keamanan, dan Kepercayaan Produk Peternakan
ISO: Global Standards for Quality, Safety, and Trust in Livestock Products

Mengapa Harga Komoditas Peternakan Cenderung Naik?
Why Do Livestock Commodity Prices Tend to Rise?



Apakah Harga Daging Ayam di Konsumen Sudah Mengkhawatirkan?
Are Chicken Prices Already a Cause for Concern Among Consumers?

Slow Living, Smart Farming



LAMIRAPE OL SHOP



Kilas Balik Kelompok Penerapan, Pengawasan, dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan

A Retrospective on the Group for Implementation, Supervision, and Quality Certification of Livestock Products



Hilirisasi yang Bertumbuh: Cerita Perjalanan Satu Tahun Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan
Growing Downstreaming: A One-Year Journey of Post-Harvest and Livestock Product Processing

Daftar Singkatan

List of Abbreviations

Kementan	: Kementerian Pertanian	MOA	: Ministry of Agriculture
Ditjen PKH	: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	DGLAHS	: Directorate General of Animal Health and Services Livestock
Dit. Hilirnak	: Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan	DDL P	: Directorate of Livestock Products Downstreaming
Dit. Bitpro	: Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak	DLBP	: Directorate of Livestock Breeding and Production
Dit. Kesmavet	: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner	DVPH	: Directorate of Veterinary Public Health
Dit. Keswan	: Direktorat Kesehatan Hewan	DAHS	: Directorate of Animal Health Services
Sesditjen	: Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	SDGLAHS	: Secretariat of Directorate General of Livestock and Animal Health Services
PUP	: Pendamping Usaha Peternakan	LBA	: Livestock Business Advisor
PIP	: Pelayanan Informasi Pasar	MIS	: Market Information Service
I PRO	: Investment Projects Ready to Offer	I PRO	: Investment Projects Ready to Offer
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, Menengah	MSME	: Micro, Small, Medium Enterprise
SSC	: Strategic Sector Cooperation	SSC	: Strategic Sector Cooperation
KPSP	: Koperasi Peternakan Sapi Perah	DFC	: Dairy Farmers' Cooperative
NKV	: Nomor Kontrol Veteriner	VCN	: Veterinary Control Number
NGO	: Non Government Organizations	NGO	: Non Government Organizations
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri	DI	: Domestic Investment
DPMP TSP	: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ISOSS	: Investment Service One Stop Service
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	NMTDP	: National Medium Term Development Plan
SBW	: Sarang Burung Walet	ESN	: Edible Swiftlet Nest

Tim Redaksi

Pengarah

Pengarah



Dr. drh. Makmun, M.Sc
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan

@bang_drh

Anggota



Ir. Maria Nunik, M.P
Ketua Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan

@marianunikpkh



drh. Boetdhy Angkasa, M.Si
Ketua Kelompok Penerapan, Pengawasan, dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan

@boetdhyangkasa



Idha Susanti, S.Pt, MM
Ketua Kelompok Investasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Peternakan

@susanti2400



Andri Hanindyo W, S.Pt, M.Si
Ketua Kelompok Pemasaran

@hanindyoandri



Dewi Sari, SE, MP
Kasubbag Tata Usaha

@d3wisari

Pelaksana

Pemimpin Redaksi



M.Imron Fuadi, S.Pt, MP

imron_fuadi

Sekretaris



Nisrina Hasna M, A.Md.A.B

nisrinamunifah

Reporter



Desima R. Saragih, S.Pt

desimars



Shofia Nurul H, S.Pt, MP

shofiehakim



Abdul Kadir L, S.Pt

dadelatulani



Rinie Gunawan, S.Pt., M.Si

rinie.gunawan



Yoda Ekiandi, S.IP

yoda_e

Perencana Materi



Tika Kartika, SP

tika_nayjavlea



Sapta Anggara, ST., MM

saptaangara



Rini Prastyanty, S.Pt

rinipras



Lisa Dwi Lestari, S.Pt

lisaica



Yaumil Ghuftron A, S.Pt

yaumilghuftron



Tuty Alawiyah, S.TP

tutsky

Editor



Anton Supriyadi, S.Pt., M.AP

antonsupriyadi08



R. Jatu Winarto S, S.Pt, M.Si

radenjatu



Asmadinarta Afri, S.Pt

asmadiafri



Ahmad Wiro'i, S.Kom, MM

roi



Aan Affandi, S.Pt, M.Si

aanaf



Hermawan Sutanto, S.TP

wawanhs

Desain Grafis



Januar A Lastanto, S.P,M.T

januarlastanto



M.Muhaimin Marta, S.Pt

martakementan



Sigit Pamungkas, S.P, MM

sigit_x



Lilik Kurniawan, ST

lilik1910



Yuniar Mutiara D, S.P

yuniarmutiara



Tiara Ade M, S.Tr.Pt

tiaraadem_

Bahasa



Rangga Wirawan G. S.Pt

ranggaus



M.Una Atsawan, S.Pd, M.Ec.Dev

muh.una



Ramdhani, S.Pt

ramdhanird

Sirkulasi



Benny Pramono, S.Pt

sheva031



Suci Dwi R.N, S.Pt

sucidrn



Heni Istianawati, SE., M.Si

heniistian



Arif Purnama, SE

biasasajaya_

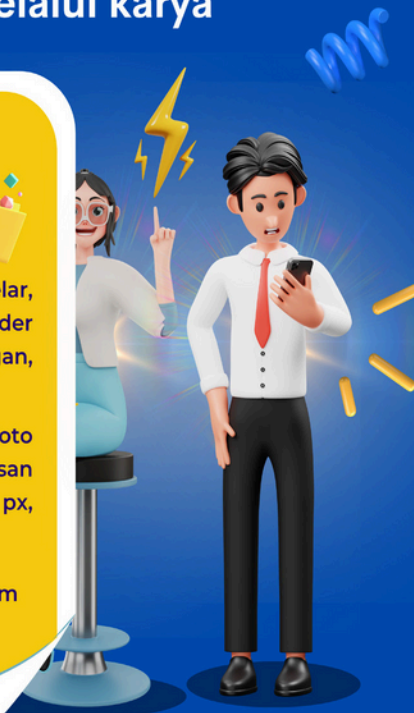
DICARI PENULIS

Join With Us

Kami mengundang sobie hilir untuk
dapat berkontribusi melalui karya

Kriteria :

- Tulisan bertema Promosi Peternakan atau Pengembangan Hilirisasi
- Tulisan mencantumkan informasi nama lengkap, gelar, dan jabatan dalam format word atau membuat folder yang berisi tulisan (jika diperlukan keterangan, dicantumkan). Tulisan terdiri dari 1000 - 1500 kata
- File Foto format JPG/PNG untuk foto penulis dan foto pendukung tulisan. Jika foto pendukung tulisan mengambil dari internet, foto resolusi min 1000 px, dengan mencantumkan sumbernya
- Tulisan yang admin terima adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media manapun
- Admin akan menayangkan tulisan setelah melalui tahapan editing dan translating



APPLY NOW



Kirim tulisan Anda ke
hilirnak@gmail.com



Untuk informasi lebih lanjut
[ig:@hilirnak](https://www.instagram.com/hilirnak)



Sambutan Direktur

Dr. drh. Makmun, M.Sc
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan

Director's Welcome

Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penguatan hilirisasi hasil peternakan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk,

penguatan standar mutu, serta perluasan akses pasar, baik domestik maupun internasional. Hilirisasi tidak hanya diarahkan pada peningkatan daya saing produk, tetapi juga pada penciptaan usaha peternakan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sepanjang tahun ini, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan stakeholder terus diperkuat guna mendorong inovasi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar. Berbagai capaian yang dirangkum dalam kaleidoskop ini menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun industri peternakan yang tangguh dan berorientasi pasar.

Ke depan, tantangan global dan tuntutan kualitas akan terus berkembang. Namun dengan sinergi dan komitmen yang kuat, kami optimistis hilirisasi hasil peternakan akan semakin berkontribusi bagi kesejahteraan pelaku usaha dan perekonomian nasional.

The year 2025 marks an important milestone in strengthening the downstream development of Indonesia's livestock products. Various efforts have been undertaken to enhance product value added, strengthen quality standards, and expand market access, both domestically and internationally. Downstream development is directed not only toward improving product competitiveness, but also at fostering a sustainable and inclusive livestock industry.

Throughout the year, collaboration among the government, business actors, and stakeholders has continued to be strengthened to promote innovation, efficiency, and compliance with standards. The achievements captured in this kaleidoscope reflect our shared commitment to building a resilient, market-oriented livestock industry.

Looking ahead, global challenges and rising quality demands will continue to evolve. However, with strong synergy and commitment, we remain optimistic that downstream development of livestock products will increasingly contribute to the welfare of business actors and to the national economy.

Catatan Redaksi

M. Imron Fuadi, S.Pt., MP
Pimpinan Redaksi

Editorial Notes

Salam pembaca,

Halo Sobat Hilir,
Buletin Fokus Hilir kembali hadir pada edisi Akhir tahun, Desember 2025, dengan mengangkat tema:

“Kaleidoskop Hilirisasi Hasil Peternakan Tahun 2025 dan Arah Kebijakan Tahun 2026.” Edisi ini hadir sebagai refleksi atas berbagai capaian dan dinamika sektor peternakan sepanjang tahun, sekaligus bentuk dukungan nyata terhadap agenda strategis pemerintah dalam memperkuat hilirisasi secara berkelanjutan.

Penguatan hilirisasi bukan sekadar upaya meningkatkan nilai tambah, melainkan langkah krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan daya saing industri protein hewani. Melalui dukungan kebijakan, investasi, dan inovasi kemitraan, transformasi dari hulu ke hilir terus dipacu untuk mewujudkan ekosistem pangan yang inklusif serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam edisi kali ini, kami menyajikan beragam informasi strategis—mulai dari peluang investasi hingga potret praktik terbaik serta artikel dari beberapa daerah. Harapan kami, ragam informasi ini dapat menjadi inspirasi sekaligus referensi bagi para pemangku kepentingan dalam mendorong usaha peternakan yang terintegrasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kontributor, penulis, dan narasumber yang telah berbagi gagasan berharga. Semoga Fokus Hilir terus menjadi jendela informasi dan penguat sinergi kita semua dalam mewujudkan hilirisasi dan ketahanan pangan nasional.

Selamat membaca, semoga bermanfaat bagi pembaca.



Hallo Sobat Hilir!

Fokus Hilir bulletin is back for our year-end edition, December 2025, featuring the theme: “2025 Livestock Downstreaming Kaleidoscope and 2026 Policy Directions.” This edition serves as a reflection on the achievements and dynamics of the livestock downstreaming sector throughout the year, while reaffirming our support for the government’s strategic agenda to foster a sustainable livestock industry.

Strengthening downstreaming is more than just increasing added value; it is a crucial step in safeguarding national food security and enhancing the competitiveness of the animal protein industry. Supported by policy frameworks, strategic investments, and partnership innovations, the transformation from upstream to downstream continues to be accelerated. Our goal is to create a food ecosystem that is inclusive, sustainable, and directly impactful to the welfare of the community.

In this edition, we present a wide range of strategic insights—from investment opportunities and partnership models to successful case studies and best practices from various regions. We hope these stories serve as both inspiration and a strategic reference for stakeholders in driving integrated livestock business development.

We extend our sincere gratitude to all contributors, writers, and speakers who have shared their valuable ideas. We hope that Fokus Hilir continues to be a primary source of information and inspiration, strengthening our collective synergy toward achieving national food sovereignty.

Happy reading, and we hope you find this edition insightful.

Bangun Sinergi dan Inovasi, Ditjen PKH Warnai Nusantara Livestock & Poultry Expo 2025

Building Synergy and Innovation, the Directorate General of Livestock and Animal Health Enlivens the Nusantara Livestock & Poultry Expo 2025



Angela Sekar Prasetyani, SP

Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama

Suasana semarak terasa di Nusantara Livestock & Poultry (NLP) Expo 2025 yang digelar pada 6-9 November 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Selama empat hari penyelenggaraan, ribuan pengunjung tampak memadati area pameran, mulai dari pelaku industri peternakan, produsen pakan, pemilik dan pengelola peternakan, pelaku agribisnis, hingga akademisi dan profesional yang ingin memperluas jejaring dan mengikuti inovasi terbaru di dunia peternakan. Dengan mengusung tema “Shaping a Resilient Food Estate for Indonesia,” pameran ini menjadi ruang bertemunya pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendukung untuk berbagi inovasi sekaligus memperkuat ekosistem ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang peternakan. Pameran ini memperoleh dukungan luas dari berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Pariwisata, Badan Pangan Nasional, dan LPPOM MUI. Beragam asosiasi industri peternakan juga turut memberikan dukungan, termasuk Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), serta asosiasi pendukung lainnya.

The atmosphere was vibrant at the Nusantara Livestock & Poultry (NLP) Expo 2025, held from 6–9 November 2025 at the Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Over the four days of the event, thousands of visitors filled the exhibition area, ranging from livestock industry players, feed producers, farm owners and managers, agribusiness actors, to academics and professionals seeking to expand their networks and keep up with the latest innovations in the livestock sector. Carrying the theme “Shaping a Resilient Food Estate for Indonesia,” the exhibition served as a meeting point for businesses, government, and supporting institutions to share innovations while strengthening the national food security ecosystem, particularly in the livestock sector.

The exhibition received broad support from various ministries and institutions, including the Indonesian House of Representatives (DPR RI), the Coordinating Ministry for Food, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Industry, the Ministry of Tourism, the National Food Agency, and LPPOM MUI. A range of livestock industry associations also extended their support, such as the Indonesian Feed Producers Association (GPMT), the Indonesian Poultry Breeding Companies Association (GPPU), along with other supporting associations.

BSD, Tangerang. Selama empat hari penyelenggaraan, ribuan pengunjung tampak memadati area pameran, mulai dari pelaku industri peternakan, produsen pakan, pemilik dan pengelola peternakan, pelaku agribisnis, hingga akademisi dan profesional yang ingin memperluas jejaring dan mengikuti inovasi terbaru di dunia peternakan. Dengan mengusung tema “Shaping a Resilient Food Estate for Indonesia,” pameran ini menjadi ruang bertemunya pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendukung untuk berbagi inovasi sekaligus memperkuat ekosistem ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang peternakan. Pameran ini memperoleh dukungan luas dari berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Pariwisata, Badan Pangan Nasional, dan LPPOM MUI. Beragam asosiasi industri peternakan juga turut memberikan dukungan, termasuk Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), serta asosiasi pendukung lainnya.

The atmosphere was vibrant at the Nusantara Livestock & Poultry (NLP) Expo 2025, held from 6–9 November 2025 at the Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Over the four days of the event, thousands of visitors filled the exhibition area, ranging from livestock industry players, feed producers, farm owners and managers, agribusiness actors, to academics and professionals seeking to expand their networks and keep up with the latest innovations in the livestock sector. Carrying the theme “Shaping a Resilient Food Estate for Indonesia,” the exhibition served as a meeting point for businesses, government, and supporting institutions to share innovations while strengthening the national food security ecosystem, particularly in the livestock sector.

The exhibition received broad support from various ministries and institutions, including the Indonesian House of Representatives (DPR RI), the Coordinating Ministry for Food, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Industry, the Ministry of Tourism, the National Food Agency, and LPPOM MUI. A range of livestock industry associations also extended their support, such as the Indonesian Feed Producers Association (GPMT), the Indonesian Poultry Breeding Companies Association (GPPU), along with other supporting associations.





NLP Expo Tahun 2025 dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pertanian, Bapak Dr. Sudaryono, B.Eng., MM., MBA, didampingi oleh Dirjend PKH dan Direktur PT. Debindo Global Expo serta para ketua asosiasi industri peternakan, yaitu Ketua Umum GPMT, Ketua Umum GPPU, dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Alat dan Mesin Pertanian Indonesia. Pada penyelenggaraan tahun ini, pameran menampilkan kategori produk yang cukup luas, mulai dari pakan dan nutrisi ternak, produksi peternakan dan unggas, obat hewan dan vaksin, hingga berbagai peralatan, teknologi, serta layanan logistik yang mendukung kegiatan peternakan modern.

Dalam pameran ini, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) turut berpartisipasi dengan menghadirkan booth yang menampilkan berbagai produk, layanan, dan informasi dari unit-unit pelaksana teknis di bawahnya. Partisipasi ini mencerminkan komitmen

The NLP Expo 2025 was officially opened by the Vice Minister of Agriculture, Dr. Sudaryono, B.Eng., MM., MBA, accompanied by the Director General of Livestock and Animal Health, the Director of PT Debindo Global Expo, and the chairpersons of livestock industry associations, namely the Chairperson of the Indonesian Feed Producers Association (GPMT), the Chairperson of the Indonesian Poultry Breeding Companies Association (GPPU), and the Chairperson of the Indonesian Agricultural Machinery and Equipment Companies Association. At this year's event, the exhibition showcased a broad range of product categories, from animal feed and nutrition, livestock and poultry production, veterinary medicines and vaccines, to various equipment, technologies, and logistics services supporting modern livestock operations.

At the exhibition, the Directorate General of Livestock and Animal Health (DGLAH) also took part by presenting a booth showcasing various products, services, and information from its technical implementing units. This participation

pemerintah dalam mendukung pembangunan peternakan yang tangguh dan berkelanjutan. Booth Ditjen PKH diisi oleh Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan (Dit. Hilirnak) bersama empat UPT, yakni Balai Besar Veteriner Farma Pusat Veteriner Farma (BBVF Pusvetma), Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden (BBPTU-HPT Baturraden), Balai Embrio Ternak Cipelang (BET Cipelang), dan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH), yang masing-masing menampilkan produk dan layanan unggulannya.

BBVF Pusvetma menampilkan berbagai jenis vaksin dan obat hewan yang dikembangkan untuk mendukung kesehatan ternak di Indonesia. Melalui produk-produknya, BBVF Pusvetma berupaya menjaga kualitas dan keamanan populasi ternak sekaligus memperkuat sistem kesehatan hewan nasional. Di sisi lain, BBPTU-HPT Baturraden menonjolkan produk susu segar serta berbagi informasi tentang manajemen peternakan sapi dan kambing perah. BET Cipelang turut berpartisipasi dengan memperkenalkan inovasi dalam bidang reproduksi

ternak, terutama teknologi embrio ternak. Teknologi ini berperan penting dalam upaya menghasilkan bibit unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas genetik ternak di Indonesia. Sementara itu, BPMSPH hadir untuk memperkenalkan layanan pengujian mutu dan sertifikasi produk hewan. Melalui keikutsertaannya, BPMSPH memberikan pemahaman kepada pelaku usaha maupun masyarakat tentang pentingnya pengujian dan sertifikasi dalam menjamin keamanan serta mutu pangan asal ternak yang beredar di pasaran.

reflects the government's commitment to supporting the development of a resilient and sustainable livestock sector. The DGLAH booth was filled by the Directorate of Downstreaming of Livestock Products together with four Technical Implementing Units (UPTs), namely the Central Veterinary Pharmaceutical Center (BBVF Pusvetma), the Baturraden Center for Superior Livestock Breeding and Forage (BBPTU-HPT Baturraden), the Cipelang Livestock Embryo Center (BET Cipelang), and the Animal Product Quality Testing and Certification Center (BPMSPH), each of which showcased its flagship products and services.



BBVF Pusvetma showcased a wide range of vaccines and veterinary medicines developed to support livestock health in Indonesia. Through these products, BBVF Pusvetma seeks to safeguard the quality and safety of livestock populations while strengthening the national animal health system. Meanwhile, BBPTU-HPT Baturraden highlighted fresh milk products and shared information on dairy cattle and dairy goat farm management.

BET Cipelang also participated by introducing innovations in livestock reproduction, particularly embryo technology. This technology plays a crucial role in producing superior breeding stock that can enhance productivity and genetic quality of livestock in Indonesia. At the same time, BPMSPH was present to introduce its animal product quality testing and certification services. Through its participation, BPMSPH provided business actors and the public with a better understanding of the importance of testing and certification in ensuring the safety and quality of livestock-derived food products circulating in the market.



Booth Ditjen PKH selama pameran tidak hanya menampilkan produk dan layanan, tetapi juga menjadi ruang interaktif bagi pengunjung untuk mendapatkan edukasi dan konsultasi seputar peternakan dan kesehatan hewan. Pengunjung dapat berdiskusi langsung dengan petugas untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, maupun peluang kerja sama di bidang peternakan. Suasana interaktif ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara Ditjen PKH dan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga pemerintah sebagai mitra yang terbuka bagi dunia usaha.

Selain itu, booth Ditjen PKH juga menghadirkan layanan konsultasi investasi dan ekspor produk peternakan yang difasilitasi oleh Dit. Hilirnak. Melalui layanan ini, pelaku usaha dan calon investor dapat berkonsultasi langsung mengenai potensi pengembangan usaha di subsektor peternakan. Inisiatif ini merupakan bentuk dukungan Ditjen PKH terhadap upaya peningkatan nilai tambah produk peternakan sekaligus memperluas akses pasar internasional.

Tak hanya hadir di area pameran, Direktur Hilirnak juga menjadi salah satu pembicara dalam Konsolidasi Nasional Forum Komunikasi Petani Muda Indonesia. Kegiatan ini mempertemukan berbagai organisasi petani muda dan mahasiswa pertanian dari seluruh Indonesia meliputi dari Gerakan Petani Muda Indonesia, Pemuda Tani Indonesia HKTI, Pemuda SPI, Pemuda KTNA, Pemuda Tani Merdeka, Punggawa Tani Indonesia, dan stakeholder lainnya.

In addition, the DGLAH booth also offered investment and export consultation services for livestock products, facilitated by the Directorate of Downstreaming of Livestock Products. Through this service, business actors and prospective investors could consult directly on opportunities for business development in the livestock subsector. This initiative represents Ditjen PKH's support for increasing the added value of livestock products while expanding access to international markets.

Beyond its presence in the exhibition area, the Director of Downstreaming of Livestock Products also served as one of the speakers at the National Consolidation of the Indonesian Young Farmers Communication Forum. This event brought together various young farmer organisations and agricultural students from across Indonesia, including the Indonesian Young Farmers Movement, Pemuda Tani Indonesia HKTI, Pemuda SPI, Pemuda KTNA, Pemuda Tani Merdeka, Punggawa Tani Indonesia, and other stakeholders.



Rangkaian dari kegiatan Konsolidasi Nasional FKPMI juga dilaksanakan seminar tentang “Kupas Tuntas Perizinan Usaha Bidang Pertanian dan Mewujudkan Swasembada Pangan serta Hilirisasi Pertanian Siap Ekspor”, dengan para narasumber Tenaga Ahli Menteri, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan PKH, serta Petani Milenial.

Selain itu, Ditjen PKH juga mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kupas Tuntas Perizinan Dasar dalam Perizinan Berusaha Subsektor Peternakan.” Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perwakilan kementerian/lembaga dan pelaku usaha subsektor peternakan.

Melalui FGD ini, para peserta berdiskusi langsung dengan perwakilan instansi terkait untuk mengkonsultasikan perizinan usaha, mulai dari kesesuaian ruang, perizinan lingkungan, hingga pengelolaan lahan. Diskusi ini sekaligus menegaskan komitmen Ditjen PKH dan Dit. Hilirnak dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memperlancar proses perizinan berusaha subsektor peternakan serta mendorong iklim investasi yang semakin kondusif.

Rangkaian kegiatan ini memperlihatkan peran aktif Ditjen PKH dalam mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui partisipasi dalam pameran dan forum diskusi, Ditjen PKH menunjukkan bahwa subsektor peternakan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Upaya peningkatan mutu, produktivitas, dan efisiensi peternakan menjadi bagian penting dari langkah menuju sistem pangan nasional yang tangguh dan mandiri.

Keikutsertaan Ditjen PKH dalam Nusantara Livestock & Poultry Expo 2025 tidak hanya menjadi sarana memperkenalkan program dan hasil kerja, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi lintas sektor. Semangat kebersamaan yang tercipta selama pameran mencerminkan optimisme bahwa dengan kerja sama yang solid, subsektor peternakan Indonesia akan semakin maju, modern, dan berdaya saing tinggi.



As part of the National Consolidation of the Indonesian Young Farmers Communication Forum, a seminar was also held on “An In Depth Review of Agricultural Business Licensing and Realising Food Self Sufficiency, as well as Export Ready Agricultural Downstreaming.” The seminar featured speakers including Ministerial Expert Staff, the Director of Downstreaming of Livestock Products of the DGLAH, and millennial farmers.

In addition, the DGLAH also organised a Focus Group Discussion (FGD) entitled “An In Depth Review of Basic Licensing in Business Licensing for the Livestock Subsector.” The activity was attended by representatives from various ministries and agencies, as well as business actors in the livestock subsector. Through this FGD, participants engaged in direct discussions with representatives of relevant institutions to consult on business licensing issues, ranging from spatial conformity and environmental permits to land management. This discussion further reaffirmed the commitment of DGLAH and the Directorate of Downstreaming of Livestock Products to strengthening synergy between the government and business actors in order to streamline business licensing processes in the livestock subsector and foster a more conducive investment climate.

This series of activities highlighted the active role of DGLAH in promoting synergy among the government, the business community, and society. Through its participation in the exhibition and discussion forums, DGLAH demonstrated that the livestock subsector holds significant potential for continued growth. Efforts to enhance quality, productivity, and efficiency in livestock production are an essential part of the journey towards a resilient and self sufficient national food system.

The participation in the Nusantara Livestock & Poultry Expo 2025 served not only as a platform to introduce programmes and showcase achievements, but also as a momentum to strengthen cross sector collaboration. The spirit of togetherness that emerged throughout the exhibition reflects optimism that, through solid cooperation, Indonesia’s livestock subsector will continue to advance, modernise, and become increasingly competitive.



Pengolahan Tepung Telur di Tani on Stage, Agrinex 2025

Egg Powder Processing at Tani on Stage, Agrinex 2025



Ir. Maria Nunik, M.P
 Analis Kebijakan Ahli Madya



Enes Suganda, S.TP
 Pengawas Alsintan Ahli Pertama

Dalam upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, Indonesia terus mendorong inovasi di berbagai sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Salah satunya melalui event “Indonesia International Agribusiness Expo (Agrinex)” yang diselenggarakan di JIEXPO tanggal 6-8 November 2025. Tahun ini Agrinex 2025 mengangkat tema besar “Food Sovereignty and Economic Growth in Indonesia”, sebuah pameran agribisnis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Salah satu sesi yang paling menarik perhatian adalah Tani on Stage yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Pada kesempatan ini Tani on Stage dalam bentuk Talkshow Tepung Telur, yang menyoroti bagaimana hilirisasi dapat mengubah tantangan surplus telur menjadi peluang ekonomi bernilai tinggi. Talkshow Tepung Telur ini memeriahkan Agrinex pada tanggal 7 November 2025.

To strengthen national food security and sovereignty, Indonesia continues to accelerate innovation across the agriculture, plantation, and livestock sectors. One of the key platforms for this effort is the Indonesia International Agribusiness Expo (Agrinex), held at JIEXPO on 6–8 November 2025. This year's Agrinex carries the theme “Food Sovereignty and Economic Growth in Indonesia”, a major agribusiness exhibition bringing together government institutions, businesses, academics, and the general public. Among its highlights was Tani on Stage, an event conducted in collaboration with the Ministry of Agriculture. This year, Tani on Stage presented a Talkshow on Egg Powder, showcasing how downstream processing can turn the challenge of egg surplus into high-value economic opportunities. The session took place on 7 November 2025 and drew significant interest.

Talkshow menghadirkan dua narasumber, yaitu Direktur Utama PT Sinergi Pangan Mandiri, Ir. Tito Indarto, berbagi pengalaman perusahaannya sebagai pionir tepung telur dalam negeri; dan Ir. Maria Nunik Sumartini, MP sebagai perwakilan dari Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian, yang memaparkan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri pengolahan hasil peternakan.

Pada kesempatan ini hadir peserta yang cukup beragam, mulai dari pelaku usaha importir tepung telur, peserta expo, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN), hingga pengunjung umum yang tertarik pada inovasi pangan. Kombinasi pembicara dan peserta yang beragam menciptakan ruang diskusi yang hidup dan membuka banyak wawasan.



Indonesia merupakan produsen telur terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Di negara Asian, India, Indonesia dan Jepang merupakan pemasok utama. Pengembangan peternakan ayam ras petelur, didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan potensi ekspor (FAO Stat, 2025). Indonesia pada tahun 2024 mengalami surplus produksi telur sebanyak 0,17 juta ton. Isu tepung telur menjadi penting karena Indonesia masih mengimpor sekitar 2.500 ton tepung telur setiap tahun, meski produksi telur nasional sebenarnya surplus dan harga telur di Indonesia termasuk kompetitif di dunia. Harga telur di Indonesia tercatat sebagai harga telur termurah keenam di dunia (Bruno, 2025). Fakta ini memberikan peluang untuk memperluas akses ke pasar ekspor dan pengembangan industri tepung telur.

The talkshow featured two speakers: Ir. Tito Indarto, President Director of PT Sinergi Pangan Mandiri, who shared his company's experience as a pioneer of domestic egg powder production; and Ir. Maria Nunik Sumartini, MP, representing the Directorate of Livestock Product Downstreaming, Ministry of Agriculture, who outlined government policy directions for developing the livestock processing industry.

The session attracted a diverse audience, including egg powder importers, expo participants, students from the Agricultural Development Polytechnic (POLBANGTAN), and visitors curious about food innovation. This mix of participants created a dynamic discussion and broadened perspectives.

Indonesia is the fourth-largest egg producer in the world, after China, India, and the United States. In Asia, India, Indonesia, and Japan are the leading suppliers, driven by strong domestic demand and export potential (FAO Stat, 2025). In 2024, Indonesia recorded a surplus of 0.17 million tonnes of eggs. The issue of egg powder is significant because Indonesia still imports around 2,500 tonnes of egg powder annually, even though national production is surplus and egg prices in Indonesia are highly competitive globally. Indonesia ranks as the sixth-cheapest egg producer in the world (Bruno, 2025). These facts present opportunities for export expansion and domestic development of the egg powder industry.



Di tengah kondisi tersebut, pengolahan telur menjadi tepung menawarkan banyak keuntungan, seperti masa simpan panjang, kemudahan distribusi, fleksibilitas penggunaan, dan kandungan gizi yang tetap terjaga. Industri pangan skala besar juga semakin membutuhkan bahan baku yang stabil dan praktis. Dimana kebutuhan tersebut mampu dijawab oleh tepung telur.

PT Sinergi Pangan Mandiri menjadi contoh nyata perkembangan industri tepung telur. Mengawali inisiatif sejak 2019 dan mulai berproduksi pada 2023, perusahaan yang berbasis di Blitar ini menggunakan teknologi agitated fan drying, metode pengeringan yang dinilai ideal untuk kebutuhan industri makanan. Setiap harinya, perusahaan mampu menyerap sekitar 30 ton telur segar, dan menghasilkan tiga jenis tepung telur, yaitu whole egg powder, egg yolk powder, dan egg white powder. Produk tersebut kini digunakan oleh berbagai industri seperti produsen mayones, mi instan, hingga frozen food. Dengan kapasitas produksi sekitar 8 ton tepung telur per bulan dan sertifikasi HACCP yang sudah dikantongi, perusahaan ini menjadi salah satu motor penggerak hilirisasi telur lokal.

Meski demikian, membangun industri tepung telur dalam negeri bukan tanpa tantangan. Industri pangan Indonesia sudah terbiasa menggunakan tepung telur impor yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Produsen lokal perlu menyesuaikan kualitas dan spesifikasi produk tepung telur agar mampu memenuhi standar dan permintaan pasar yang beragam.

Processing eggs into powder offers many advantages: longer shelf life, easier distribution, broad application in food processing, and stable nutritional content. Large-scale food industries increasingly require ingredients that are practical and consistent—needs that egg powder meets effectively.

PT Sinergi Pangan Mandiri exemplifies domestic egg powder development. Starting its initiative in 2019 and beginning production in 2023, the Blitar-based company employs agitated fan drying technology, a method well-suited for food industry applications. The company processes around 30 tonnes of fresh eggs daily, producing whole egg powder, egg yolk powder, and egg white powder, which are used in industries including mayonnaise, instant noodles, and frozen foods. With a production capacity of 8 tonnes of egg powder per month and HACCP certification, the company is emerging as a key driver of Indonesia's egg downstreaming efforts. Despite this progress, building a domestic egg powder industry presents challenges. Indonesian food manufacturers are accustomed to imported egg powder with varied characteristics. Local producers must adapt quality and specifications to meet diverse market demands.

Direktur Utama PT Sinergi Pangan Mandiri menekankan pentingnya membangun posisi tawar yang kuat dengan cara memahami kebutuhan konsumen industri dan memastikan konsistensi produk. Ia juga mendorong produsen lain untuk meningkatkan kapasitas agar Indonesia tidak lagi bergantung pada tepung telur impor.

Dari sisi pemerintah, dukungan terus diperkuat melalui pendampingan sertifikasi, fasilitasi pemasaran, hingga koordinasi dengan lembaga seperti Sucofindo untuk memastikan mutu dan keamanan produk. Pemerintah mengajak agar para importir tepung telur dapat memanfaatkan tepung telur produksi dalam negeri dan membantu para produsen tepung telur dalam negeri dalam pengembangan produk sesuai

kebutuhan untuk substitusi

impor tepung telur.

Pemerintah juga

mendorong

UMKM dan

calon investor

untuk terlibat,

baik dalam

penyerapan produk

lokal maupun dalam

pengembangan pabrik

pengolahan tepung telur baru.

Meski dampaknya terhadap

peternak kecil belum terasa langsung,

meningkatnya serapan telur segar untuk pengolahan diproyeksikan akan membantu meningkatkan harga telur di tingkat produsen, yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan peternak.

PT Sinergi Pangan Mandiri on stage pada Agrinex 2025 menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu harus rumit atau berbiaya besar. Terkadang, solusi ada pada bagaimana kita mengelola sumber daya yang sudah berlimpah. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, industri pangan, dan investor, tepung telur dapat menjadi produk strategis yang dapat mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah produk peternakan, dan juga membuka jalan bagi lahirnya industri pengolahan baru di sektor peternakan. Bahkan ke depan dapat berpotensi menghasilkan devisa negara dari ekspor tepung telur. Hal ini dibuktikan dengan ekspor tepung telur Indonesia pada tahun 2024 senilai 222,5 ribu US\$.

The President Director of PT Sinergi Pangan Mandiri emphasised the need to build strong bargaining positions by understanding industrial requirements and ensuring consistent product quality. He also encouraged more producers to increase capacity so Indonesia can reduce reliance on imported egg powder.

From the government's perspective, support is provided through certification guidance, marketing facilitation, and coordination with institutions such as Sucofindo to ensure product quality and safety. The government encouraged egg powder importers to utilise domestic products and collaborate with local producers to adjust specifications for import substitution. SMEs and potential investors are also encouraged to participate—both in absorbing local products and in

developing new

egg powder processing

facilities. Although

the impact on small-

scale farmers is not

yet direct, increased

absorption of fresh

eggs for processing

is expected to raise

farm-gate egg prices, ultimately improving

farmer welfare.

PT Sinergi Pangan Mandiri's appearance at Agrinex 2025 illustrates that innovation does not always require complex or high-cost solutions. Sometimes, the answer lies in better managing abundant resources. With strong collaboration between government, businesses, the food industry, and investors, egg powder has the potential to become a strategic product that reduces import dependence, increases the added value of livestock products, and fosters the emergence of new processing industries. The potential for foreign exchange is also evident: Indonesia exported egg powder worth US\$222.5 thousand in 2024.



Tani on Stage Agrinex 2025 menjadi pengingat bahwa hilirisasi bukan sekadar wacana, tetapi sebuah gerakan yang mulai terlihat nyata. Surplus telur bukan lagi menjadi masalah, tetapi peluang emas untuk memperkuat industri pangan Indonesia dan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

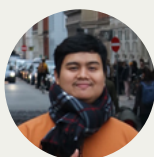
Tani on Stage at Agrinex 2025 serves as a reminder that downstream development is not merely a concept but a movement already taking shape. Egg surplus is no longer a problem, but rather a golden opportunity to strengthen Indonesia's food industry and support the prosperity of livestock sector players.





Workshop Fasilitasi Ekspor Komoditas Pertanian untuk Pangan Jemaah Haji 2026 Digelar, Pelaku Usaha Harapkan Kepastian Ekspor ke Arab Saudi

Workshop on Facilitating the Export of Agricultural Commodities for Hajj Pilgrims' Food 2026 Held, Business Actors Hope for Export Certainty to Saudi Arabia



Ramdhani, S.Pt
APHP Ahli Pertama

Kementerian Pertanian menggelar Workshop Fasilitasi Ekspor Komoditas Pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan Jemaah Haji Indonesia tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (7/11) ini dipimpin oleh Tenaga Ahli Menteri (TAM) Mujib Burrohman dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Haji (Kemenhaj) Arab Saudi, BPKH Limited, serta para pelaku usaha komoditas pertanian dan peternakan.

Workshop ini menjadi rapat awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pasokan pangan sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan pihak catering, Kementerian Haji, BPKH Limited, dan Kementerian Pertanian. Forum ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk membuka akses ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Arab Saudi, khususnya untuk kebutuhan penyelenggaraan Haji 2026.

The Ministry of Agriculture organised a Workshop on Facilitating the Export of Agricultural Commodities to meet the food needs of Indonesian Hajj pilgrims in 2026. The event, held on Friday (7 November), was led by Ministerial Expert Staff (TAM) Mujib Burrohman and attended by representatives of the Saudi Arabian Ministry of Hajj, BPKH Limited, as well as business actors from the agricultural and livestock commodity sectors.

The workshop served as an initial meeting to identify food supply requirements while also bringing together business actors with catering providers, the Ministry of Hajj, BPKH Limited, and the Ministry of Agriculture. This forum is expected to become a strategic step in opening export access for Indonesian agricultural commodities to Saudi Arabia, particularly to support the implementation of the 2026 Hajj.



Para pelaku usaha peternakan menyampaikan harapan agar terdapat kejelasan tindak lanjut kerja sama Government-to-Government (G to G) dengan Arab Saudi, mengingat mereka telah siap mengeksport produk namun masih menunggu persetujuan resmi dari Saudi Food and Drug Authority (SFDA).

Sementara itu, pelaku usaha dari sektor lainnya berharap workshop ini dapat mempertemukan mereka secara langsung dengan importir Arab Saudi atau mitra yang telah bekerja sama sebelumnya. Pertemuan tersebut dinilai penting agar mereka dapat memperoleh informasi spesifikasi kebutuhan yang sedang berjalan, seperti kuantitas, kualitas, dan harga.

Dalam kegiatan ini turut hadir BPKH Limited, anak perusahaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia yang beroperasi di Arab Saudi. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang strategis termasuk pengelolaan hotel, properti, katering, serta layanan transportasi guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

Workshop ini akan ditindaklanjuti dengan rapat lanjutan yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Haji Arab Saudi sebagai tuan rumah dan diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dan membuka peluang ekspor komoditas pertanian nasional ke pasar Arab Saudi.

Livestock business actors expressed their hope for clearer follow up on Government to Government (G to G) cooperation with Saudi Arabia, as they are ready to export their products but are still awaiting official approval from the Saudi Food and Drug Authority (SFDA).

Meanwhile, business actors from other sectors hoped that the workshop would enable them to meet directly with Saudi Arabian importers or partners with whom they had previously cooperated. Such meetings were considered important in order to obtain up to date information on current requirements, including quantity, quality, and pricing specifications.

Also in attendance was BPKH Limited, a subsidiary of Indonesia's Hajj Financial Management Agency (BPKH) operating in Saudi Arabia. The company is engaged in various strategic sectors, including hotel and property management, catering, and transportation services, with the aim of improving the quality of services for Indonesian Hajj and Umrah pilgrims.

The workshop will be followed up with further meetings to be hosted by the Saudi Arabian Ministry of Hajj, and is expected to further strengthen collaboration and open wider export opportunities for national agricultural commodities to the Saudi Arabian market.



Kenapa Standar Kalsium pada Susu MBG Perlu Disesuaikan? Yuk, Kenali Faktanya!

Why Does the Calcium Standard in MBG Milk Need to Be Adjusted? Let's Take a Look at the Facts!



Putri Fitriananda, S.Pt, M.Si
PMHP Ahli Pertama



Tika Kartika, S.P
PMHP Ahli Muda

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu upaya penting pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan makanan dan minuman bergizi, termasuk susu, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sumber nutrisi terbaik bagi tumbuh kembang. Tidak hanya lezat, susu juga membawa banyak manfaat kesehatan, terutama karena kandungan proteinnya yang mudah diserap dan kalsiumnya yang tinggi.

Sejak awal penyusunan petunjuk teknis MBG, susu yang akan didistribusikan wajib mengandung minimal 15% Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk kalsium dalam setiap 115 mL sajian. Harapannya untuk mendorong anak-anak memperoleh asupan kalsium mencukupi untuk pertumbuhan tulang, gigi, serta mendukung fungsi otot dan saraf. Namun, setelah dilakukan pengujian pada berbagai produk susu pasteurisasi dan UHT lokal, ditemukan bahwa sebagian besar dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Pengolahan Susu (IPS) lokal belum mampu memenuhi angka tersebut tanpa penambahan fortifikasi dan teknologi khusus.

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a strategic government initiative aimed at improving the nutritional quality of Indonesian children. Through this program, children receive balanced nutritious food and beverages, including milk, which has long been recognised as an important source of protein and calcium for growth and development.

In the initial technical guidelines of the MBG programme, milk distributed under the scheme was required to contain at least 15 percent of the Recommended Dietary Allowance (RDA) for calcium in each 115 mL serving. This target was intended to ensure adequate calcium intake to support bone and tooth development, as well as muscle and nerve function. However, testing of various locally produced pasteurised and UHT milk products revealed that most products from Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and local dairy processing industries are unable to meet this requirement naturally.

Kandungan kalsium yang dimiliki oleh produk susu pasteurisasi dan UHT lokal berada pada kisaran 10-15% AKG dengan rata-rata 12.6% AKG. Jadi, agar UMKM tetap bisa ikut berperan dalam MBG, perlu adanya penyesuaian standar kalsium yang realistis dengan kondisi peternakan di Indonesia, namun tetap aman, bergizi, dan juga bermutu pastinya.

Oleh karena itu, penyesuaian standar kalsium merupakan langkah penting untuk menyelaraskan persyaratan regulasi dengan kondisi nyata produksi susu nasional, sekaligus tetap menjamin keamanan pangan, kecukupan gizi, dan mutu produk. Penyesuaian tersebut juga akan membuka peluang partisipasi yang lebih luas bagi UMKM dan pelaku pengolahan susu lokal dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.

Dengan mengadopsi standar yang berbasis pada bukti ilmiah dan kondisi produksi di lapangan, Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan status gizi anak, tetapi juga memperkuat rantai pasok susu nasional, memberdayakan produsen lokal, serta mendorong terwujudnya kemandirian pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kenapa Kalsium Penting untuk Anak?

Kalsium adalah salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan anak setiap hari, terutama pada masa

pertumbuhan. Nutrisi ini berperan besar dalam membangun tulang dan gigi yang kuat, serta membantu fungsi otot dan saraf bekerja dengan baik. Karena tubuh tidak bisa memproduksi kalsium sendiri, anak harus mendapatkannya dari makanan dan minuman bergizi. Susu menjadi pilihan yang sangat ideal karena mengandung kalsium alami dalam jumlah tinggi dan mudah diserap tubuh.

Dalam konteks pencegahan stunting, kalsium menjadi nutrisi yang tidak bisa diabaikan. Stunting bukan sekadar tubuh pendek, tetapi kondisi di mana pertumbuhan anak, baik fisik maupun kognitif, tidak berkembang seperti seharusnya. Berdasarkan peta prevalensi stunting Unicef (2025), kawasan Asia Tenggara berada pada kategori “tinggi” dengan angka stunting 20–30%, dan secara spesifik ditunjukkan sebesar 22,7% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa

The calcium content of local pasteurised and UHT milk generally ranges from 10 to 15 percent of the RDA, with an average of approximately 12.6 percent per serving. Achieving the 15 percent threshold would require fortification or the use of specialised processing technologies, which are often not accessible to small-scale producers.

Therefore, adjusting the calcium standard is an important step to align regulatory requirements with the realities of national dairy production, while still ensuring food safety, nutritional adequacy, and product quality. Such an adjustment would also allow broader participation of MSMEs and local dairy processors in supporting the implementation of the MBG programme.

By adopting standards grounded in scientific evidence and real-world production conditions, the MBG programme is expected not only to improve children's nutritional status but also to strengthen the national dairy supply chain, empower local producers, and promote sustainable food self-sufficiency in Indonesia.

Why Is Calcium Important for Children?

Calcium is one of the essential nutrients that children need every day, especially during periods of growth. This nutrient plays a major role in building strong bones and

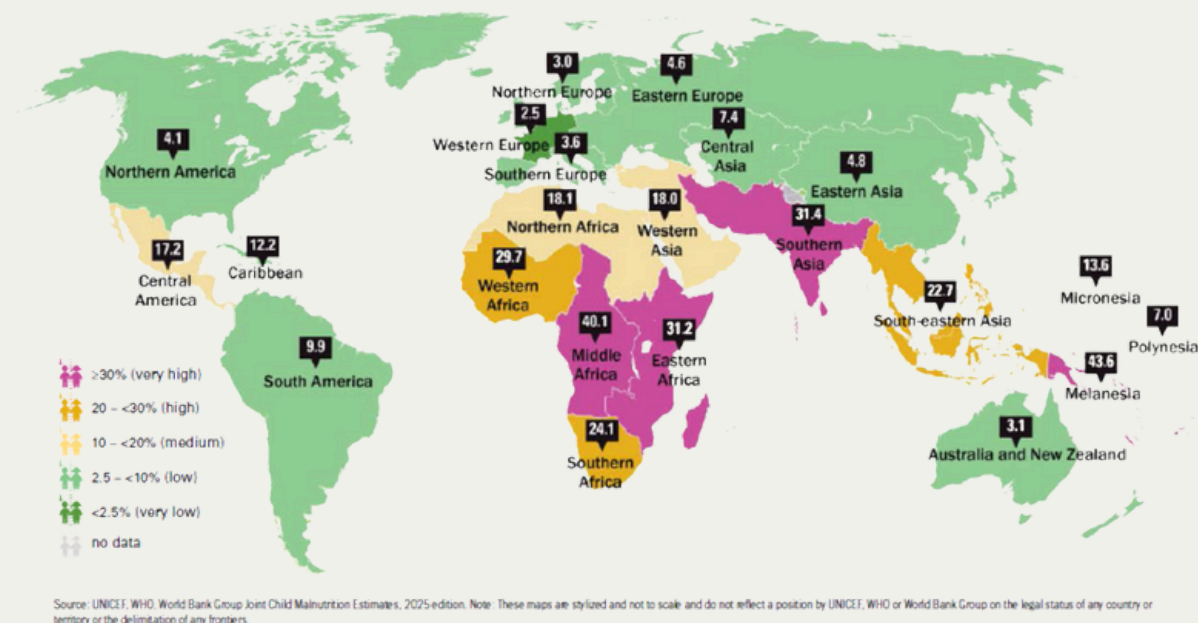
teeth, as well as supporting proper muscle and nerve function. Because the body cannot produce calcium on its own, children must obtain it from nutritious foods and beverages. Milk is an ideal choice because it naturally contains high levels of calcium that are easily absorbed by the body.

In the context of stunting prevention, calcium is a nutrient that cannot be overlooked. Stunting is not merely a condition of short stature, but a state in which a child's growth, both physical and cognitive, does not develop as it should. According to the UNICEF stunting prevalence map (2025), Southeast Asia falls into the “high” category, with stunting rates ranging from 20–30%, specifically recorded at 22.7% in 2024. This figure indicates that approximately



sekitar 1 dari 5 anak balita di kawasan ini mengalami stunting. Dibandingkan tahun 2012, terjadi penurunan dari 28,4% menjadi 22,7%, namun laju penurunannya melambat dan masih jauh dari target global.

1 in 5 children under five in the region experience stunting. Compared to 2012, when the prevalence was 28.4%, there has been a decline to 22.7%; however, the rate of reduction has slowed and remains far from the global target.



Untuk Indonesia sendiri sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, angka tersebut sejalan dengan situasi nasional yang juga berada pada kisaran sedang-tinggi dibandingkan negara lain. Penurunan stunting di Indonesia menunjukkan progres yang cukup signifikan, dengan angka prevalensi nasional sebesar 19,8% pada tahun 2024 sesuai hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Meski tren penurunan terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kecukupan gizi, akses pangan bergizi, serta perbaikan pola asuh dan kesehatan ibu-anak. Dalam menghadapi salah satu dari tantangan tersebut, yakni kurangnya asupan gizi penting, termasuk kalsium dan protein, maka susu menjadi bagian penting dalam program MBG. Satu gelas susu dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Memastikan anak minum susu atau mengonsumsi makanan kaya kalsium secara rutin adalah investasi penting untuk masa depan mereka.

Fakta di Lapangan: Kandungan Kalsium Susu Lokal

Kandungan gizi susu, termasuk kalsium, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari jenis sapi, pakan, wilayah, hingga metode pengolahan. Data BPOM (2025) terhadap 37 produk susu pasteurisasi dan UHT yang beredar di Indonesia,

For Indonesia, as one of the most populous countries in Southeast Asia, these figures are consistent with the national situation, which also falls within the moderate to high range compared to other countries. The reduction in stunting in Indonesia has shown fairly significant progress, with the national prevalence recorded at 19.8% in 2024 based on the Indonesian Nutritional Status Survey (SSGI). Although the downward trend has continued over recent years, Indonesia still faces major challenges in meeting adequate nutrition, ensuring access to nutritious food, and improving caregiving practices as well as maternal and child health.

In addressing one of these challenges, namely insufficient intake of essential nutrients including calcium and protein, milk becomes an important component of the MBG programme. A glass of milk can help meet daily nutritional needs and support children's overall growth and development. Ensuring that children regularly drink milk or consume calcium rich foods is a crucial investment in their future.

Field Facts: Calcium Content of Local Milk

The nutritional content of milk, including calcium, is strongly influenced by many factors, from cattle breed, feed, and region to processing methods. Data from BPOM (2025) on 37 pasteurised and UHT milk products circulating in Indonesia,

serta pengujian langsung yang dilakukan oleh beberapa koperasi susu menunjukkan bahwa kandungan kalsium alami susu berada pada kisaran 10–15% AKG per takaran saji dengan rata-rata 12,6% AKG. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 24% produk yang mampu mencapai angka 15%. Ini artinya, banyak UMKM yang kesulitan memenuhi standar awal, bukan karena mutu susu rendah, tetapi karena kandungan alami susu memang bervariasi. Untuk memenuhi angka 15%, pelaku usaha harus melakukan fortifikasi dengan cara:

- Menambah premix kalsium
- Menggunakan mesin homogenizer khusus
- Mengubah formulasi dan proses produksi

Fortifikasi pangan mengacu pada penambahan satu atau lebih zat gizi pada bahan pangan untuk menambahkan zat gizi yang belum ada ataupun memperkaya zat gizi yang sudah ada. Proses-proses tersebut tentunya memerlukan biaya tambahan yang cukup besar, bahkan dapat membuat UMKM tidak akan dapat berpartisipasi dalam Program MBG, padahal UMKM merupakan tulang punggung produksi susu lokal. Jika standar kalsium dibiarkan terlalu tinggi, risiko yang muncul bukan hanya kesulitan produksi bagi UMKM, tetapi juga potensi berkurangnya partisipasi pelaku usaha dalam program MBG.

Akibatnya, penyerapan susu lokal bisa turun, dan kesempatan memberikan gizi baik kepada anak-anak dapat terganggu. Karena itu, setelah mempertimbangkan data ilmiah dan kondisi di lapangan, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mengajukan penyesuaian standar kalsium menjadi minimal 10% AKG, tanpa menurunkan manfaat gizinya bagi anak.

Secara ilmiah, 10% AKG kalsium dalam satu gelas kecil susu 115 ml sudah sangat berarti bagi pertumbuhan anak. Tubuh anak-anak membutuhkan kalsium dalam jumlah cukup setiap hari untuk membangun tulang yang kuat dan mencegah risiko tulang rapuh di kemudian hari.



as well as direct testing conducted by several dairy cooperatives, show that the natural calcium content of milk generally falls within the range of 10–15 percent of the Recommended Dietary Allowance (RDA) per serving, with an average of 12.6 percent RDA. This indicates that only around 24 percent of products are able to reach the 15 percent level. In other words, many MSMEs struggle to meet the initial standard not because the quality of the milk is poor, but because the natural calcium content of milk is inherently variable. To reach the 15 percent threshold, businesses must carry out fortification by:

- *adding calcium premix*
- *using specialised homogeniser equipment*
- *modifying formulations and production processes*

Food fortification refers to the addition of one or more nutrients to food products, either to introduce nutrients that are not naturally present or to enrich existing ones. These processes inevitably require significant additional costs and may prevent MSMEs from participating in the MBG Programme, even though MSMEs are the backbone of local milk production. If the calcium standard is set too high, the risk is not only production difficulties for MSMEs, but also reduced participation of businesses in the MBG Programme. As a result, the absorption of local milk could decline, and opportunities to deliver good nutrition to children may be compromised.

For these reasons, after considering scientific evidence and field conditions, the Directorate of Livestock Product Downstream Development has proposed adjusting the calcium standard to a minimum of 10 percent RDA, without reducing its nutritional benefits for children.

From a scientific perspective, 10 percent RDA of calcium in a small 115 ml glass of milk is already highly meaningful for child growth. Children's bodies require sufficient daily calcium intake to build strong bones and reduce the risk of bone fragility later in life.

Bahkan, kalsium berperan dalam mengatur detak jantung, menggerakkan otot, hingga membantu fungsi otak. Kekurangan kalsium terutama di masa emas pertumbuhan bisa berkontribusi pada masalah kesehatan jangka panjang, termasuk risiko pertumbuhan tidak optimal.

Dengan penyesuaian standar kalsium MBG menjadi 10% AKG, program ini diharapkan menjadi lebih inklusif dan efektif. Anak-anak tetap memperoleh manfaat nutrisi penting dari susu, sementara UMKM, koperasi susu, dan IPS lokal dapat lebih mudah berpartisipasi. Pada akhirnya, langkah ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang memastikan sebanyak mungkin anak Indonesia mendapatkan akses gizi berkualitas, sambil memperkuat rantai pasok susu nasional.

Program MBG bukan hanya menyediakan makanan, namun membangun masa depan. Dengan kebijakan yang tepat, potensi lokal yang kuat, dan dukungan masyarakat, kita bisa bersama-sama memastikan generasi Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting.

Calcium also plays a role in regulating heart rhythm, enabling muscle movement, and supporting brain function. Calcium deficiency, especially during the critical growth period, can contribute to long-term health problems, including the risk of suboptimal growth.

By adjusting the MBG calcium standard to 10 percent RDA, the programme is expected to become more inclusive and effective. Children will continue to receive essential nutritional benefits from milk, while MSMEs, dairy cooperatives, and local milk processing industries (IPS) can participate more easily. Ultimately, this step is not merely about numbers, but about ensuring that as many Indonesian children as possible have access to quality nutrition, while strengthening the national milk supply chain.

The MBG Programme is not only about providing food, but about building the future. With appropriate policies, strong local potential, and community support, we can collectively ensure that Indonesia's next generation grows up healthy, intelligent, and free from stunting.





Peluang Besar Peternak Nasional: Pengelolaan Dam Haji dari Indonesia

***A Major Opportunity for National Farmers:
Management of the Hajj Dam from Indonesia***



Aan Affandi, M.Si

Wastukan Ahli Muda



Yaumil Ghuftron Akmal, S. Pt

Analisis Kebijakan Ahli Pertama

Dam adalah sanksi atau denda yang harus dibayar saat seseorang menunaikan ibadah haji karena beberapa sebab, seperti melanggar larangan ihram, meninggalkan wajib haji, dan mengerjakan Haji Tamattu' serta Qiran. Jemaah haji Indonesia tidak dapat menghindari Dam karena harus mengambil Haji Tamattu', yaitu dengan melaksanakan umrah sebelum beribadah haji. Dam secara bahasa berarti mengalirkan darah dengan menyembelih hewan kurban yang dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji. Dalil tentang Dam terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 95.

Arab Saudi mengimpor ratusan ribu hewan ternak termasuk kambing dan domba untuk memenuhi kebutuhan musiman seperti Haji dan Idul Adha dari Afrika dan Asia Selatan. Kambing atau domba yang digunakan untuk Dam yang dipotong di Saudi Arabia dagingnya tidak bawa pulang ke tanah air tetapi disalurkan ke fakir miskin yang ada di tanah haram. Tahun ini terdapat hal berbeda dari penyelenggaraan haji Indonesia. Untuk pertama kalinya, daging Dam dan Hadyu tidak hanya disembelih di tanah suci, tetapi sebagian disembelih dan dikelola di tanah air untuk dibagikan langsung kepada masyarakat di Tanah Air.

Dam refers to a sanction or fine that must be paid when a person performs the Hajj due to certain reasons, such as violating the prohibitions of ihram, failing to perform obligatory rites of Hajj, or undertaking Hajj Tamattu' and Qiran. Indonesian Hajj pilgrims cannot avoid Dam because they are required to perform Hajj Tamattu', which involves carrying out Umrah before the Hajj rituals. Linguistically, Dam means the flowing of blood through the slaughter of a sacrificial animal, which is carried out during the performance of Hajj. The legal basis for Dam is found in the Qur'an, Surah Al Maidah, verse 95.

Saudi Arabia imports hundreds of thousands of livestock, including goats and sheep, to meet seasonal demand during Hajj and Eid al Adha, mainly from Africa and South Asia. Goats or sheep used for Dam that are slaughtered in Saudi Arabia are not brought back to the pilgrims' home countries; instead, the meat is distributed to the poor in the holy land. This year, however, marks a significant development in the organisation of Indonesia's Hajj. For the first time, Dam and Hadyu meat is not only slaughtered in the holy land, but a portion is also slaughtered and managed domestically, to be distributed directly to communities within Indonesia.



Baznas telah berkoordinasi dengan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan (Hilirnak) dan Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian dalam rangka penyiapan Dam jemaah haji Indonesia yang akan dikelola dan didistribusikan di Tanah Air. Pengurus Baznas Pusat melalui Pimpinan Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan M.Si. menyampaikan bahwa dengan kuota haji tahun 2026 sekitar 221 ribu jemaah haji dan 30 ribu kuota haji khusus maka dibutuhkan jumlah hewan untuk Dam yang tidak sedikit. Pola yang akan dijalankan untuk Dam adalah: 1) Disembelih di Arab Saudi (20%); 2) dipotong di penerima manfaat; 3) dipotong dan diolah serta dikemas. Direktur Hilirnak, Dr. drh. Makmun, M.Sc. menyatakan bahwa untuk memunculkan syiar haji, pemotongan hewan kurban sebaiknya dilaksanakan dilokasi Jemaah haji tersebut.

Beberapa tantangan yang perlu dipersiapkan adalah terkait ketersediaan hewan kurban pada saat Hari Tasrik (11-13 Dzulhijah), harga hewan meningkat dari hari biasanya. Sinkronisasi data antara jumlah jemaah haji dan sebaran ternak perlu dilakukan untuk memudahkan pengadaan dan distribusi ternak. Peran asosiasi peternak kambing dan domba sangat penting untuk konsolidasi dengan Baznas dalam penyediaan ternak. Untuk penyediaan hewan Dam dibutuhkan waktu yang tidak singkat yaitu kurang lebih satu tahun dari ternak lahir hingga memenuhi syarat. Maka apabila tidak adanya perencanaan dalam produksi hulu (breeding) dan budidaya yang baik maka populasi ternak kambing dan domba nasional akan terkuras secara drastis.

Baznas has coordinated with the Directorate of Downstream Livestock Products (Hilirnak) and the Directorate of Animal Health under the Directorate General of Livestock and Animal Health (PKH) of the Ministry of Agriculture in preparation for the Dam of Indonesian Hajj pilgrims to be managed and distributed domestically. Representatives of Baznas Headquarters, through the Head of the Collection Division, Rizaludin Kurniawan, M.Sc., conveyed that with a Hajj quota of around 221 thousand pilgrims in 2026 and an additional 30 thousand special Hajj quota, a substantial number of animals will be required for Dam. The implementation pattern for Dam will include: (1) slaughtering in Saudi Arabia (20%); (2) slaughtering at the beneficiary locations; and (3) slaughtering followed by processing and packaging.

Several challenges need to be addressed, particularly regarding the availability of sacrificial animals during the Hari Tasrik (11–13 Dzulhijah), when livestock prices typically rise above normal levels. Synchronisation of data between the number of Hajj pilgrims and the distribution of livestock is necessary to facilitate procurement and distribution. The role of goat and sheep farmer associations is crucial for consolidation and coordination with Baznas in the provision of livestock. Supplying animals for Dam requires a considerable lead time, approximately one year from birth until the animals meet the required criteria. Therefore, without proper planning in upstream production (breeding) and cultivation, the national goat and sheep population could be severely depleted.

Kebermanfaatan dari ternak Dam Jemaah Haji yang dikelola ditinjau dari aspek distribusi bisa lebih luas di wilayah Tanah Air, tentunya dengan pengolahan dan pengemasan daging kurban menjadi menu masakan yang baik dan bermutu. Dam haji yang dikelola dengan baik dapat memberikan multiplier effect yang baik untuk menggerakkan roda perekonomian dalam negeri khususnya untuk sektor peternakan kambing dan domba dari hulu ke hilir.

Hal tersebut melahirkan peternak-peternak yang harus mampu memenuhi permintaan Dam, menciptakan lapangan pekerjaan dari hulu hingga hilirisasi produk (olahan kambing dan domba), dan menunjang prioritas program pemerintah diantaranya untuk menunjang gizi ibu hamil, mencegah stunting, sekaligus mendukung program Asta Cita dari Pemerintah.

The benefits of managing Dam livestock for Hajj pilgrims domestically include the ability to distribute the meat more widely across the country, particularly through proper processing and packaging of the sacrificial meat into high quality and nutritious food products. Well managed Hajj Dam can generate a positive multiplier effect by stimulating the domestic economy, especially within the goat and sheep livestock sector from upstream to downstream.

This approach encourages the emergence of farmers capable of meeting Dam demand, creates employment opportunities from upstream production to downstream product processing and value addition, and supports government priority programmes, including improving maternal nutrition, preventing stunting, and contributing to the implementation of the government's Asta Cita programme.



Menjembatani Investasi: Ditjen PKH Mengurai Hambatan Regulasi untuk Perkuat Subsektor Peternakan

***Bridging Investment:
The Directorate General of Livestock and Animal Health Addresses
Regulatory Barriers to Strengthen the Livestock Subsect***



Gravita Puji Lestari, S.Pt
Penelaah Teknis Kebijakan

Pemerintah terus berupaya mengakselerasi iklim investasi di sektor strategis, salah satunya adalah subsektor peternakan. Dalam rangka mendukung investasi, khususnya pada komoditas sapi perah dan sapi potong, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian mengambil langkah proaktif sebagai fasilitator utama.

Menyadari bahwa proses perizinan sebagai langkah awal untuk meningkatkan laju investasi, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) khusus. Acara yang bertajuk "Kupas Tuntas Perizinan Dasar Dalam Perizinan Berusaha Subsektor Peternakan" ini dilaksanakan pada 6 November 2025. FGD ini menjadi bagian penting dari rangkaian acara Nusantara Livestock & Poultry Expo, yang diselenggarakan di International Convention Exhibition (ICE) BSD City.

The government continues to strive to accelerate the investment climate in strategic sectors, one of which is the livestock subsector. In support of investment, particularly in the dairy and beef cattle commodities, the Directorate General of Livestock and Animal Health (Ditjen PKH) of the Ministry of Agriculture has taken a proactive role as a key facilitator.

Recognising that licensing processes are a crucial initial step in boosting investment momentum, the Directorate of Downstream Livestock Products organised a dedicated Focus Group Discussion (FGD). The event, titled "A Comprehensive Review of Basic Licensing in Business Permits for the Livestock Subsector," was held on 6 November 2025. This FGD formed an integral part of the Nusantara Livestock & Poultry Expo series, which took place at the International Convention Exhibition (ICE) BSD City.



Forum Strategis Multi-Pihak

Tujuan utama dari FGD ini yaitu menjadi wadah untuk memfasilitasi pembahasan mendalam mengenai berbagai permasalahan perizinan dasar. Forum ini secara khusus mempertemukan para pelaku usaha di bidang sapi perah dan sapi pedaging dengan jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Keberhasilan sebuah investasi di lapangan tidak hanya bergantung pada regulasi di tingkat pusat. Oleh karena itu, FGD ini menghadirkan formasi pemangku kepentingan yang komprehensif. Hadir sebagai narasumber dan fasilitator adalah perwakilan dari kementerian-kementerian yang menangani perizinan dasar, di antaranya:

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK)

Selain itu, hadir pula perwakilan dari internal Kementerian Pertanian, yakni dari Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, serta perwakilan Eselon II lingkup Ditjen PKH. Yang tidak kalah penting, forum ini juga melibatkan secara aktif perwakilan dari pemerintah daerah yang menjadi lokasi utama investasi. Tercatat perwakilan dari Dinas Peternakan tingkat Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta jajaran pemerintah kabupaten dari Bogor, Tegal, Blitar, Malang, dan Cianjur turut hadir untuk memberikan perspektif lapangan dan mencari solusi bersama.

A Strategic Multi-Stakeholder Forum

The primary objective of this FGD was to serve as a platform for facilitating in-depth discussions on various issues related to basic licensing. The forum specifically brought together business actors in the dairy and beef cattle sectors with government representatives at both central and regional levels.

The success of an investment on the ground does not depend solely on regulations at the central level. For this reason, the FGD featured a comprehensive configuration of stakeholders. Serving as speakers and facilitators were representatives from ministries responsible for basic licensing, including:

- *Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning*
- *Ministry of Public Works and Public Housing*
- *Ministry of Environment and Forestry*

In addition, representatives from within the Ministry of Agriculture were also present, namely from the Directorate General of Agricultural Land and Irrigation, as well as Echelon II officials within the Directorate General of Livestock and Animal Health (Ditjen PKH). Equally important, the forum actively involved representatives from regional governments that serve as key investment locations. Participants included representatives from the Provincial Livestock Services of East Java and Central Java, as well as officials from the regency governments of Bogor, Tegal, Blitar, Malang, and Cianjur, who contributed on-the-ground perspectives and jointly sought practical solutions.



Mengidentifikasi Tantangan di Hulu Perizinan

Dalam diskusi yang berlangsung terbuka dan konstruktif, para pelaku usaha memaparkan berbagai kendala faktual yang mereka hadapi di lapangan. Paparan ini memberikan gambaran jelas mengenai tantangan-tantangan utama yang perlu segera diatasi untuk meluncurkan investasi. Beberapa isu yang mengemuka dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori besar:

1. Tantangan Kesesuaian Tata Ruang dan Status Lahan

Isu tata ruang ini menjadi salah satu hambatan yang perlu diurai. Beberapa investor menghadapi situasi di mana lahan yang telah disiapkan ternyata masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Status ini seringkali tidak memperbolehkan adanya kegiatan peternakan skala industri, meskipun peternakan adalah bagian integral dari pertanian. Selain itu, ada pula kasus di mana lahan yang potensial beririsan dengan status kawasan kehutanan, atau terbentur pada aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH). Bahkan, muncul persepsi di beberapa daerah yang mengklasifikasikan peternakan sebagai "non-pertanian", sehingga menyulitkan proses izin lingkungan dan KKPR.

2. Kompleksitas Perizinan Lingkungan dan Bangunan

Bagi usaha yang sudah berjalan (eksisting), tantangan datang dari pemenuhan izin-izin baru. Banyak bangunan operasional yang telah berdiri sebelum regulasi modern terbit, kini diharuskan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Proses ini menuntut adanya kajian teknis struktur bangunan oleh pengkaji bersertifikat, yang menjadi tantangan tersendiri.



Identifying Upstream Licensing Challenges

In an open and constructive discussion, business actors outlined various factual obstacles encountered in the field. These presentations provided a clear picture of the main challenges that must be addressed promptly to facilitate investment. The issues raised can be grouped into three major categories:

1. Spatial Planning Compatibility and Land Status Challenges

Spatial planning issues emerged as one of the key barriers requiring resolution. Several investors face situations where land that has already been prepared is classified as Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) or Sustainable Food Agricultural Areas (KP2B). This status often does not permit industrial-scale livestock activities, even though livestock farming is an integral part of agriculture. In addition, there are cases where potential land overlaps with forest area status or is constrained by Regional Spatial Planning (RTRW) regulations related to the Building Coverage Ratio (KDB) and Green Area Ratio (KDH). In some regions, there is even a perception that livestock farming is categorised as "non-agricultural," complicating environmental permitting and the issuance of KKPR.

2. Complexity of Environmental and Building Permits

For existing businesses, challenges arise from the requirement to comply with new permits. Many operational buildings constructed before the issuance of modern regulations are now required to obtain Building Approval (PBG) and a Certificate of Functional Feasibility (SLF). This process requires a technical structural assessment by certified assessors, which poses its own challenges.

Di sisi lingkungan, perusahaan diwajibkan mengurus persetujuan teknis (Pertek) dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen persetujuan lingkungan yang sudah ada. Bagi usaha yang terlanjur beroperasi sebelum melengkapi izin lingkungan, terdapat potensi sanksi administratif yang perlu dimediasi. Optimalisasi pengelolaan limbah, seperti pemanfaatan gas metan, juga menjadi sorotan yang memerlukan arahan teknis lebih lanjut.

2. Kompleksitas Perizinan Lingkungan dan Bangunan

Bagi usaha yang sudah berjalan (eksisting), tantangan datang dari pemenuhan izin-izin baru. Banyak bangunan operasional yang telah berdiri sebelum regulasi modern terbit, kini diharuskan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Proses ini menuntut adanya kajian teknis struktur bangunan oleh pengkaji bersertifikat, yang menjadi tantangan tersendiri.

3. Harmonisasi Regulasi dan Aspek Sosial

Kendala lain yang muncul adalah sinkronisasi regulasi. Ditemukan adanya sistem perizinan tersendiri di tingkat provinsi yang dirasa tumpang tindih dengan sistem Online Single Submission (OSS) dan Amdalnet di tingkat pusat. Perubahan regulasi, seperti peralihan kewenangan izin Penanaman Modal Asing (PMA) dari pusat ke provinsi, juga menuntut penyesuaian proses bagi pelaku usaha. Dari aspek sosial, beberapa calon investor menghadapi permintaan dari warga di sekitar lokasi farm, seperti permintaan kompensasi, pembangunan fasilitas umum, hingga penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial dan kesepakatan dengan masyarakat sekitar adalah kunci penting yang tidak bisa diabaikan.



On the environmental side, companies are required to obtain Technical Approvals (Pertek) and integrate them into existing environmental approval documents. For businesses that have already been operating without complete environmental permits, there is a potential risk of administrative sanctions that need to be mediated. The optimisation of waste management, such as the utilisation of methane gas, also emerged as a key issue requiring further technical guidance.

3. Regulatory Harmonisation and Social Aspects

Another challenge identified was regulatory synchronisation. Separate licensing systems were found at the provincial level that are perceived to overlap with the central Online Single Submission (OSS) system and Amdalnet. Regulatory changes, such as the transfer of authority for Foreign Direct Investment (FDI/PMA) licensing from the central government to the provinces, also require process adjustments by business actors. From a social perspective, some prospective investors face demands from communities surrounding farm locations, including requests for compensation, construction of public facilities, and local labour absorption. This highlights that a social approach and agreements with surrounding communities are critical elements that cannot be overlooked.



Langkah Maju: Rumusan Solusi dan Tindak Lanjut Terukur

FGD "Kupas Tuntas Perizinan" ini tidak hanya berhenti sebagai forum. Lebih dari itu, forum ini berhasil merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur untuk setiap permasalahan yang diangkat. Pemerintah menunjukkan komitmennya sebagai fasilitator dengan memberikan solusi langsung di tempat.

Berikut adalah rangkuman dari komitmen dan solusi yang disepakati selama FGD:

1. Percepatan Proses Tata Ruang dan Lahan

- Pemanfaatan OSS: Untuk isu tata ruang, Kementerian ATR/BPN mengarahkan agar pelaku usaha tetap memanfaatkan sistem OSS untuk pendaftaran lahan.
- Surat Rekomendasi: Bagi yang terkendala status LP2B, solusi yang diambil adalah melengkapi pengajuan KPPR di OSS dengan surat rekomendasi resmi dari Dinas Pertanian setempat. Surat ini menegaskan bahwa lahan tersebut memang diperbolehkan untuk usaha budidaya sapi dengan skala tertentu.
- Klarifikasi Status: Pelaku usaha yang lahannya teridentifikasi masuk kawasan KP2B atau bermasalah, akan secara proaktif bersurat resmi ke Ditjen Lahan dan Irigasi (LIP) Kementan untuk mendapatkan kejelasan dan rekomendasi status.
- Menunggu PSN: Khusus untuk lahan yang masih berstatus kawasan kehutanan, perusahaan akan menunggu kejelasan status melalui mekanisme Proyek Strategis Nasional (PSN) sebelum melanjutkan proses perizinan.

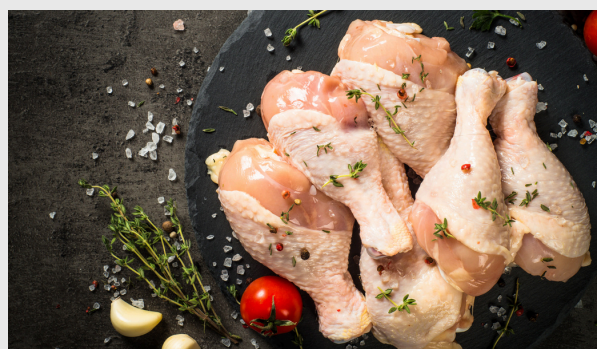
Moving Forward: Formulated Solutions and Measurable Follow-Up Actions

The "Comprehensive Review of Licensing" FGD did not stop at discussion alone. More importantly, the forum successfully formulated concrete and measurable follow-up actions for each issue raised. The government demonstrated its commitment as a facilitator by providing immediate, on-the-spot solutions.

The following is a summary of the commitments and solutions agreed upon during the FGD:

1. Acceleration of Spatial Planning and Land Processes

- *Utilisation of OSS: For spatial planning issues, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) advised business actors to continue using the OSS system for land registration.*
- *Recommendation Letters: For cases constrained by LP2B status, the proposed solution is to complement the KKPR application in OSS with an official recommendation letter from the local Agricultural Service. This letter confirms that the land is permitted for cattle farming at a specified scale.*
- *Status Clarification: Business actors whose land is identified as falling within KP2B areas or facing other issues will proactively submit official correspondence to the Directorate General of Agricultural Land and Irrigation (LIP) of the Ministry of Agriculture to obtain clarity and status recommendations.*
- *Awaiting National Strategic Project (PSN) Status: For land still designated as forest areas, companies will await clarification through the National Strategic Project (PSN) mechanism before proceeding with the licensing process.*



2. Fasilitasi Izin Lingkungan dan Bangunan (PBG/SLF)

- Integrasi Izin Lingkungan: Kementerian LH memberikan arahan teknis agar perusahaan segera mengintegrasikan Persetujuan Teknis (Pertek) yang telah terbit ke dalam dokumen persetujuan lingkungan yang sudah ada (existing). Kementerian LH juga akan membantu memastikan akun yang digunakan pada sistem Amdalnet sudah tepat.
- Pendampingan Izin Eksisting: Untuk bangunan eksisting yang belum memiliki PBG/SLF, Dinas PUPR di tingkat kabupaten berkomitmen untuk memfasilitasi percepatan prosesnya. Pelaku usaha didorong untuk segera menunjuk pengkaji teknis bersertifikat (PAPTI) agar kajian struktur bangunan dapat segera diselesaikan sebagai syarat di OSS.
- Koordinasi Limbah: Tindak lanjut terkait pengelolaan limbah akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan direktorat teknis di KLHK.

3. Penguatan Koordinasi dan Aspek Sosial

- Koordinasi Daerah-Pusat: Terkait adanya sistem perizinan tambahan di daerah, Kementerian LH dan DPMPTSP Kabupaten akan berkoordinasi langsung dengan DPMPTSP Provinsi untuk menyelaraskan regulasi agar tidak tumpang tindih dengan OSS.
- Pembentukan Tim Teknis: Guna memantau progres perizinan yang kompleks, disepakati pembentukan tim koordinasi teknis yang melibatkan perusahaan, konsultan, dan dinas terkait.
- Formalisasi Kesepakatan Sosial: Menjawab isu sosial, pelaku usaha akan menempuh jalur dialog formal. Mereka akan membuat nota kesepahaman (MoU) terkait kesepakatan atas permohonan warga, yang diketahui secara resmi oleh perangkat desa dan kecamatan setempat.



Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

2. Facilitation of Environmental and Building Permits (PBG/SLF)

- *Integration of Environmental Permits: The Ministry of Environment provided technical guidance for companies to promptly integrate issued Technical Approvals (Pertek) into existing environmental approval documents. The Ministry will also assist in ensuring that the correct accounts are used within the Amdalnet system.*
- *Assistance for Existing Buildings: For existing buildings without PBG/SLF, district-level Public Works Offices (PUPR) committed to facilitating an accelerated process. Business actors are encouraged to appoint certified technical assessors (PAPTI) so that structural assessments can be completed promptly as a requirement in OSS.*
- *Waste Management Coordination: Follow-up actions related to waste management will be further coordinated with the relevant technical directorates within the Ministry of Environment and Forestry.*

3. Strengthening Coordination and Social Aspects

- *Regional–Central Coordination: In relation to additional licensing systems at the regional level, the Ministry of Environment and district-level Investment and One-Stop Integrated Services Offices (DPMPTSP) will coordinate directly with provincial DPMPTSP to harmonise regulations and prevent overlap with OSS.*
- *Establishment of a Technical Team: To monitor progress on complex licensing processes, an agreement was reached to establish a technical coordination team involving companies, consultants, and relevant agencies.*
- *Formalisation of Social Agreements: To address social issues, business actors will pursue formal dialogue channels. They will prepare memoranda of understanding (MoUs) regarding agreements with local communities, officially acknowledged by village and sub-district authorities.*

Optimisme Baru Iklim Investasi

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, dalam laporannya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyampaikan bahwa seluruh permasalahan dan tindak lanjut ini akan terus dikawal. Penyelenggaraan FGD ini membuktikan bahwa pendekatan dialogis dan kolaboratif adalah kunci untuk mengurai sumbatan investasi. Dengan adanya fasilitasi langsung dari Ditjen PKH, para pelaku usaha mendapatkan kejelasan arah dan komitmen bantuan teknis dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Langkah konkret ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi di subsektor peternakan sapi perah dan sapi potong, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di sektor hilir peternakan.

Renewed Optimism for the Investment Climate

In his report to the Director General of Livestock and Animal Health, the Director of Downstream Livestock Products stated that all identified issues and follow-up actions will continue to be closely monitored. The organisation of this FGD demonstrates that a dialogic and collaborative approach is key to resolving investment bottlenecks. Through direct facilitation by Ditjen PKH, business actors have gained clarity of direction and concrete commitments for technical assistance from various ministries and regional governments. These tangible steps are expected to accelerate investment realisation in the dairy and beef cattle subsectors, ultimately contributing significantly to strengthening national food security, job creation, and economic growth in the downstream livestock sector.





Retrospektif Investasi Sapi (Sebuah Catatan Reflektif)

Cattle Investment Retrospective (A reflective note)



Lisa Dwi Lestari, S.Pt. M.Si
APHP Ahli Pertama



Rinie Gunawan, S.Pt., M.Si
Wastukan Ahli Muda

Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta jiwa (BPS 2024) menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Pertumbuhan populasi yang terus berlanjut menuntut adanya sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang berkelanjutan, merata, dan berkesinambungan. Meskipun kebutuhan pangan nasional terus berupaya dipenuhi, pangan yang berasal dari subsektor peternakan masih menjadi aspek yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Dua komoditas yang menunjukkan tantangan serius dalam neraca ketersediaan adalah susu dan daging sapi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mencatat bahwa produksi daging sapi nasional pada tahun 2024 sebesar 0,37 juta ton, masih di bawah kebutuhan yang mencapai 0,77 juta ton. Artinya, produksi daging sapi nasional hanya dapat memenuhi sekitar 48% kebutuhan nasional, sementara sisanya sekitar 52% masih bergantung pada impor. Demikian juga dengan komoditas susu, kebutuhan nasional pada tahun 2024 mencapai 4,7 juta ton namun produksi nasional hanya mencapai 1 juta ton atau sekitar 21%. Defisit sebesar 3,7 juta ton atau sekitar 79% kebutuhan susu nasional dipenuhi dari impor. Rendahnya produksi susu dan daging sapi tersebut berkaitan dengan keterbatasan populasi sapi, kapasitas peternakan, dan rendahnya produktivitas. Kondisi tersebut menegaskan perlunya strategi terpadu untuk penguatan peternakan sapi perah dan sapi potong.

Indonesia, with a population reaching 281.6 million people (BPS 2024), faces major challenges in ensuring sufficient food availability to meet the needs of its entire population. Continued population growth demands food production, distribution, and consumption systems that are sustainable, equitable, and resilient. Although national food needs are continually being addressed, food originating from the livestock subsector remains an area requiring particular attention and improvement.

Two commodities that present serious challenges in the supply balance are milk and beef. The Directorate General of Livestock and Animal Health (Ditjen PKH) records that national beef production in 2024 amounted to 0.37 million tonnes, still below national demand, which reached 0.77 million tonnes. This means that domestic beef production is able to meet only around 48% of national demand, while the remaining 52% still relies on imports. A similar situation applies to milk: national demand in 2024 reached 4.7 million tonnes, whereas domestic production amounted to only 1 million tonnes, or about 21%. The deficit of 3.7 million tonnes, or approximately 79% of national milk demand, is met through imports. The low production of milk and beef is closely linked to limitations in cattle population size, farming capacity, and low productivity. These conditions underscore the need for an integrated strategy to strengthen both dairy and beef cattle farming systems.



Ditjen PKH mengambil langkah strategis dalam mendorong penguatan peternakan sapi, yaitu melalui peningkatan investasi sapi baik yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Upaya ini dirancang sebagai bentuk kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan pihak swasta, dengan dukungan penuh dari para investor swasta (non APBN). Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tercipta ekosistem investasi yang berkelanjutan, mampu memperkuat kapasitas produksi sapi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Hingga akhir November 2025, realisasi investasi sapi di Indonesia telah mencapai 31.704 ekor, terdiri dari 12.072 ekor sapi perah dan 19.632 ekor sapi pedaging. Realisasi ini melibatkan 117 pelaku usaha, yang mendukung investasi, antara lain pelaku usaha peternakan sapi perah dan sapi potong terintegrasi, importir produk hewan, peternak lokal, dan koperasi. Sebagian besar investor menjalankan skema joint shipment untuk pemasukan sapi serta menjalin kerja sama pemeliharaan dengan koperasi dan peternak eksisting.

The Directorate General of Livestock and Animal Health (Ditjen PKH) has taken strategic steps to strengthen the cattle sector by promoting increased investment in cattle, sourced from both Domestic Investment (PMDN) and Foreign Direct Investment (PMA). This initiative is designed as a synergistic collaboration between the government and the private sector, with full support from private investors (non state budget/APBN). Through this approach, it is expected that a sustainable investment ecosystem will be created, capable of strengthening national cattle production capacity and reducing dependence on imports.

As of the end of November 2025, the realisation of cattle investment in Indonesia has reached 31,704 head, consisting of 12,072 dairy cattle and 19,632 beef cattle. This realisation involves 117 business actors supporting the investment, including integrated dairy and beef cattle enterprises, animal product importers, local farmers, and cooperatives. Most investors have implemented joint shipment schemes for cattle imports and established maintenance partnerships with existing cooperatives and farmers.

Dalam implementasinya, pelaku usaha yang berkomitmen melakukan investasi sapi sering kali menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan lahan yang clean dan clear, ketidakcocokan harga sewa lahan, ketidaksiapan infrastruktur dasar, hambatan pada proses perizinan, keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan, keterbatasan pasokan sapi dan tingginya harga sapi di negara asal, kendala transportasi dan logistik pengiriman sapi, kendala penyerapan hasil ternak di dalam negeri, hingga permasalahan sosial yang dihadapi pelaku usaha di wilayah peternakannya. Akibatnya, realisasi investasi sapi berjalan lambat dan hingga saat ini ketergantungan pada impor tetap tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa penguatan ekosistem investasi sapi bukan hanya soal menambah populasi ternak, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh melalui kebijakan yang jelas, dukungan infrastruktur, dan kolaborasi erat antara Kementerian/Lembaga terkait, BUMN, pihak swasta, serta peternak lokal.

Menghadapi berbagai kendala investasi sapi tersebut, dukungan dan langkah perbaikan dari berbagai stakeholder terkait tidak seharusnya hanya menjadi wacana. Kementerian/Lembaga bersama pihak BUMN dan swasta perlu membangun strategi yang lebih terpadu. Penyediaan lahan dengan biaya sewa yang terjangkau menjadi hal penting sebagai langkah awal investor dalam merencanakan dan menguji kelayakan pengembangan usaha peternakannya. Di sisi lain, percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, air, sistem transportasi dan distribusi akan menjamin kemudahan produksi dan menunjang keberlanjutan usaha.

In practice, business actors committed to cattle investment often face various challenges, including limited availability of land that is clean and clear, mismatches in land rental prices, inadequate basic infrastructure, obstacles in the licensing process, limited access to capital and financing, constrained supply of cattle and high prices in source countries, transportation and logistics challenges in cattle shipment, difficulties in absorbing livestock outputs in the domestic market, as well as social issues encountered by businesses in their farming areas. As a result, the realisation of cattle investment has progressed slowly, and dependence on imports remains high. This situation illustrates that strengthening the cattle investment ecosystem is not merely about increasing livestock population, but also about building a solid foundation through clear policies, infrastructure support, and close collaboration among relevant Ministries and Agencies, State Owned Enterprises, the private sector, and local farmers.

In addressing these various constraints, support and corrective actions from relevant stakeholders should not remain at the level of discourse. Ministries and Agencies, together with SOEs and the private sector, need to develop a more integrated strategy. The provision of land with affordable rental costs is a crucial initial step for investors in planning and assessing the feasibility of livestock business development. At the same time, accelerating the development of basic infrastructure such as road access, electricity, water, and transportation and distribution systems will ensure ease of production and support business sustainability.



Penyederhanaan regulasi perizinan telah dirancang untuk memudahkan dan menarik minat calon investor. Lebih dari itu, informasi masif yang tersampaikan dengan baik kepada investor diperlukan untuk meminimalisir hambatan perizinan yang dihadapi di lapangan. Stimulus untuk berinvestasi dapat juga diberikan dengan pemberian insentif fiskal kepada para investor yang telah berkontribusi untuk membangun peternakan Indonesia. Kolaborasi perusahaan peternakan yang terintegrasi dengan koperasi dan peternak lokal juga perlu diperkuat dalam naungan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan, sehingga investasi tidak hanya sekedar menambah populasi sapi, tetapi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi di tingkat akar rumput. Berbagai paket kebijakan seyogyanya dapat menumbuhkan gairah investor untuk terus mengembangkan usahanya di Indonesia sehingga upaya tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan hewani nasional.

Simplification of licensing regulations has been designed to facilitate and attract potential investors. Beyond this, the effective dissemination of comprehensive information to investors is necessary to minimise licensing obstacles encountered in the field. Investment stimulus may also be provided through fiscal incentives for investors who have contributed to the development of Indonesia's livestock sector. Collaboration between integrated livestock companies and cooperatives and local farmers should likewise be strengthened under mutually beneficial partnership schemes, so that investment does not merely increase cattle numbers but also enhances production capacity at the grassroots level. Various policy packages are expected to stimulate investor enthusiasm to continue expanding their businesses in Indonesia, thereby strengthening national animal based food security.



Selain persoalan lahan, infrastruktur, dan kelembagaan, aspek pembiayaan menjadi salah satu kendala yang sering menghambat rencana realisasi investasi. Banyak pelaku usaha, khususnya koperasi dan peternak skala mikro dan kecil, menghadapi keterbatasan akses pembiayaan baik dari lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Terkhusus, skema kredit perbankan masih dianggap belum dapat mengakomodir kebutuhan usaha peternakan sapi karena adanya persyaratan agunan yang seringkali belum dapat dipenuhi oleh peternak, *rate* yang cukup tinggi, serta tenor pembiayaan yang belum sesuai dengan siklus usaha ternak sapi. Akibatnya, sebagian besar pembiayaan investasi sapi masih bergantung pada perusahaan swasta besar atau investor asing yang memiliki kekuatan modal, sementara peternak mikro dan kecil masih kesulitan untuk berpartisipasi karena keterbatasan terhadap akses pembiayaan tersebut. Tanpa dukungan pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif, tentunya realisasi investasi ini cenderung berjalan lebih lambat.

Beyond issues of land, infrastructure, and institutions, financing is one of the key constraints that often hinders the realisation of investment plans. Many business actors, particularly cooperatives and micro and small scale farmers, face limited access to financing from both banking and non banking financial institutions. In particular, existing bank credit schemes are still considered unable to adequately accommodate the needs of cattle farming businesses due to collateral requirements that farmers are often unable to fulfil, relatively high interest rates, and financing tenors that do not align with the cattle production cycle. As a result, most cattle investment financing continues to rely on large private companies or foreign investors with strong capital capacity, while micro and small scale farmers remain constrained in their participation due to limited access to financing. Without more flexible and adaptive financing support, the realisation of this investment is likely to progress more slowly.

Kebijakan pembiayaan yang inklusif penting untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah dapat mendorong skema kredit khusus peternakan sapi dengan bunga rendah, memperluas akses pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro, serta mengembangkan pola kemitraan antara investor besar dan koperasi serta peternak mikro dan kecil. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, investasi sapi tidak hanya akan meningkatkan populasi ternak, tetapi juga membuka peluang bagi peternak mikro dan kecil untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas usahanya.

Inclusive financing policies are essential to address these challenges. The government can promote dedicated low interest credit schemes for cattle farming, expand access to financing through microfinance institutions, and develop partnership models between large investors and cooperatives as well as micro and small scale farmers. With appropriate financing support, cattle investment will not only increase livestock populations but also create opportunities for micro and small scale farmers to enhance their capabilities and productivity.



Investasi sapi bukan hanya bertujuan untuk menambah populasi ternak. Lebih dari itu, investasi sapi menjadi sebuah upaya masif untuk membangun ketahanan pangan hewani nasional. Realisasi yang masih terbatas akibat kendala keterbatasan lahan, infrastruktur, perizinan, kelembagaan, hingga akses pembiayaan, menjadi gambaran bahwa upaya ini sungguh tidak mudah untuk dilaksanakan. Namun, di balik tantangan tersebut tersimpan peluang besar untuk mendorong keberhasilan investasi sapi, yaitu dengan memperkuat kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, dan peternak mikro dan kecil.

Demikian, catatan reflektif ini bukan untuk menilai ketidaksempurnaan dari upaya yang dilakukan, melainkan sebagai catatan untuk perbaikan yang diharapkan dapat berdampak positif bagi kemajuan subsektor peternakan Indonesia.

Cattle investment is not solely aimed at increasing livestock numbers. More broadly, it represents a large scale effort to build national animal based food security. The still limited realisation due to constraints related to land availability, infrastructure, licensing, institutional capacity, and access to financing illustrates that this endeavour is far from easy to implement. Nevertheless, behind these challenges lies significant potential to drive the success of cattle investment by strengthening collaboration among Ministries and Agencies, State Owned Enterprises, the private sector, and micro and small scale farmers.

Accordingly, this reflective note is not intended to judge the imperfections of the efforts undertaken, but rather to serve as a basis for improvement that is expected to have a positive impact on the advancement of Indonesia's livestock subsector.

Kapal Ternak Kian Eksis: Inovasi Transportasi yang Menjaga Bobot, Harga, dan Harapan

Livestock Vessels Gaining Ground: A Transportation Innovation that Preserves Weight, Prices, and Hope



Abdul Dade Laulatit, S. Pt
APHP Ahli Pertama



Sejak mulai beroperasi pada Desember 2015, kapal ternak menjelma sebagai salah satu terobosan penting pemerintah dalam memperkuat sistem logistik nasional, khususnya di sektor peternakan. Sebagai wujud konkret pelaksanaan program Tol Laut, kapal ternak tidak hanya menghubungkan wilayah produsen dan konsumen, tetapi juga menandai lahirnya pola baru distribusi ternak hidup yang lebih efisien, berkeadilan, serta berlandaskan prinsip kesejahteraan hewan.

Since commencing operations in December 2015, livestock vessels have emerged as one of the government's key breakthroughs in strengthening the national logistics system, particularly in the livestock sector. As a concrete implementation of the Sea Toll (Tol Laut) programme, livestock vessels not only connect producer and consumer regions but also mark the emergence of a new model for the distribution of live animals that is more efficient, equitable, and grounded in animal welfare principles.

Layanan kapal ternak diawali dengan satu unit armada yang melayani rute Tenau, Nusa Tenggara Timur (NTT)–Tanjung Priok, Jakarta. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pasokan daging sapi yang stabil serta upaya pemerintah menekan disparitas harga antardaerah, armada ini terus berkembang. Pada 2018, jumlah kapal ternak bertambah menjadi enam unit yang melayani enam trayek strategis di berbagai sentra produksi. Kehadiran armada tersebut semakin menegaskan peran negara sebagai fasilitator distribusi pangan strategis, sekaligus memastikan layanan transportasi ternak dapat diakses secara terbuka dan tidak dimonopoli oleh pihak tertentu.

The livestock vessel service began with a single vessel serving the Tenau, East Nusa Tenggara (NTT)–Tanjung Priok, Jakarta route. As public demand for a stable beef supply increased and the government sought to reduce interregional price disparities, the fleet continued to expand. By 2018, the number of livestock vessels had grown to six units serving six strategic routes across major production centres. The presence of this fleet further reinforces the state's role as a facilitator of strategic food distribution, while ensuring that livestock transportation services are accessible in an open manner and not monopolised by any particular party.



Keunggulan kapal ternak tidak hanya tercermin dari bertambahnya armada dan perluasan trayek, tetapi juga dari efisiensi pengangkutan yang dihasilkan. Hasil kajian Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa penggunaan kapal ternak mampu menekan penyusutan bobot ternak hingga rata-rata sekitar 6,27 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pengangkutan menggunakan kapal kargo konvensional yang dapat menyebabkan penyusutan bobot mencapai 22–30 persen. Efisiensi tersebut berdampak langsung pada kualitas ternak saat tiba di daerah tujuan, stabilitas harga daging di pasar, serta peningkatan pendapatan peternak.

Penerapan prinsip kesejahteraan hewan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan kapal ternak. Berbagai fasilitas pendukung, seperti lantai kandang beralas karet, sistem ventilasi yang memadai, tempat pakan dan minum sesuai standar, serta pendampingan paramedis hewan selama pelayaran, memastikan ternak tetap sehat dan aman sepanjang perjalanan. Di sisi lain, dukungan subsidi pemerintah turut menekan biaya pengiriman ternak, sehingga manfaat kapal ternak tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga peternak rakyat.

The advantages of livestock vessels are reflected not only in the expansion of the fleet and routes, but also in the efficiency gains achieved in animal transport. Studies by the Ministry of Agriculture show that the use of livestock vessels can reduce live weight loss to an average of around 6.27 percent. This figure is significantly lower than transportation using conventional cargo vessels, which can result in weight losses of 22–30 percent. These efficiency gains have a direct impact on livestock quality upon arrival at destination areas, the stability of meat prices in the market, and increased income for farmers.

The application of animal welfare principles is one of the key factors behind the success of livestock vessels. Supporting facilities such as rubber coated pen flooring, adequate ventilation systems, standardised feeding and watering facilities, and the presence of animal paramedics during voyages ensure that livestock remain healthy and safe throughout the journey. At the same time, government subsidies help to reduce transportation costs, meaning that the benefits of livestock vessels are felt not only by large scale businesses but also by smallholder farmers.

Fondasi ilmiah keberadaan kapal ternak juga diperkuat melalui kajian akademik. Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Ir. Tri Melasari, S.Pt., M.Si., IPM, yang baru menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Gadjah Mada, meneliti secara mendalam efektivitas kapal ternak dalam disertasinya berjudul “Efektivitas Keberadaan Kapal Ternak Camara Nusantara dan Penerapan Prinsip Kesejahteraan Ternak dalam Distribusi Sapi di Indonesia.” Penelitian tersebut menegaskan peran strategis kapal ternak dalam memperkuat sistem logistik daging nasional.

Dalam keterangannya kepada majalah ini, Tri Melasari menegaskan bahwa kapal ternak tidak sekadar menyentuh aspek teknis distribusi, melainkan menjadi bagian integral dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. “Kapal ternak merupakan instrumen strategis. Bukan hanya memindahkan ternak antarpulau, tetapi memastikan ternak tiba di tujuan dalam kondisi sehat, bobot terjaga, dan minim stres. Inilah pembeda utama kapal ternak dibandingkan moda transportasi konvensional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengembangan trayek kapal ternak mengacu pada prinsip *ship follows the trade*, yakni rute ditetapkan mengikuti pola perdagangan ternak nasional. Dengan pendekatan tersebut, kapal ternak beroperasi pada jalur-jalur yang memiliki permintaan nyata, sekaligus berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Lebih jauh, keberadaan kapal ternak memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan. Ternak yang tiba dengan bobot lebih terjaga mampu menekan potensi kerugian peternak, sementara konsumen memperoleh manfaat berupa harga daging yang lebih stabil berkat rantai pasok yang semakin efisien. Di wilayah pengirim, aktivitas ekonomi masyarakat turut meningkat dan posisi peternak semakin menguat sebagai pelaku usaha yang berdaya saing.

The scientific foundation for the existence of livestock vessels is further strengthened through academic research. The Director of Feed at the Directorate General of Livestock and Animal Health, Dr Ir Tri Melasari, S.Pt., M.Si., IPM, who recently completed her doctoral studies at Gadjah Mada University, examined the effectiveness of livestock vessels in depth in her dissertation entitled “The Effectiveness of the Camara Nusantara Livestock Vessel and the Application of Animal Welfare Principles in Cattle Distribution in Indonesia.” Her research confirms the strategic role of livestock vessels in strengthening the national meat logistics system.

In her statement to this magazine, Tri Melasari emphasised that livestock vessels go beyond technical aspects of distribution and form an integral part of efforts to maintain national food stability. “Livestock vessels are a strategic instrument. They do not merely transport animals between islands, but ensure that livestock arrive at their destinations in a healthy condition, with maintained body weight and minimal stress. This is the key distinction between livestock vessels and conventional modes of transport,” she explained.

She added that the development of livestock vessel routes follows the principle of ship follows the trade, whereby routes are determined based on national livestock trading patterns. Through this approach, livestock vessels operate along routes with real demand, while also having the potential to stimulate regional economic growth.

More broadly, the presence of livestock vessels generates significant socio economic impacts. Livestock arriving with better maintained body weight help reduce potential losses for farmers, while consumers benefit from more stable meat prices due to a more efficient supply chain. In sending regions, local economic activity increases and the position of farmers is strengthened as competitive business actors.



Di tengah tantangan nasional dalam meningkatkan produksi sapi potong dan sapi perah, optimalisasi peran kapal ternak menjadi semakin relevan. Pemerintah terus mendorong penguatan produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap impor secara bertahap. Dalam konteks tersebut, kapal ternak berfungsi sebagai jembatan logistik strategis yang menjamin distribusi ternak berlangsung lebih cepat, aman, dan terstandar.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian. Tri Melasari menekankan pentingnya kesiapan daerah penerima, mengingat selama ini fokus pengembangan lebih banyak diarahkan pada daerah pengirim. “Tanpa dukungan fasilitas pelabuhan, sistem penyangga pasokan, dan pemasaran di daerah penerima, optimalisasi kapal ternak tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya. Menurutnya, keberhasilan kapal ternak sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Seiring meningkatnya volume muatan dari tahun ke tahun, layanan kapal ternak menunjukkan tren positif yang mencerminkan kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap moda transportasi ini. Meski data rinci muatan akan terus diperbarui, perkembangan selama hampir satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah ternak yang diangkut maupun frekuensi pelayaran.

Amid national challenges in increasing beef and dairy cattle production, optimising the role of livestock vessels is becoming increasingly relevant. The government continues to promote stronger domestic production in order to gradually reduce dependence on imports. In this context, livestock vessels serve as a strategic logistics bridge that ensures livestock distribution is faster, safer, and more standardised.

Nevertheless, several challenges still require attention. Tri Melasari highlighted the importance of preparedness in receiving regions, noting that development efforts to date have been more focused on sending regions. “Without supporting port facilities, supply buffer systems, and marketing infrastructure in receiving areas, the optimisation of livestock vessels will not be fully realised,” she stated. According to her, the success of livestock vessels depends heavily on cross sector collaboration involving central and local governments, business actors, and the wider community.

As cargo volumes continue to increase year by year, livestock vessel services demonstrate a positive trend that reflects growing public and business confidence in this mode of transport. While detailed cargo data will continue to be updated, developments over nearly a decade indicate a significant increase in both the number of animals transported and the frequency of voyages.

Pada akhirnya, kapal ternak menjadi bukti bahwa transformasi logistik tidak hanya soal membangun armada, tetapi juga membangun harapan. Harapan akan sistem pangan yang lebih efisien, pemerataan akses terhadap daging berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan peternak rakyat. Dengan berbagai capaian dan tantangan yang ada, satu hal menjadi jelas: kapal ternak kian eksis, kian relevan, dan kian strategis sebagai bagian dari masa depan logistik peternakan Indonesia merupakan sebuah inovasi yang tidak hanya menjaga bobot dan harga, tetapi juga menjaga harapan jutaan keluarga peternak di seluruh nusantara.

Ultimately, livestock vessels stand as proof that logistics transformation is not merely about building fleets, but about building hope. Hope for a more efficient food system, more equitable access to quality meat, and improved welfare for smallholder farmers. With the achievements and challenges that exist, one thing is clear: livestock vessels are increasingly established, increasingly relevant, and increasingly strategic as part of the future of Indonesia's livestock logistics is an innovation that not only preserves weight and prices, but also safeguards the hopes of millions of farming families across the archipelago.



Dari Kandang ke Lahan: Transformasi Cerdas Pupuk Organik Bersertifikat

*From Barn to Field: The Smart Transformation of
Certified Organic Fertiliser*



Rangga Wirawan G, S.Pt
PMHP Ahli Pertama



Hermawan Sutanto, S.TP
PMHP Ahli Muda

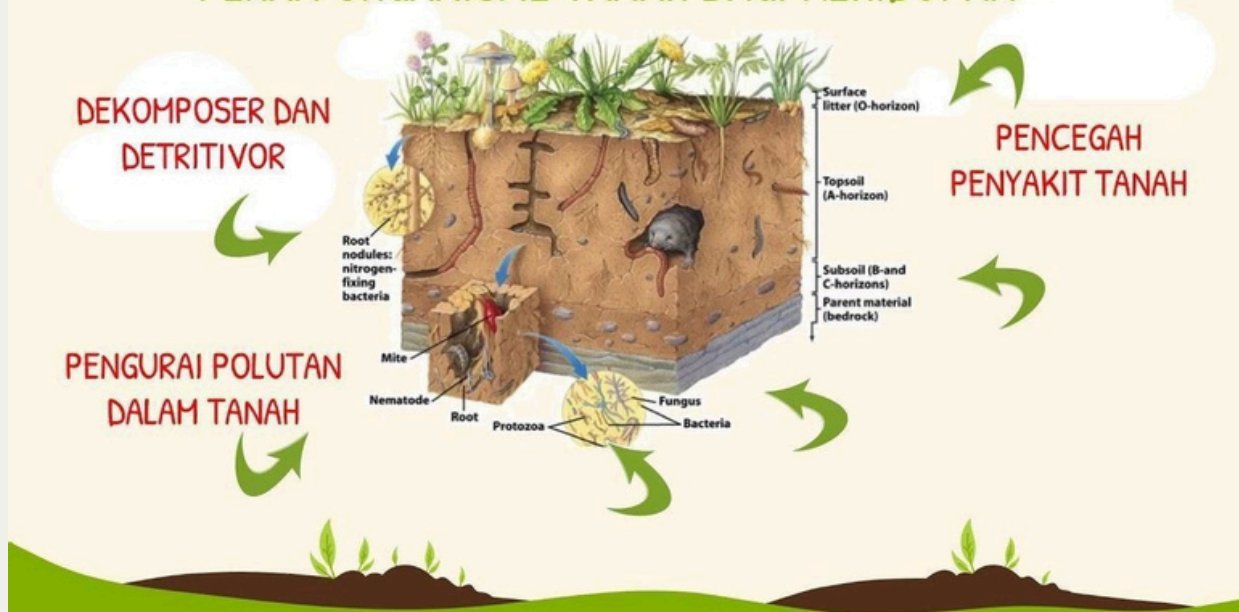
Ketika Limbah Menjadi Nilai Tambah
Di tengah meningkatnya kebutuhan akan pertanian yang ramah lingkungan, pupuk organik kembali menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan.

Penggunaan pupuk kimia secara terus menerus telah membuat banyak lahan pertanian kehilangan kesuburannya, sementara perubahan iklim menuntut sistem produksi pangan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Dalam situasi ini, pupuk organik hadir sebagai solusi yang semakin relevan bagi masa depan pertanian Indonesia.

When Waste Becomes Added Value

Amid the growing demand for environmentally friendly agriculture, organic fertilisers have once again come into the spotlight—and for good reason. The continuous use of chemical fertilisers has caused many agricultural lands to lose their fertility, while climate change increasingly demands food production systems that are more adaptive and sustainable. In this context, organic fertilisers are emerging as an increasingly relevant solution for the future of Indonesian agriculture.

PERAN ORGANISME TANAH BAGI KEHIDUPAN



Menariknya, salah satu sumber utama pupuk organik justru berasal dari sektor peternakan. Limbah ternak yang selama ini kerap dipandang sebagai masalah lingkungan ternyata menyimpan potensi besar. Baik limbah padat maupun cair dapat diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman. Jika dikelola dengan baik, limbah ini tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga berubah menjadi produk bernilai tambah yang membuka peluang ekonomi baru bagi peternak dan kelompok usaha di pedesaan.

Agar pupuk organik benar benar berkualitas dan dapat dipercaya, sertifikasi menjadi langkah penting. Melalui sertifikasi, pupuk organik tidak lagi sekadar mengandalkan klaim, tetapi dipastikan aman, ramah lingkungan, dan diproduksi sesuai standar. Prosesnya pun tidak sederhana. Mulai dari bahan baku, cara produksi, hingga hasil akhirnya diperiksa melalui audit dan uji laboratorium. Standar yang digunakan mengacu pada SNI 6729 tentang Sistem Pertanian Organik, dengan pelaksanaan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional.

Interestingly, one of the main sources of organic fertiliser comes from the livestock sector. Livestock waste, long regarded as an environmental problem, actually holds significant potential. Both solid and liquid waste can be processed into organic fertilisers that are beneficial for soil and crops. When managed properly, this waste not only reduces pollution but also transforms into a value added product that creates new economic opportunities for farmers and rural business groups.

To ensure that organic fertilisers are truly of high quality and trustworthy, certification is a crucial step. Through certification, organic fertilisers no longer rely solely on claims, but are verified to be safe, environmentally friendly, and produced in accordance with established standards. The process itself is far from simple. Raw materials, production methods, and final products are all examined through audits and laboratory testing. The standards applied refer to SNI 6729 on Organic Agriculture Systems, with certification carried out by Organic Certification Bodies accredited by the National Accreditation Committee.



Di sinilah peran pemerintah menjadi krusial. Melalui Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan, pendampingan dilakukan secara intensif kepada peternak, kelompok produsen, UMKM, hingga Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pendampingan ini bertujuan membantu pelaku usaha memahami standar, memperbaiki proses produksi, menata pencatatan, serta membangun sistem mutu yang konsisten. Dengan pendekatan berlapis, penerapan standar organik dapat berjalan lebih rapi dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Bagi pelaku usaha, sertifikasi bukan hanya soal legalitas, tetapi juga proses belajar. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, mereka mulai memahami pentingnya produksi yang tertib, higienis, dan efisien. Kualitas produk menjadi lebih terjaga, kepercayaan pasar meningkat, dan peluang pemasaran pun semakin terbuka. Sementara bagi petani sebagai pengguna, pupuk organik bersertifikat memberikan rasa aman sekaligus kepastian bahwa pupuk yang digunakan benar benar mendukung kesehatan tanah dalam jangka panjang.

Pupuk organik sering disebut sebagai “makanan sehat” bagi tanah. Kandungan bahan alaminya membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan hara, dan menghidupkan kembali mikroorganisme yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Tanah yang sehat menghasilkan tanaman yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Dalam jangka panjang, penggunaan pupuk organik juga membantu petani mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis yang dapat merusak tanah dan meningkatkan biaya produksi.

Lebih dari itu, pemanfaatan pupuk organik mendorong terbentuknya siklus pertanian yang lebih ramah lingkungan. Limbah dari peternakan dan pertanian tidak lagi berakhir sebagai masalah, tetapi diolah kembali menjadi sumber daya bernilai. Inilah contoh nyata ekonomi sirkular, di mana lingkungan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi.

This is where the role of government becomes critical. Through the Directorate of Downstream Livestock Products, intensive assistance is provided to farmers, producer groups, MSMEs, and Technical Implementation Units within the Directorate General of Livestock and Animal Health. This support aims to help business actors understand the standards, improve production processes, organise documentation, and build consistent quality management systems. With this multi layered approach, the application of organic standards can be implemented in a more orderly and integrated manner from upstream to downstream.

For business actors, certification is not merely a matter of legality, but also a learning process. Through continuous assistance, they begin to understand the importance of orderly, hygienic, and efficient production. Product quality becomes more consistent, market trust increases, and marketing opportunities expand. Meanwhile, for farmers as end users, certified organic fertilisers provide a sense of security and assurance that the fertiliser applied truly supports long term soil health.

Organic fertilisers are often described as “healthy food” for the soil. Their natural components help improve soil structure, increase nutrient content, and revive microorganisms that play a crucial role in plant growth. Healthy soil produces stronger crops that are more resilient to climate variability. In the long term, the use of organic fertilisers also helps farmers reduce dependence on synthetic chemical fertilisers, which can degrade soil quality and increase production costs.

Beyond this, the use of organic fertilisers encourages the development of a more environmentally friendly agricultural cycle. Waste from livestock and agriculture no longer ends as a problem, but is recycled into valuable resources. This is a tangible example of a circular economy, where environmental sustainability is maintained while communities gain economic benefits.

Sebagai penanda mutu dan legalitas, produsen pupuk organik yang telah tersertifikasi berhak mencantumkan logo organik pada kemasan produknya. Logo ini bukan sekadar simbol, melainkan jaminan bahwa produk tersebut telah melalui proses penilaian yang kredibel dan dapat dipercaya.

Dari kandang menuju lahan, dari limbah menjadi nilai tambah, lahirlah sebuah transformasi. Transformasi yang menghubungkan peternak, kelompok usaha, pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis, hingga lembaga sertifikasi dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Melalui pupuk organik bersertifikat, pertanian Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Merekam Jejak Sertifikasi: Siapa Saja yang Sudah Naik Kelas?

Dalam periode 2019–2023, transformasi pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk organik bersertifikat mulai menunjukkan hasil nyata. Sebanyak enam belas kelompok tani dan kelompok ternak dari berbagai wilayah Indonesia berhasil memperoleh sertifikasi pupuk organik. Capaian ini menjadi bukti bahwa peternak lokal mampu naik kelas, bergerak dari pengelolaan limbah sederhana menuju produksi pupuk organik yang berorientasi mutu dan berstandar nasional. Sebagian besar kelompok memanfaatkan limbah sapi, kerbau, kambing, dan unggas sebagai bahan baku utama, sumber daya yang tersedia luas di tingkat peternak.

Keberhasilan tersebut tersebar di berbagai kawasan, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara. Sebaran ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pupuk organik bukan fenomena yang terpusat, melainkan telah tumbuh sebagai gerakan nasional dari akar rumput. Setiap kelompok yang berhasil memperoleh sertifikasi menjadi contoh nyata bahwa limbah ternak dapat menjadi bagian penting dari rantai hilirisasi hasil peternakan yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.

As a mark of quality and legality, certified organic fertiliser producers are entitled to display the organic logo on their product packaging. This logo is not merely a symbol, but a guarantee that the product has undergone a credible and trustworthy assessment process.

From barn to field, from waste to added value, a transformation takes shape. A transformation that connects farmers, business groups, local governments, Technical Implementation Units, and certification bodies within a mutually reinforcing ecosystem. Through certified organic fertilisers, Indonesian agriculture moves toward a greener, healthier, and more sustainable future.

Recording the Certification Journey: Who Has Levelled Up?

uring the 2019–2023 period, the transformation of livestock waste management into certified organic fertiliser began to show tangible results. A total of sixteen farmer groups and livestock groups from various regions across Indonesia successfully obtained organic fertiliser certification. This achievement serves as clear evidence that local farmers are able to move up a level, transitioning from simple waste handling practices to the production of quality oriented organic fertilisers that meet national standards. Most of these groups utilise waste from cattle, buffaloes, goats, and poultry as their main raw materials—resources that are widely available at the farm level.

These successes are geographically dispersed, spanning Sumatra, Java, Bali, Kalimantan, and Nusa Tenggara. This distribution indicates that improvements in organic fertiliser quality are not confined to a single region, but have grown into a grassroots based national movement. Each certified group stands as a concrete example of how livestock waste can become an integral part of the downstream value chain in the livestock sector, generating added economic value for local communities.

Seiring dengan itu, pelaku usaha binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam implementasi sertifikasi organik. Kapasitas produksi pupuk organik meningkat dari tahun ke tahun, dengan total produksi mencapai sekitar 13.857 (tiga belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) ton pupuk organik padat per tahun, lebih dari 217.000 (dua ratus tujuh belas ribu) liter pupuk organik cair, serta produksi dekomposer berupa serum bakteri asam laktat. Angka ini mencerminkan bahwa sertifikasi tidak menghambat produksi, justru mendorong pelaku usaha untuk memproduksi secara lebih tertib dan berkelanjutan.

Produksi tersebut dihasilkan oleh kelompok tani, koperasi, serta Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di berbagai daerah. Di Sumatra, kelompok dan UPT di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, hingga Sumatra Selatan berkontribusi signifikan terhadap produksi pupuk organik padat dan cair. Di Pulau Jawa, kelompok tani dan balai teknis di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta menunjukkan kapasitas produksi yang konsisten, termasuk beberapa lokasi dengan produksi ribuan ton per tahun. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga menjadi contoh keberhasilan pemanfaatan limbah ternak lokal menjadi pupuk organik bernilai, sementara Kalimantan dan Sulawesi memperlihatkan potensi besar melalui pengembangan kelompok tani dan koperasi yang terus bertumbuh.

Memasuki 2024, pendampingan tidak lagi hanya difokuskan pada kelompok tani dan kelompok ternak, tetapi diperluas ke Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sepuluh balai yang memiliki fungsi perbibitan dan produksi ternak mendapatkan pendampingan untuk memperkuat standarisasi proses produksi, meningkatkan sistem pencatatan mutu, serta menerapkan prinsip organik secara konsisten. Diharapkan UPT dapat berperan sebagai mitra strategis sekaligus contoh penerapan standar bagi kelompok dan pelaku usaha di daerah sekitarnya.

At the same time, business actors fostered by the Directorate General of Livestock and Animal Health have continued to demonstrate significant progress in implementing organic certification. Organic fertiliser production capacity has increased year by year, reaching a total annual output of approximately 13,857 (thirteen thousand eight hundred and fifty seven) tonnes of solid organic fertiliser, more than 217,000 (two hundred and seventeen thousand) litres of liquid organic fertiliser, as well as the production of decomposers in the form of lactic acid bacteria serum. These figures reflect that certification does not hinder production; on the contrary, it encourages business actors to produce in a more orderly and sustainable manner.

This production is generated by farmer groups, cooperatives, and Technical Implementation Units distributed across various regions. In Sumatra, groups and UPTs in Aceh, North Sumatra, West Sumatra, Jambi, Bengkulu, Riau, and South Sumatra contribute significantly to solid and liquid organic fertiliser production. On the island of Java, farmer groups and technical centres in West Java, Central Java, East Java, and the Special Capital Region of Jakarta demonstrate consistent production capacity, including several locations producing thousands of tonnes per year. Bali and Nusa Tenggara also serve as examples of successful utilisation of local livestock waste into valuable organic fertilisers, while Kalimantan and Sulawesi show considerable potential through the continued development of farmer groups and cooperatives.

Entering 2024, assistance efforts have no longer been focused solely on farmer and livestock groups, but have been expanded to include Technical Implementation Units under the Directorate General of Livestock and Animal Health. Ten centres with breeding and livestock production functions have received support to strengthen production standardisation, improve quality record keeping systems, and consistently apply organic principles. These UPTs are expected to serve as strategic partners as well as demonstration models for standard implementation for groups and business actors in surrounding regions.

Upaya kolektif antara peternak, kelompok tani, koperasi, pemerintah daerah, UPT, dan lembaga sertifikasi inilah yang membentuk fondasi kuat bagi pengembangan pupuk organik nasional. Transformasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah ternak bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga jalan menuju kemandirian, peningkatan ekonomi lokal, dan penguatan kualitas produk peternakan Indonesia. Dari kandang menuju lahan, dari limbah menjadi nilai tambah, pupuk organik bersertifikat kini tumbuh sebagai bagian nyata dari masa depan pertanian yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Tahapan Pendampingan: Dari Limbah Menjadi Produk Bersertifikat

Transformasi limbah ternak menjadi pupuk organik bersertifikat melalui serangkaian tahapan pendampingan yang terstruktur. Proses dimulai dari identifikasi lapangan untuk menilai kesiapan kelompok. Aspek yang dinilai meliputi ketersediaan bahan baku, kondisi sarana produksi, serta sistem pencatatan dan dokumentasi.

Setelah itu, kelompok dibimbing untuk memperbaiki sistem produksi. Pendampingan meliputi penguatan standar sanitasi dan higiene, penerapan metode fermentasi dan pengomposan yang terukur, pemilahan bahan baku yang cermat, serta penyusunan kemasan dan label yang informatif. Peningkatan keterlacakan dan dokumentasi juga dilakukan agar seluruh proses mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Pada tahap berikutnya, kelompok diarahkan untuk memenuhi standar organik yang berlaku. Penyesuaian dilakukan terhadap ketentuan nasional seperti SNI tentang sistem pertanian organik, standar khusus pupuk organik, serta SOP operasional sesuai kondisi masing masing daerah. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, kelompok mengikuti audit sertifikasi yang terdiri dari audit dokumen dan verifikasi lapangan.

Setelah memperoleh sertifikat, kelompok tetap menjalani surveillance tahunan untuk memastikan konsistensi mutu dan memastikan seluruh praktik produksi tetap sejalan dengan standar.

The collective efforts of farmers, farmer groups, cooperatives, local governments, UPTs, and certification bodies have formed a strong foundation for the development of the national organic fertiliser sector. This transformation demonstrates that livestock waste management is not merely an environmental solution, but also a pathway towards self reliance, enhanced local economic growth, and improved quality within Indonesia's livestock products. From barn to field, from waste to added value, certified organic fertiliser has now emerged as a tangible part of the future of greener and more sustainable agriculture.

Stages of Assistance: From Waste to a Certified Product

The transformation of livestock waste into certified organic fertiliser takes place through a series of structured assistance stages. The process begins with field identification to assess the readiness of each group. Key aspects evaluated include the availability of raw materials, the condition of production facilities, and the existing systems for record keeping and documentation.

Following this, groups are guided to improve their production systems. Assistance focuses on strengthening sanitation and hygiene standards, applying measured fermentation and composting methods, carefully sorting raw materials, and developing informative packaging and labelling. Enhancements to traceability and documentation are also implemented to ensure that all processes can be properly monitored and accounted for.

In the next stage, groups are directed to comply with applicable organic standards. Adjustments are made to meet national requirements such as the Indonesian National Standard (SNI) for organic agriculture systems, specific standards for organic fertilisers, and operational SOPs tailored to local conditions. Once all requirements have been met, groups undergo certification audits consisting of document reviews and on site verification.

After certification is granted, groups remain subject to annual surveillance to ensure consistency in quality and continued compliance with standards.

Pendekatan bertahap inilah yang memungkinkan kelompok tani dan ternak tidak hanya menghasilkan pupuk organik bersertifikat, tetapi juga membangun sistem mutu yang kuat dan berkelanjutan.

Dampak Implementasi Sertifikasi Organik Pupuk

Sertifikasi organik memberikan dampak nyata bagi kelompok produsen dan sektor peternakan secara luas. Pada tataran produksi, sertifikasi mendorong penerapan standar mutu yang lebih bersih, konsisten, dan terdokumentasi. Proses fermentasi, pengomposan, penanganan bahan baku, serta pengemasan menjadi lebih terukur sehingga mutu produk lebih stabil dan mudah dipercaya pasar.

Dari sisi ekonomi, sertifikasi membuka peluang baru. Produk organik memiliki daya tarik lebih tinggi dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, memberikan peningkatan pendapatan bagi kelompok. Limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai kini menjadi komoditas produktif.

Dampak positif lainnya terlihat pada pengelolaan lingkungan. Limbah ternak yang sebelumnya berpotensi mencemari kini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari ekonomi sirkular melalui optimalisasi pengolahan menjadi pupuk organik. Transformasi ini memperkuat hilirisasi hasil peternakan dan selaras dengan agenda nasional terkait pembangunan berkelanjutan, pengurangan limbah, serta peningkatan daya saing komoditas bernilai tambah.

Pendekatan terpadu melalui kolaborasi antara kelompok masyarakat, pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, dan UPT membuktikan bahwa pengembangan pupuk organik adalah upaya bersama yang saling melengkapi.

This phased approach enables farmer and livestock groups not only to produce certified organic fertiliser, but also to establish robust and sustainable quality management systems.

Impacts of Implementing Organic Fertiliser Certification

Organic fertiliser certification delivers tangible benefits for producer groups and the livestock sector at large. At the production level, certification encourages the application of cleaner, more consistent, and well documented quality standards. Fermentation, composting, raw material handling, and packaging processes become more controlled, resulting in more stable product quality that is easier for the market to trust.

From an economic perspective, certification opens up new opportunities. Organic products have greater market appeal and can access broader markets, leading to increased income for producer groups. Materials that were previously considered waste are transformed into productive commodities.

Additional positive impacts are evident in environmental management. Livestock waste that once posed pollution risks can now be utilised as part of a circular economy through optimised processing into organic fertiliser. This transformation strengthens downstream development in the livestock sector and aligns with national agendas on sustainable development, waste reduction, and enhancing the competitiveness of value added commodities.

An integrated approach through collaboration among community groups, local governments, certification bodies, and Technical Implementation Units demonstrates that organic fertiliser development is a collective effort with complementary roles.

Ke depan, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan berkomitmen memperluas pendampingan, memperkuat regulasi teknis, dan mempercepat sertifikasi di lebih banyak wilayah. Dengan demikian, pupuk organik Indonesia diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan berkontribusi besar dalam pembangunan pertanian dan peternakan nasional.

Looking ahead, the Directorate of Downstream Livestock Products is committed to expanding assistance, strengthening technical regulations, and accelerating certification across more regions. In doing so, Indonesian organic fertilisers are expected to become increasingly competitive, credible, and to contribute significantly to the development of national agriculture and livestock sectors.



Dari Kandang Ke Kelas Dunia: Hilirisasi Peternakan sebagai Mesin Nilai dan Daya Saing Bangsa

From Farm to the Global Stage: Livestock Downstreaming as a Value Engine and Driver of National Competitiveness



Eka Ayu Wulandari, S.Tr.Pt

Peternakan Indonesia sedang memasuki fase transformasi penting. Tidak lagi berhenti pada produksi bahan mentah, sektor ini bergerak menuju hilirisasi sebagai strategi utama dalam meningkatkan nilai tambah, memperkuat kesejahteraan peternak, serta memperkokoh daya saing produk peternakan nasional di pasar domestik dan global. Hilirisasi peternakan menjadi penghubung strategis antara potensi sumber daya lokal dengan kebutuhan pasar modern yang menuntut mutu, keberlanjutan, dan konsistensi.

Selama bertahun-tahun, peternakan masih dipersepsikan sebagai sektor hulu yang menjual produk primer seperti susu segar, telur curah, dan daging karkas. Pola ini membuat nilai ekonomi yang diterima peternak relatif terbatas dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Melalui pendekatan hilirisasi, paradigma tersebut mulai berubah. Peternakan tidak lagi berhenti di kandang, tetapi bergerak ke arah pengolahan, diversifikasi produk, peningkatan standar mutu, serta penguatan akses pasar bernilai tinggi.

Nilai Tambah sebagai Kunci Transformasi

Hilirisasi peternakan membuka ruang luas bagi peningkatan nilai tambah. Produk peternakan yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah kini dapat diolah menjadi berbagai produk turunan dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Susu, misalnya,

Indonesia's livestock sector is entering a critical phase of transformation. No longer confined to the production of raw materials, the sector is moving toward downstream development as a key strategy to increase value added, strengthen farmer welfare, and enhance the competitiveness of national livestock products in both domestic and global markets. Livestock downstreaming serves as a strategic bridge between local resource potential and the demands of modern markets that emphasize quality, sustainability, and consistency.

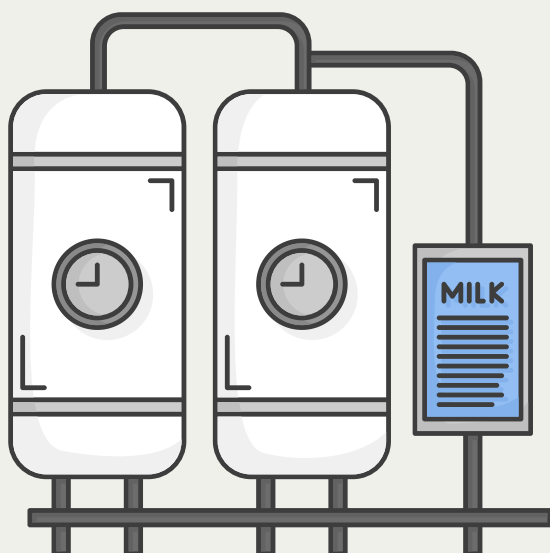
For many years, livestock production has largely been perceived as an upstream activity focused on selling primary products such as fresh milk, bulk eggs, and carcass meat. This pattern has limited the economic value captured by farmers and made them highly vulnerable to price fluctuations. Through downstreaming, this paradigm is gradually shifting. Livestock production no longer ends at the farm gate, but extends into processing, product diversification, quality standardization, and access to high-value markets.

Value Addition as the Key to Transformation

Downstreaming opens broad opportunities for value creation. Products that were previously marketed in raw form can now be processed into a wide range of derivative products with significantly higher economic value. Milk, for

tidak hanya dipasarkan sebagai produk segar dengan umur simpan terbatas, tetapi dikembangkan menjadi yoghurt, keju, mentega, susu fermentasi, hingga produk premium seperti gelato dan pangan fungsional.

Demikian pula dengan telur dan daging. Telur tidak lagi sekadar bahan pangan rumah tangga, tetapi diolah menjadi tepung telur, albumin, serta bahan baku industri pangan dan kesehatan. Daging berkembang menjadi produk olahan siap masak dan siap saji yang memiliki nilai tambah, daya simpan lebih panjang, serta jangkauan pasar yang lebih luas. Setiap proses pengolahan tersebut menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan serapan tenaga kerja, dan memperkuat struktur ekonomi di sentra-sentra peternakan.



Ekosistem Hilirisasi dari Hulu ke Hilir

Keberhasilan hilirisasi peternakan tidak dapat dilepaskan dari ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Peternak menjadi fondasi utama sebagai penyedia bahan baku berkualitas. Koperasi dan kelembagaan usaha berperan penting dalam memperkuat posisi tawar peternak sekaligus menjadi penghubung dengan industri dan lembaga pembiayaan. Di sisi lain, UMKM dan industri pengolahan berfungsi sebagai motor inovasi produk dan penggerak nilai tambah.

instance, is no longer sold solely as a fresh product with a limited shelf life, but is developed into yogurt, cheese, butter, fermented milk, and even premium products such as gelato and functional foods.

Similarly, eggs and meat have moved beyond their traditional roles. Eggs are no longer just a household food staple, but are processed into egg powder, albumin, and raw materials for the food and health industries. Meat, meanwhile, is increasingly processed into ready-to-cook and ready-to-eat products that offer higher value, longer shelf life, and broader market reach. Each stage of processing creates new business opportunities, increases employment absorption, and strengthens local economic structures in livestock production centers.



An Integrated Downstreaming Ecosystem

The success of livestock downstreaming depends on the development of an integrated ecosystem from upstream to downstream. Farmers serve as the primary foundation by supplying quality raw materials. Cooperatives and business institutions play a vital role in strengthening farmers' bargaining power while connecting them with industry and financing institutions. At the same time, micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and processing industries act as engines of product innovation and value creation.

Dalam ekosistem ini, standar mutu dan keamanan pangan menjadi faktor kunci. Penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sertifikasi halal, serta sistem manajemen keamanan pangan seperti HACCP merupakan prasyarat penting agar produk peternakan dapat diterima pasar. Standar ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang akses ke pasar ekspor yang lebih luas.

Perkembangan teknologi turut mempercepat proses hilirisasi. Digitalisasi produksi, sistem rantai dingin, penelusuran produk (traceability), serta pemasaran berbasis digital membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing produk peternakan nasional.

Dampak Nyata bagi Kesejahteraan Peternak

Hilirisasi peternakan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak. Dengan terlibat dalam rantai nilai yang lebih panjang, peternak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada harga bahan mentah. Melalui koperasi atau pola kemitraan usaha, peternak memiliki peluang untuk menikmati nilai tambah dari proses pengolahan dan pemasaran produk.

Pendapatan yang lebih stabil dan peluang usaha yang lebih beragam mendorong keberlanjutan usaha peternakan. Hilirisasi juga membuka ruang regenerasi peternak, karena sektor peternakan mulai dipandang sebagai bidang usaha modern yang menjanjikan dan memiliki prospek jangka panjang.

Menuju Daya Saing Global

Hilirisasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing global produk peternakan Indonesia. Pasar internasional menuntut produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga konsisten, aman, dan berkelanjutan. Produk olahan bernilai tambah menawarkan peluang ekspor yang lebih besar dibandingkan komoditas primer, dengan margin yang lebih tinggi serta risiko pasar yang lebih terkendali.

Within this ecosystem, quality and food safety standards are critical. The implementation of veterinary control certification, halal assurance, and food safety management systems such as HACCP are essential requirements for market acceptance. These standards not only enhance consumer trust but also open access to export markets.

Technological advancement further accelerates downstreaming. Production digitalization, cold chain systems, product traceability, and digital-based marketing improve efficiency, transparency, and the competitiveness of national livestock products.

Tangible Impacts on Farmer Welfare

Livestock downstreaming delivers direct benefits to farmer welfare. By participating in longer value chains, farmers are no longer solely dependent on raw material prices. Through cooperatives or partnership schemes, farmers gain opportunities to share in the added value generated from processing and marketing activities.

More stable incomes and diversified business opportunities support the sustainability of livestock enterprises. Downstreaming also creates space for farmer regeneration, as the livestock sector is increasingly perceived as a modern, promising field with long-term prospects.

Towards Global Competitiveness

Downstream development plays a key role in enhancing the global competitiveness of Indonesia's livestock products. International markets demand products that are not only high in quality, but also consistent, safe, and sustainable. Value-added processed products offer greater export opportunities than primary commodities, with higher margins and more manageable market risks.

Melalui penguatan standar, promosi terpadu, dan diplomasi dagang, produk peternakan Indonesia memiliki peluang besar untuk menempati posisi strategis dalam rantai pasok global. Hilirisasi memungkinkan Indonesia tampil sebagai produsen produk peternakan bernilai tinggi, bukan sekadar pemasok bahan mentah.

Tantangan dan Arah Penguatan Hilirisasi

Meski memiliki potensi besar, hilirisasi peternakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas produksi, akses teknologi, permodalan, serta pemahaman standar mutu menjadi kendala yang perlu diatasi secara bertahap. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu diperkuat agar program hilirisasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, penguatan hilirisasi peternakan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi tepat guna, serta integrasi kebijakan lintas sektor. Pendekatan berbasis kawasan dan komoditas unggulan daerah dapat menjadi strategi efektif untuk mempercepat hilirisasi secara terarah dan berdampak luas.

Hilirisasi peternakan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keberanian berinovasi. Namun, arah jalannya sudah jelas. Dari kandang ke kelas dunia, dari produksi ke nilai tambah, dari sektor tradisional menuju industri masa depan. Saat semua elemen bergerak bersama, peternakan Indonesia tidak hanya tumbuh - ia naik tahta sebagai mesin nilai, pilar pangan, dan simbol kemajuan bangsa.

Through the strengthening of standards, integrated promotion, and trade diplomacy, Indonesia's livestock products have significant potential to secure a strategic position in the global supply chain. Downstreaming enables Indonesia to emerge as a producer of high-value livestock products, rather than merely a supplier of raw materials.

Challenges and the Way Forward

Despite its significant potential, livestock downstreaming still faces a number of challenges. Limited production capacity, restricted access to technology and financing, and insufficient understanding of quality standards remain key obstacles. In addition, coordination among stakeholders must be further strengthened to ensure that downstreaming programs are effective and sustainable.

Going forward, efforts to strengthen livestock downstreaming should focus on improving human resource capacity, adopting appropriate technologies, and integrating cross-sector policies. Area-based and commodity-specific approaches can serve as effective strategies to accelerate downstreaming in a targeted and impactful manner.

Livestock downstreaming is a long journey that demands consistency, collaboration, and the courage to innovate. Yet, the direction is clear. From the barn to the global stage, from production to value creation, from a traditional sector toward an industry of the future. When all elements move in unison, Indonesian livestock farming does not merely grow - it rises as a value engine, a pillar of food security, and a symbol of national progress.



Pasar Ternak, Penggerak Ekonomi Peternakan Rakyat

Livestock Markets: A Driving Force of Smallholder Livestock Economics



Yuniar Mutiara Dewi, S.P
APHP Ahli Pertama

Pasar ternak merupakan salah satu simpul penting dalam sistem peternakan nasional. Di sinilah peternak, pedagang, dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi ternak hidup, mulai dari sapi, kambing, domba, hingga kerbau. Lebih dari sekadar tempat jual beli, pasar ternak berperan sebagai indikator dinamika produksi, distribusi, dan harga ternak di suatu wilayah.

Fungsi Strategis Pasar Ternak

Secara tradisional, pasar ternak menjadi sarana utama bagi peternak rakyat untuk memasarkan hasil ternaknya. Bagi peternak skala kecil, pasar ternak memberikan akses langsung ke pembeli tanpa perantara yang panjang. Sementara bagi pedagang dan pelaku usaha, pasar ternak menjadi titik pengumpulan ternak sebelum didistribusikan ke rumah potong hewan (RPH), pasar konsumsi, maupun wilayah lain yang membutuhkan pasokan.

Livestock markets are one of the key nodes in Indonesia's national livestock system. These markets serve as meeting points for farmers, traders, and buyers to conduct transactions involving live animals, ranging from cattle, goats, and sheep to buffalo. Beyond their role as trading venues, livestock markets function as important indicators of production dynamics, distribution flows, and livestock price formation within a region.

The Strategic Role of Livestock Markets

Traditionally, livestock markets have been the primary channel for smallholder farmers to market their animals. For small-scale farmers, these markets provide direct access to buyers without lengthy intermediary chains. Meanwhile, for traders and business actors, livestock markets act as collection points before animals are distributed to slaughterhouses, consumer markets, or other regions in need of supply.

Selain fungsi ekonomi, pasar ternak juga memiliki peran sosial. Interaksi antar pelaku usaha di pasar ternak menjadi ruang pertukaran informasi, seperti perkembangan harga, permintaan pasar, hingga kondisi kesehatan ternak. Informasi ini sering kali menjadi dasar pengambilan keputusan peternak dalam menentukan waktu penjualan ternak.

Pasar Ternak sebagai Pembentuk Harga

Harga ternak di pasar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan pasokan, permintaan musiman, biaya pakan, serta momen tertentu seperti Hari Raya Idul Adha. Pada periode permintaan tinggi, harga ternak cenderung meningkat, sedangkan pada saat pasokan melimpah harga dapat mengalami penurunan.

Dengan demikian, pasar ternak dapat dianggap sebagai cermin kondisi peternakan di suatu daerah. Fluktuasi harga yang terjadi di pasar ternak sering kali menjadi sinyal awal bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk melakukan langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Gambaran Pasar Ternak di Berbagai Wilayah

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasar Ternak Ambarketawang, Sleman, menjadi salah satu pusat transaksi ternak yang cukup aktif. Pasar ini melayani perdagangan berbagai jenis ternak, khususnya sapi dan kambing, yang berasal dari wilayah Sleman dan sekitarnya. Aktivitas pasar yang rutin menjadikan Ambarketawang sebagai rujukan harga ternak bagi peternak dan pedagang di wilayah tersebut. Keberadaan pasar ini berperan penting dalam mendukung pemasaran ternak rakyat secara berkelanjutan.

Sementara itu, di Jawa Tengah terdapat Pasar Ternak Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang dikenal sebagai salah satu sentra perdagangan ternak di wilayahnya. Pasar ini menampung ternak dari peternak lokal maupun dari daerah sekitar, sehingga berfungsi sebagai simpul distribusi ternak antarwilayah. Transaksi yang terjadi di Pasar Ternak Ambarawa mencerminkan kuatnya peran pasar tradisional dalam menjaga perputaran ekonomi peternakan rakyat.

In addition to their economic function, livestock markets also play a social role. Interactions among market participants create spaces for information exchange, including updates on prices, market demand, and animal health conditions. This information often becomes the basis for farmers' decision-making, particularly in determining the most appropriate timing for selling their livestock.

Livestock Markets as Price-Forming Mechanisms

Livestock prices in markets are influenced by various factors, including supply availability, seasonal demand, feed costs, and specific periods such as the Eid al-Adha festival. During times of high demand, livestock prices tend to increase, whereas prices may decline.

Accordingly, livestock markets can be regarded as reflections of regional livestock conditions. Price fluctuations observed in these markets often serve as early signals for government authorities and business actors to take anticipatory measures to maintain supply and price stability.

An Overview of Livestock Markets Across Regions

In the Special Region of Yogyakarta, the Ambarketawang Livestock Market in Sleman serves as one of the most active livestock trading centers. The market facilitates transactions involving various types of livestock, particularly cattle and goats originating from Sleman and surrounding areas. Its regular market activities have positioned Ambarketawang as a reference for livestock prices among farmers and traders in the region, playing a crucial role in supporting sustainable marketing for smallholder livestock production.

Meanwhile, in Central Java, the Ambarawa Livestock Market in Semarang Regency is recognized as one of the region's major livestock trading hubs. This market accommodates livestock from local farmers as well as from surrounding areas, functioning as an inter-regional distribution node. Transactions at the Ambarawa Livestock Market reflect the continued importance of traditional markets in sustaining economic circulation within smallholder livestock systems.

Di Jawa Barat, Pasar Ternak Ciamis, Kabupaten Ciamis, menjadi wadah penting bagi peternak untuk memasarkan ternaknya, khususnya sapi dan domba. Pasar ini tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan distribusi ternak ke wilayah lain. Aktivitas jual beli di Pasar Ternak Ciamis menunjukkan bahwa pasar ternak masih menjadi pilihan utama peternak rakyat dalam memasarkan hasil usahanya.

Tantangan Pasar Ternak di Era Modern

Di tengah perkembangan zaman, pasar ternak menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur yang terbatas, sistem transaksi yang masih konvensional, serta isu kesehatan hewan menjadi perhatian utama. Kondisi pasar yang kurang tertata juga berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit hewan menular strategis.

Selain itu, keterbatasan data dan informasi harga yang *real time* sering kali menyulitkan peternak dalam menentukan harga jual yang adil. Ketimpangan informasi antara peternak dan pedagang dapat memengaruhi posisi tawar peternak di pasar.

In West Java, the Ciamis Livestock Market in Ciamis Regency provides an important platform for farmers to market their livestock, particularly cattle and sheep. This market not only serves local needs but also forms part of a broader livestock distribution network to other regions. Trading activities at the Ciamis Livestock Market demonstrate that livestock markets remain the primary choice for smallholder farmers in marketing their production.

Challenges Facing Livestock Markets in the Modern Era

Amid rapid development, livestock markets face various challenges. Limited infrastructure, conventional transaction systems, and animal health concerns remain key issues. Poorly managed market conditions may increase the risk of transmission of strategic infectious animal diseases.

Furthermore, limited access to real-time price data often makes it difficult for farmers to determine fair selling prices. Information asymmetry between farmers and traders can weaken farmers' bargaining positions within the market.



Arah Pengembangan Pasar Ternak ke Depan

Modernisasi pasar ternak menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Peningkatan fasilitas, penerapan standar kebersihan dan kesehatan hewan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pencatatan transaksi dan informasi harga merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pasar ternak.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, pasar ternak tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai pusat data dan informasi peternakan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi peternak, meningkatkan daya saing produk peternakan, serta mendukung ketahanan pangan berbasis protein hewani.

Pasar ternak tetap menjadi denyut nadi perdagangan ternak di Indonesia. Di balik aktivitas jual beli yang berlangsung sederhana, tersimpan peran besar dalam menjaga keberlanjutan sektor peternakan nasional. Melalui penguatan fungsi dan modernisasi pasar ternak, diharapkan kesejahteraan peternak dapat meningkat seiring dengan terciptanya sistem peternakan yang lebih efisien dan berdaya saing.

Future Directions for Livestock Market Development

The modernization of livestock markets is an unavoidable necessity. Improving facilities, implementing hygiene and animal health standards, and utilizing digital technologies for transaction recording and price information are essential steps toward enhancing market efficiency and transparency.

With better management, livestock markets can evolve beyond mere transaction venues to become centers of livestock data and information. This transformation is expected to strengthen farmers' market positions, improve the competitiveness of livestock products, and support food security based on animal protein.

Livestock markets remain the lifeblood of livestock trade in Indonesia. Behind the seemingly simple buying and selling activities lies a substantial role in sustaining the national livestock sector. Through strengthened functions and modernization of livestock markets, it is expected that farmer welfare will improve alongside the development of a more efficient and competitive livestock system.



Logistik yang Terlupa: Peran Distribusi Produk Peternakan dalam Ketahanan Pangan Nasional

The Overlooked Logistics: The Role of Livestock Product Distribution in National Food Security



Dr. (Cand). Ir. Andri Hanindyo Wibowo, S.Pt, M.Si

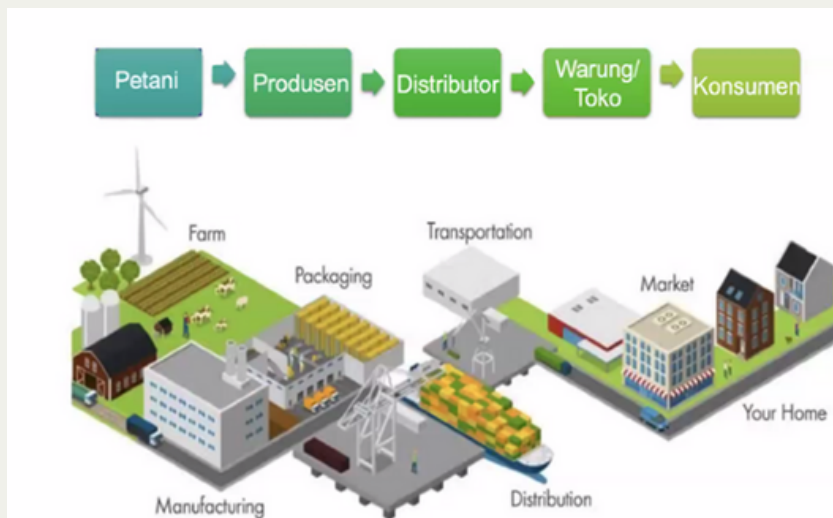
Ketua Kelompok Pemasaran

Ketahanan pangan sering kali dipahami sebagai persoalan produksi. Ketika angka produksi daging, telur, dan susu meningkat, ketahanan pangan dianggap telah tercapai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. Di satu wilayah terjadi surplus produk peternakan, sementara di wilayah lain harga pangan hewani tetap tinggi dan pasokan tidak stabil. Paradoks ini menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berhenti di kandang atau di angka statistik, melainkan juga ditentukan oleh kemampuan sistem distribusi mengalirkan pangan secara merata.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan 38 provinsi, logistik memegang peran sentral. Produk peternakan yang mempunyai sifat mudah rusak (perishable), sensitif terhadap waktu dan suhu, serta memerlukan penanganan khusus, hal ini menjadikan logistik sebagai faktor penentu utama apakah pangan bergizi benar-benar sampai ke meja makan masyarakat. Sayangnya, aspek logistik sering kali menjadi dimensi yang terlupa dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan

Food security is often understood primarily as a matter of production. When the output of meat, eggs, and milk increases, food security is assumed to have been achieved. However, realities on the ground tell a different story. In some regions, there is a surplus of livestock products, while in others, prices of animal-based foods remain high and supplies are unstable. This paradox underscores that food security does not end at the farm gate or in statistical figures; it is also determined by the capacity of the distribution system to deliver food evenly.

In the context of Indonesia as an archipelagic country with more than 17,000 islands and 38 provinces, logistics plays a central role. Livestock products are perishable, highly sensitive to time and temperature, and require special handling. These characteristics make logistics a decisive factor in determining whether nutritious food truly reaches people's dining tables. Unfortunately, logistics is often an overlooked dimension in the formulation of food security policies.



Gambar 1. Ilustrasi Rantai Pasok Pangan, *Farm to Table*

Kinerja Logistik Nasional sebagai Cermin Tantangan

Kinerja logistik Indonesia secara umum masih menghadapi tantangan. Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia pada tahun 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-63 dari 139 negara dengan skor 3,0 (skala 1–5), menurun dibandingkan capaian tahun 2018. Penurunan ini mencerminkan masih terbatasnya efisiensi logistik nasional, khususnya pada aspek infrastruktur, keandalan pengiriman, dan sistem pelacakan. Dalam konteks pangan, terutama produk peternakan, kondisi ini berdampak nyata. Harga daging, telur, dan susu dapat berbeda signifikan antarwilayah, bukan semata karena perbedaan biaya produksi, tetapi karena distribusi yang mahal dan tidak efisien. Bagi produk peternakan, keterbatasan logistik bukan sekadar persoalan biaya, tetapi juga menyangkut kualitas dan keamanan pangan. Keterlambatan distribusi atau gangguan rantai dingin dapat langsung berdampak pada mutu produk, yang pada akhirnya merugikan produsen dan konsumen. Dengan kata lain, logistik menjadi faktor penentu yang sering kali luput dari perhatian dalam diskursus ketahanan pangan.

National Logistics Performance as a Reflection of the Challenges

Indonesia's logistics performance continues to face significant challenges. The World Bank's Logistics Performance Index (LPI) in 2023 ranked Indonesia 63rd out of 139 countries, with a score of 3.0 on a scale of 1 to 5, representing a decline compared to its 2018 performance. This decline reflects the continued limitations in national logistics efficiency, particularly in infrastructure, delivery reliability, and tracking systems. In the context of food, especially livestock products, these conditions have tangible impacts. Prices of meat, eggs, and milk can vary significantly between regions, not solely due to differences in production costs, but also because distribution remains costly and inefficient. For livestock products, logistical constraints are not merely a matter of cost, but also relate directly to food quality and safety. Delays in distribution or disruptions in the cold chain can immediately affect product quality, ultimately disadvantaging both producers and consumers. In this sense, logistics is a decisive factor that is often overlooked in discussions on food security.

Skala Ekonomis Logistik di Negara Kepulauan

Salah satu persoalan mendasar logistik di Indonesia adalah sulitnya mencapai skala ekonomis. Skala ekonomis logistik tercapai ketika biaya distribusi per unit menurun seiring meningkatnya volume dan keterpaduan jaringan. Namun, kondisi geografis Indonesia justru mendorong fragmentasi volume dan rute distribusi. Sebaran pulau menyebabkan volume muatan per rute relatif kecil, banyak rute bersifat satu arah, dan perjalanan balik sering kali kosong. Biaya tetap (fixed cost) logistik—seperti kapal, pelabuhan, cold storage, dan armada berpendingin—akhirnya harus ditanggung oleh volume yang terbatas. Ketimpangan produksi dan konsumsi antarwilayah semakin memperkuat persoalan ini. Sebagian provinsi menjadi sentra produksi peternakan, sementara provinsi lain berfungsi sebagai sentra konsumsi, tanpa arus balik barang yang seimbang. Dominasi peternak rakyat berskala kecil juga menjadi tantangan tersendiri. Produksi yang tersebar dan bervolume kecil menyulitkan konsolidasi muatan, sehingga logistik berjalan parsial dan mahal. Akibatnya, pangan tersedia secara nasional, tetapi tidak selalu terjangkau secara wilayah.

Perdagangan Antarwilayah: Potensi yang Belum Optimal

Secara konseptual, perdagangan antarwilayah merupakan mekanisme alami untuk menyalurkan surplus produksi ke daerah defisit. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan perdagangan antarprovinsi sebagai penyangga pasokan dan stabilisator harga produk peternakan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini belum berjalan optimal. Tingginya biaya logistik, keterbatasan cold chain, serta lemahnya koordinasi antar pelaku rantai pasok menyebabkan perdagangan antarwilayah belum sepenuhnya mampu menurunkan disparitas harga dan meningkatkan pemerataan pasokan. Tanpa penguatan logistik, perdagangan antarwilayah sulit

Economies of Scale in Logistics within an Archipelagic State

One of the fundamental logistical challenges in Indonesia is the difficulty of achieving economies of scale. Economies of scale in logistics are realised when distribution costs per unit decrease as volumes increase and networks become more integrated. However, Indonesia's geographical conditions instead encourage fragmentation of volumes and distribution routes. The dispersion of islands results in relatively small cargo volumes per route, many routes being one way, and return journeys often running empty. Fixed logistics costs, such as vessels, ports, cold storage facilities, and refrigerated fleets, therefore have to be borne by limited volumes. Imbalances between production and consumption across regions further exacerbate this issue. Some provinces function as livestock production centres, while others act as consumption hubs, without balanced return flows of goods. The dominance of small scale smallholder farmers presents an additional challenge. Scattered and low volume production makes cargo consolidation difficult, leading to partial and costly logistics operations. As a result, food may be available nationally, but not always affordable across regions.

Interregional Trade: Untapped Potential

Conceptually, interregional trade is a natural mechanism for channelling production surpluses to deficit areas. Indonesia has substantial potential to leverage interprovincial trade as a buffer for supply and a stabiliser of livestock product prices. In practice, however, this mechanism has not yet functioned optimally. High logistics costs, limited cold chain infrastructure, and weak coordination among supply chain actors mean that interregional trade has not been fully effective in reducing price disparities and improving supply equity. Without strengthened logistics, interregional trade will

berfungsi sebagai instrumen ketahanan pangan yang efektif. Terdapat 10 titik kritis dalam logistik antar wilayah yang perlu mendapatkan perhatian yaitu : Aksesibilitas dan Infrastruktur, Biaya Logistik, Kapasitas dan Ketersediaan Armada, Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Kebijakan dan Regulasi, Kolaborasi Multi Pihak, Teknologi dan Informasi, Keamanan dan Resiko, Manajemen Persediaan dan Gudang, serta Aspek Lingkungan.

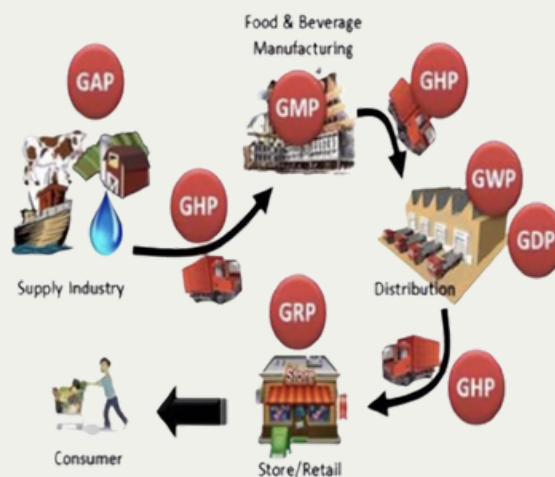
struggle to serve as an effective instrument of food security. There are ten critical points in interregional logistics that require attention, namely accessibility and infrastructure, logistics costs, fleet capacity and availability, the socioeconomic conditions of communities, policy and regulation, multiparty collaboration, technology and information, security and risk, inventory and warehouse management, and environmental aspects.

Good Food Practice sebagai Fondasi Distribusi

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Good Food Practice (GFP) menjadi fondasi teknis yang tidak dapat diabaikan. GFP di dalam Supply Management System (SCM) antara lain terdiri dari Good Farming Practice, Good Handling Practices, Good Distribution Practices, Good Warehouse Practices, Good Retail Practice.

Good Food Practice as the Foundation of Distribution

In addressing these challenges, Good Food Practice (GFP) constitutes a technical foundation that cannot be ignored. Within the Supply Management System (SCM), GFP encompasses Good Farming Practice, Good Handling Practices, Good Distribution Practices, Good Warehouse Practices, and Good Retail Practice.



Gambar 2. Ilustrasi Kebutuhan Good Food Practice dalam Rantai Pasok Pangan

GFP memastikan produk peternakan ditangani secara higienis, disimpan pada suhu yang sesuai, dan didistribusikan dengan prosedur yang benar sejak dari hulu hingga hilir. Lebih dari sekadar standar mutu dan keamanan pangan, GFP berperan sebagai “bahasa teknis bersama” yang memungkinkan konsolidasi produk dari berbagai sumber dan wilayah. Tanpa penerapan GFP yang konsisten, investasi logistik seperti cold chain dan transportasi berpendingin tidak akan menghasilkan efisiensi yang diharapkan.

GFP ensures that livestock products are handled hygienically, stored at appropriate temperatures, and distributed using proper procedures from upstream to downstream. Beyond serving as standards for food quality and safety, GFP functions as a “shared technical language” that enables the consolidation of products from diverse sources and regions. Without consistent implementation of GFP, logistics investments such as cold chains and refrigerated transport will not deliver the expected efficiency gains.

Tabel 1. Matrik Peran *Good Food Practice* (GFP) dan Dampaknya pada Logistik dan *Supply Chain Management* (SCM) serta Implikasi pada Ketahanan Pangan

Tahapan Rantai Pasok	Peran <i>Good Food Practice</i> (GFP)	Dampak pada Logistik & SCM	Implikasi bagi Ketahanan Pangan
Produksi di tingkat peternak	Penanganan awal produk secara higienis dan terstandar	Mutu produk lebih seragam dan mudah diperdagangkan	Pasokan lebih andal dan berkelanjutan
Pengumpulan & agregasi	Standar sanitasi dan suhu saat pengumpulan	Konsolidasi produk lebih efisien	Biaya distribusi menurun
Penyimpanan sementara	Pengendalian suhu dan kebersihan	Risiko kerusakan produk berkurang	Ketersediaan produk lebih stabil
Transportasi antarwilayah	Prosedur angkut berpendingin dan tepat waktu	Distribusi lebih cepat dan terjadwal	Disparitas harga antarwilayah menurun
Distribusi ke pasar	Penanganan bongkar muat sesuai standar	Pasokan pasar lebih terprediksi	Harga pangan lebih terkendali
Pengolahan (hilirisasi)	GFP sebagai dasar keamanan pangan	Integrasi hulu-hilir lebih kuat	Nilai tambah produk meningkat
Perdagangan antarwilayah	Jaminan mutu selama lintas wilayah	Arus barang lebih lancar	Akses pangan lebih merata
Digitalisasi & ketertelusuran	Pencatatan asal dan penanganan produk	SCM lebih transparan dan adaptif	Kepercayaan konsumen meningkat

Table 1. Matrix of the Roles of Good Food Practice (GFP) and Its Impact on Logistics and Supply Chain Management (SCM), and Implications for Food Security

Supply Chain Stage	Role of Good Food Practice (GFP)	Impact on Logistics & SCM	Implications for Food Security
Production at farmer level	Hygienic and standardised initial handling of products	More uniform product quality and easier trade	More reliable and sustainable supply
Collection & aggregation	Sanitation and temperature standards during collection	More efficient product consolidation	Lower distribution costs
Temporary storage	Temperature control and cleanliness	Reduced risk of product spoilage	More stable product availability
Interregional transportation	Proper and timely refrigerated transport procedures	Faster and more scheduled distribution	Reduced interregional price disparities
Distribution to markets	Standard compliant loading and unloading handling	More predictable market supply	Better controlled food prices
Processing (downstreaming)	GFP as the basis for food safety	Stronger upstream-downstream integration	Increased product value added
Interregional trade	Quality assurance during cross regional movement	Smoother flow of goods	More equitable access to food
Digitalisation & traceability	Recording of product origin and handling	More transparent and adaptive SCM	Increased consumer trust

Efisiensi Pengelolaan Pangan dalam Perspektif Supply Chain

Dalam perspektif supply chain, efisiensi pengelolaan pangan ditentukan oleh kemampuan sistem logistik menjaga empat pilar ketahanan pangan: ketersediaan, perolehan (akses), keterjangkauan, dan kualitas. Ketersediaan pangan baru tercapai ketika produk dapat mengalir dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi secara tepat waktu. Akses pangan bergantung pada keteraturan distribusi dan jangkauan layanan logistik. Keterjangkauan sangat dipengaruhi oleh biaya logistik sepanjang rantai pasok. Sementara itu, kualitas pangan ditentukan oleh keandalan logistik dan penerapan standar seperti GFP dan cold chain. Keempat pilar ini hanya dapat berjalan beriringan jika didukung oleh konektivitas dan pelayanan logistik yang baik—baik secara fisik, regulasi, informasi, maupun operasional.

Logistik dalam Kerangka Makro-Mikro: Siapa Berperan, Siapa Menanggung Biaya

Dalam kerangka kebijakan, logistik bekerja pada dua level. Secara makro, logistik merupakan domain pemerintah, mencakup penyediaan infrastruktur, regulasi, standarisasi, koordinasi antarwilayah, serta penjaminan stabilitas sistem distribusi. Peran makro ini sangat penting di negara kepulauan untuk memastikan keterhubungan wilayah dan keadilan akses pangan. Sebaliknya, secara mikro, logistik merupakan domain perusahaan dan pelaku usaha. Pada level ini, fokus utama adalah efisiensi operasional, pengelolaan biaya, dan kepatuhan terhadap standar. Di antara kedua level tersebut terdapat dimensi jaminan—jaminan waktu, mutu, keamanan, dan kontinuitas layanan. Jaminan ini selalu membawa implikasi biaya. Ketika jaminan sistemik belum sepenuhnya disediakan pada level makro, beban biaya bergeser ke level mikro dan akhirnya tercermin dalam harga pangan.

Efficiency of Food Management from a Supply Chain Perspective

From a supply chain perspective, the efficiency of food management is determined by the ability of the logistics system to uphold the four pillars of food security: availability, access, affordability, and quality. Food availability is only achieved when products can flow from production areas to consumption areas in a timely manner. Access to food depends on the regularity of distribution and the reach of logistics services. Affordability is strongly influenced by logistics costs along the supply chain. Meanwhile, food quality is determined by the reliability of logistics systems and the implementation of standards such as Good Food Practice (GFP) and the cold chain. These four pillars can only function in tandem when supported by strong connectivity and effective logistics services—physically, regulatorily, informationally, and operationally.

Logistics in the Macro-Micro Framework: Who Plays a Role and Who Bears the Cost

Within the policy framework, logistics operates at two levels. At the macro level, logistics falls within the government's domain, encompassing the provision of infrastructure, regulation, standardisation, interregional coordination, and the safeguarding of distribution system stability. This macro role is particularly critical in an archipelagic country to ensure regional connectivity and equitable access to food. Conversely, at the micro level, logistics is the domain of companies and business actors, where the primary focus lies on operational efficiency, cost management, and compliance with standards. Between these two levels lies a dimension of assurance—assurance of timeliness, quality, safety, and service continuity. Such assurances inevitably carry cost implications. When systemic guarantees are not fully provided at the macro level, the cost burden shifts to the micro level and is ultimately reflected in food prices.

Pengembangan Digitalisasi Logistik 4.0 dan Peran IoT

Digitalisasi menjadi pengungkit penting untuk mengatasi kompleksitas logistik. Dalam konteks ini, Logistik 4.0 merupakan kerangka transformasi sistemik yang mengintegrasikan seluruh proses logistik berbasis data, sementara Internet of Things (IoT) berfungsi sebagai alat pengumpul data real time. IoT memungkinkan pemantauan suhu, waktu, dan kondisi produk peternakan selama distribusi. Namun, tanpa integrasi dalam Logistik 4.0, data tersebut tidak akan menghasilkan keputusan. Sebaliknya, Logistik 4.0 tanpa IoT kehilangan akurasi informasi lapangan. Sinergi keduanya memungkinkan pengurangan risiko, penurunan biaya jaminan, dan peningkatan efisiensi distribusi antarwilayah.

Developing Logistics Digitalisation: Logistics 4.0 and the Role of IoT

Digitalisation has become a critical lever for addressing the complexity of logistics. In this context, Logistics 4.0 serves as a framework for systemic transformation that integrates all logistics processes through data driven systems, while the Internet of Things (IoT) functions as a real time data collection tool. IoT enables the monitoring of temperature, time, and the condition of livestock products throughout distribution. However, without integration into Logistics 4.0, such data will not translate into effective decision making. Conversely, Logistics 4.0 without IoT loses the accuracy of field level information. The synergy between the two allows for risk reduction, lower assurance costs, and improved efficiency of interregional distribution.



Gambar 3. Ilustrasi Penerapan Logistik 4.0 dan I.O.T

Arah Kebijakan : Mengingat kembali Logistik

Pokok bahasan ini menegaskan perlunya mengingat kembali peran logistik dalam kebijakan pangan. Ketahanan pangan tidak cukup ditopang oleh peningkatan produksi, tetapi harus diimbangi dengan penguatan distribusi antarwilayah. Distribusi yang efisien memungkinkan pasokan antarwilayah saling menutupi, fluktuasi harga ditekan, dan akses pangan bergizi diperluas. Selain itu, logistik yang

Policy Direction: Recalling the Importance of Logistics

This discussion underscores the need to bring logistics back into focus within food policy. Food security cannot be sustained solely by increasing production; it must be balanced with strengthened interregional distribution. Efficient distribution enables supply flows between regions to complement one another, suppresses price fluctuations, and expands access to nutritious food. Moreover, robust logistics opens

kuat membuka peluang hilirisasi produk peternakan dalam bentuk produk olahan dan beku yang lebih fleksibel untuk distribusi lintas wilayah. Beberapa arah kebijakan yang relevan antara lain: Pengembangan infrastruktur logistik peternakan berbasis wilayah, khususnya cold chain di luar sentra produksi utama.; Integrasi kebijakan produksi dan logistik, sehingga perencanaan distribusi menjadi bagian dari strategi pengembangan peternakan; Penerapan dan pembinaan GFP secara konsisten, terutama bagi peternak rakyat dan pelaku usaha kecil; Penguatan kelembagaan peternak dan agregator logistik, untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi; serta Pemanfaatan data dan digitalisasi logistik pangan, guna mendukung perencanaan distribusi dan stabilisasi harga.

Penutup: Ketahanan Pangan yang Benar-Benar Hadir

Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi soal apakah pangan bergizi benar-benar hadir di meja makan masyarakat, di seluruh wilayah Indonesia. Logistik produk peternakan—yang selama ini kerap terlupa—memegang peranan kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dengan logistik yang kuat, terintegrasi, dan berbasis praktik pangan yang baik, ketahanan pangan nasional dapat menjadi lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, sistem logistik yang kuat juga meningkatkan kesejahteraan peternak. Akses pasar yang lebih luas dan efisien meningkatkan kepastian serapan produk dan memperbaiki posisi tawar peternak dalam rantai pasok.

opportunities for downstream development of livestock products in the form of processed and frozen products, which are more flexible for cross regional distribution. Relevant policy directions include: the development of region based livestock logistics infrastructure, particularly cold chains outside major production centres; the integration of production and logistics policies so that distribution planning becomes an integral part of livestock development strategies; consistent implementation and capacity building for Good Food Practice (GFP), especially among smallholder farmers and small scale enterprises; strengthening farmer institutions and logistics aggregators to enhance efficiency and economies of scale; and the utilisation of data and digitalisation in food logistics to support distribution planning and price stabilisation.

Conclusion: Food Security That Truly Materialises

Ultimately, food security is not merely a set of figures on paper, but a question of whether nutritious food truly reaches people's dining tables across all regions of Indonesia. Livestock product logistics—so often overlooked—plays a pivotal role in realising this objective. With strong, integrated logistics grounded in good food practices, national food security can become more equitable, inclusive, and sustainable. In the long term, a robust logistics system also improves farmers' welfare. Broader and more efficient market access enhances certainty of product absorption and strengthens farmers' bargaining position within the supply chain.

Kapan Investasi Peternakan Bisa “Show Off”?



When Can Livestock Investment 'Show Off'?



Fadilla Kartika Hapsari, S. Pt.

Di tengah pencapaian swasembada pangan yang baru dicanangkan, apakah lanskap investasi sektor peternakan masih menunjukkan potret yang timpang?

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (diolah Ditjen PKH), pada Triwulan III 2025, sektor peternakan seolah masih tertatih di jalur lambat. Dari total realisasi investasi pemodalan Asing dan domestik (PMA&PMDN) pada subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan yang mencapai Rp18,27 triliun, subsektor peternakan di bidang usaha pembibitan, pakan dan budidaya ternak hanya mampu menyumbang angka kurang lebih Rp1,9 triliun atau setara 10,4 persen.

Angka ini kian terlihat kecil jika disandingkan dengan total investasi nasional yang menembus Rp491,41 triliun, di mana sektor industri logam dasar dan pertambangan masih menjadi "primadona" yang mendominasi panggung ekonomi dengan capaian gabungan melebihi Rp117 triliun.

Kesenjangan ini memicu tanda tanya: mengapa tulang punggung protein nasional masih terpinggirkan oleh dominasi minerba? Meski dijanjikan sebagai kunci kedaulatan pangan, tanpa akselerasi nyata, “show-off” peternakan sebagai pilar ekonomi baru hanya akan menjadi narasi yang terkunci dalam statistik.

Following the recent declaration of food self-sufficiency targets, is Livestock's investment landscape still characterized by significant disparities?

According to the latest data from the Ministry of Investment and Downstreaming/BKPM (processed by the Directorate General of Livestock and Animal Health Services), as of the third quarter of 2025, the livestock sector remains tethered to the slow lane. From the total realization of Foreign and Domestic Direct Investment (FDI & DDI) within the food crops, plantation, and livestock subsectors—which reached Rp18.27 trillion—the livestock sector contributed a mere figure of Rp1.9 trillion, or just 10.4 percent.

This figure appears even more diminutive when pitted against the total national investment of Rp491.41 trillion, where the basic metal industry and mining sectors remain the 'darlings' of the economic stage, boasting a combined achievement exceeding Rp117 trillion.

This gap triggers a critical question: why is the backbone of national protein still sidelined by the dominance of mining? Despite being promised as the key to food sovereignty, without real acceleration, the “show-off” of livestock as a new economic pillar will remain a narrative locked in statistics.

Suara dari Kandang: Mengurai Sengkarut Investasi dan Logistik

Investasi di sektor peternakan bukan sekadar soal menyuntikkan modal, melainkan membenahi ekosistem yang selama ini timpang. Presiden APLN (Asosiasi Peternak Layer Nasional), Ki Musbar Mesdi, memperingatkan bahwa kucuran modal investasi akan sia-sia tanpa pemerataan infrastruktur. “Kalau pakannya hanya tersedia di Makassar, apakah bisa melayani daerah-daerah pelosok? Biaya produksi akan tinggi bila ongkos transportasi juga tinggi”, tegasnya (Katadata, 11/11/2025).

Senada dengan itu, peternak asal Lampung, Donny Irawan, mendesak dukungan nyata melalui badan seperti Danantara untuk menyasar akar masalah di sisi hulu dan tata niaga. “Bantu di sisi pakan dan tata niaga. Itu masalah utama kami. Harga pakan tinggi, tapi harga ayam di pasar justru rendah”, keluhnya. (Harianbisnis.com, 18/11/2025)

Sementara itu, Ketua Umum GOPAN, Pardjuni, menekankan kepastian hukum dan infrastruktur hilir adalah kunci penarik modal. Kepada CNBC Indonesia (12/11/2025), ia menegaskan pentingnya ketegasan aturan dan fasilitas penyimpanan: “Tegakkan aturan dengan jelas. Bangun infrastruktur hilir, pengolahan, dan penyimpanan hasil unggas—baik daging maupun telur.”

Sinyal Kebangkitan: Melampaui Rata-Rata Historis

Namun, di balik narasi ketertinggalan tersebut, tersimpan optimisme yang mulai terlihat dari performa data teranyar BKPM.

Voices from the Farm: Untangling the Investment and Logistics Knot

The investment gap in the livestock sector is a systemic failure, not a lack of potential. Ki Musbar Mesdi, APLN President, Ki Musbar Mesdi, warns that investment capital injections will be futile without equitable infrastructure distribution “If feed is only available in Makassar, can it serve remote areas? Production costs will soar if transport costs remain high,” he noted (Katadata, 11/11/2025).

From the ground in Lampung, farmer Donny Irawan calls for strategic intervention in the supply chain. “Support us in feed and trade governance. That’s been our main struggle—high feed prices vs. low market prices,” he argued. (Harianbisnis.com, 18/11/2025)

Strengthening this sentiment, Pardjuni, Chairman of GOPAN, told CNBC Indonesia (12/11/2025) that regulatory firmness and downstream facilities are non-negotiable: “Enforce the rules clearly. Build the downstream infrastructure—processing and storage for both meat and egg”.

Signs of Awakening: Surpassing Historical Averages

Beneath the narrative of lagging growth, a new sense of optimism is emerging, fueled by the latest performance data BKPM



Setelah stagnasi panjang 2020–2024 dengan rata-rata investasi lima tahun terakhir di angka Rp4,07 triliun, industri peternakan dan kesehatan hewan akhirnya memecah 'langit-langit' investasinya. Hanya dalam sembilan bulan di tahun 2025 (TW 1–3), realisasi investasi melonjak ke angka Rp5,21 triliun.

Pertumbuhan year-on-year meningkat 29,78%, dibandingkan dengan Rp4,01 triliun pada periode yang sama di 2024. Ini menjadi bukti empiris pulihnya kepercayaan pasar dan terbukanya celah profitabilitas. Sinyal emas ini menuntut penguatan kebijakan agar momentum investasi terus bergulir.

Akselerasi Kebijakan: Motor di Balik Lonjakan 29,78%

Lonjakan investasi 2025 ini utamanya merupakan hasil orkestrasi kebijakan Kementan yang adaptif dan pro-investasi. Hadirnya PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui sistem Online Single Submission (OSS) menjadi titik balik krusial yang memangkas rantai birokrasi, memberikan kemudahan akses modal sekaligus menghapus hambatan perizinan yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.

Karpet merah bagi investor tidak berhenti pada sistem digital semata. Pemerintah memperkuat pendampingan investasi melalui penyediaan lahan strategis dan percepatan birokrasi yang lebih lincah. Dukungan ini dipermanis dengan paket insentif fiskal berupa Tax Allowance sebagaimana diatur dalam PP No. 78 Tahun 2019 dan Permentan Nomor 11 Tahun 2024.

Kebijakan lainnya melalui program P2SDN (Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional), memacu populasi sapi secara masif untuk menjamin bahan baku industri. Fondasinya bertumpu pada skema kemitraan berkeadilan (Permentan No. 13/2017) yang menjamin kepastian pasokan bagi investor sekaligus transfer teknologi bagi peternak.

After a prolonged stagnation from 2020 to 2024, during which annual investment averaged Rp4.07 trillion, the livestock and animal health industry has finally shattered its investment ceiling. In just nine months 2025 (Q1–Q3), realized investment surged to Rp5.21 trillion.

This represents a 29,78% year-on-year growth compared to the Rp4,01 trillion recorded during the same period in 2024. This proves rebounding market confidence and emerging profitability—a golden signal that demands stronger policy reinforcement to ensure this investment momentum continues to gain pace.

Policy Acceleration: The Engine Behind the 29,78% Surge

The 2025 investment surge is primarily the result of the Ministry of Agriculture's adaptive and pro-investment policy orchestration. The enactment of Government Regulation (PP) No. 28 of 2025 regarding Risk-Based Business Licensing (PBBR) via the OSS system has been a crucial turning point. It has dismantled bureaucratic labyrinths, streamlining capital access while eliminating the licensing hurdles that have long hindered businesses.

The 'red carpet' for investors extends beyond digital systems. The government is intensifying investment assistance through the provision of strategic land and more agile bureaucratic processes. These efforts are further enhanced by fiscal incentive packages, such as the Tax Allowance regulated under PP No. 78 of 2019 and Permentan No. 11 of 2024.

Complementing these efforts, the P2SDN program (Acceleration of National Milk and Meat Production) is driving a massive increase in cattle populations to secure industrial raw materials. Its foundation rests on a fair partnership scheme (Permentan No. 13/2017), which guarantees supply certainty for investors while facilitating technology transfer for local farmers.

Urgensi transformasi ini kian nyata seiring peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri Pertanian, Dr. Sudaryono, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah dan 200.000 ekor sapi pedaging pada tahun 2025, dengan visi jangka panjang dalam lima tahun ke depan mencapai 2 juta indukan, dengan 1 juta ekornya sebagai sapi perah.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan bergizi nasional, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah," ungkap Sudaryono (Sumber: CNBC Indonesia, 8 Januari 2025). Dengan terealisasinya target ini, pemerintah tidak hanya berupaya mencukupi nutrisi bangsa, tetapi juga memastikan sektor peternakan menjadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkelanjutan.

Epilog: Melampaui Angka, Membangun Ekosistem Berkelanjutan

Lonjakan investasi 29,78% pada 2025 adalah kemenangan awal yang harus dijaga agar tidak menjadi tren sesaat. Diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar mengejar angka menuju pembangunan ekosistem resilien, sebab tantangan utamanya bukan minimnya minat, melainkan rapuhnya konektivitas hulu-hilir.

Oleh karena itu, penulis melihat perlunya penguatan pada tiga pilar strategis: digitalisasi rantai pasok, standarisasi kualitas produk nasional, dan insentif khusus bagi integrasi industri-ternak rakyat.

Melalui kehadiran offtaker berskala besar sebagai jangkar risiko, hilirisasi peternakan diharapkan akan mampu lepas dari bayang-bayang sektor minerba dan beralih fokus pada produk olahan berorientasi ekspor.

Dengan konsistensi regulasi dan keberanian inovasi pada teknologi pakan serta genetika, sektor peternakan bukan lagi sekadar pilihan alternatif, melainkan mesin pertumbuhan utama yang menjamin kedaulatan pangan sekaligus kesejahteraan nyata di akar rumput.



(Wamentan Dr. Sudaryono. (Dok. Kementan) (CNBC) Indonesia, 08/01/2025

The urgency of this transformation is further amplified by the launch of the Free Nutritious Meals (MBG) program. Vice Minister of Agriculture, Sudaryono, emphasized that the government targets the importation of 200,000 dairy cows and 200,000 beef cattle in 2025. This is part of a grand long-term vision to reach 2 million head of breeding stock within the next five years, with 1 million specifically dedicated to dairy production.

"This step is taken as part of the effort to meet national nutritious food needs, particularly in support of the government's Free Nutritious Meals program," stated Sudaryono (Source: CNBC Indonesia, January 8, 2025). By achieving this target, the government seeks not only to fulfill the nation's nutritional requirements but also to ensure the livestock sector becomes an engine for independent and sustainable community-based economic growth.

Epilogue: Moving Beyond Figures to Foster Ecosystem Sustainability

The 29,78% investment surge in 2025 is a preliminary victory that must be sustained to prevent it from becoming a fleeting trend. A paradigm shift is required—moving beyond chasing realization figures toward building a resilient ecosystem—as the primary challenge is not a lack of interest, but the fragile connectivity between upstream and downstream sectors.

Therefore, the author emphasizes the need to strengthen three strategic pillars: supply chain digitalization, national product quality standardization, and specific incentives for industry-smallholder integration

Through the presence of large-scale off-takers serving as risk anchors, livestock downstreaming is expected to emerge from the shadow of the mineral and coal sectors, pivoting toward export-oriented processed products.

Supported by regulatory consistency and bold innovations in feed and genetic technology, the livestock sector will no longer be a mere alternative, but a primary growth engine ensuring both food sovereignty and genuine prosperity at the grassroots level.

ISO: Standar Global Untuk Mutu, Keamanan, dan Kepercayaan Produk Peternakan

ISO: Global Standards for Quality, Safety, and Trust in Livestock Products



Shofia Nurul Hakim, S.Pt. MP
(PMHP Ahli Muda)

Di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka, mutu dan konsistensi produk menjadi kunci utama kepercayaan konsumen.

Di sinilah ISO (International Organization for Standardization) hadir sebagai standar internasional yang membantu pelaku usaha memastikan produk dan proses usahanya memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan tata kelola yang diakui secara global.

Sekilas Sejarah ISO

Sebelum ISO terbentuk, setiap negara memiliki aturan sendiri terkait ukuran, mutu, dan cara produksi. Akibatnya, produk dari satu negara kerap sulit diterima di negara lain, meskipun kualitasnya sebenarnya baik.

Pasca Perang Dunia II, negara-negara menyadari pentingnya aturan bersama untuk memperlancar perdagangan internasional. Pada tahun 1947, perwakilan dari 25 negara sepakat membentuk sebuah organisasi internasional bernama ISO. Tujuannya sederhana namun strategis, yaitu menyusun standar bersama yang disepakati secara global agar produk dapat diperdagangkan secara adil, aman, dan saling dipercaya.

Kini, ISO berkantor pusat di Jenewa, Swiss, dan memiliki anggota hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Amid increasingly open market competition, product quality and consistency have become the primary keys to consumer trust.

This is where ISO (International Organization for Standardization) serves as an international standard that helps business actors ensure their products and business processes meet globally recognized requirements for quality, safety, and governance.

A Brief History of ISO

Before ISO was formed, every country had its own rules regarding measurements, quality, and production methods. As a result, products from one country were often difficult to accept in another, even if the quality was actually good.

After World War II, nations realized the importance of shared rules to facilitate international trade. In 1947, representatives from 25 countries agreed to form an international organization named ISO. Its goal was simple yet strategic: to develop shared standards agreed upon globally so that products could be traded fairly, safely, and with mutual trust.

Today, ISO is headquartered in Geneva, Switzerland, and has members almost all over the world, including Indonesia.

ISO Tidak Hanya untuk Industri Besar

Awalnya, standar ISO banyak diterapkan di industri besar. Namun seiring waktu, ISO dikembangkan agar dapat diterapkan oleh berbagai skala usaha, termasuk sektor pertanian dan peternakan.

ISO dirancang agar:

- dapat diterapkan pada usaha kecil dan peternak rakyat,
- membantu menjamin keamanan pangan,
- meningkatkan mutu dan nilai tambah produk.

Dengan demikian, ISO bukan semata soal mesin dan pabrik, melainkan cara kerja yang tertib, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri.

Peran ISO dalam Sektor Peternakan

Dalam sektor peternakan, ISO tidak hanya mengatur kualitas produk akhir, tetapi juga mencakup:

- proses produksi yang higienis,
- pengendalian risiko,
- pencatatan yang rapi,
- serta perbaikan berkelanjutan.

Penerapan ISO membuat produk peternakan lebih terjamin keamanannya, aman dikonsumsi, dan memiliki daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

ISO dan Indonesia

Seiring meningkatnya perdagangan dan ekspor, ISO semakin dikenal di Indonesia. Pemerintah kemudian membentuk Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai wakil Indonesia di ISO. Standar ISO menjadi rujukan dalam penyusunan:

- Standar Nasional Indonesia (SNI),
- regulasi dan persyaratan teknis minimal,
- pembinaan mutu produk dalam negeri, termasuk produk peternakan.

Mengapa ISO Penting bagi UMKM Produk Peternakan?

Bagi peternak rakyat dan UMKM, ISO berfungsi sebagai:

- pedoman kerja yang baik,
- bukti tertulis bahwa produk aman, bersih, dan konsisten,
- jaminan kepercayaan pasar.

ISO Is Not Only for Large Industries Initially

ISO standards were mostly applied in large industries. However, over time, ISO was developed so it could be applied by various business scales, including the agricultural and livestock sectors.

ISO is designed to:

- be applicable to small businesses and smallholder farmers,
- help guarantee food safety,
- increase product quality and added value.

Thus, ISO is not just about machines and factories, but about orderly, documented, and traceable ways of working.

The Role of ISO in the Livestock Sector

In the livestock sector, ISO does not only regulate the quality of the final product but also covers:

- hygienic production processes,
- risk control,
- tidy record-keeping,
- and continuous improvement.

The application of ISO makes livestock products more guaranteed in terms of safety, safe for consumption, and competitive in both domestic and export markets.

ISO and Indonesia

As trade and exports increase, ISO is becoming better known in Indonesia. The government then formed the National Standardization Agency (BSN) as Indonesia's representative in ISO. ISO standards serve as a reference in drafting:

- Indonesian National Standards (SNI),
- regulations and minimum technical requirements,
- quality guidance for domestic products, including livestock products.

Why is ISO Important for Livestock Product UMKM?

For smallholder farmers and UMKM, ISO functions as:

- a guide for good work practices,
- written proof that the product is safe, clean, and consistent,
- a guarantee of market trust.

ISO dirancang untuk membantu UMKM naik kelas secara bertahap, dari usaha tradisional menjadi usaha yang lebih tertata, efisien, dan profesional.

Beberapa manfaat nyata penerapan ISO antara lain:

- meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha,
- mempermudah akses ke pasar modern, pengadaan pemerintah, dan ekspor,
- meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi pemborosan,
- menjadi dasar pemenuhan regulasi dan SNI.

ISO sebagai Alat Pembinaan, Bukan Beban

Dalam kebijakan nasional, ISO diposisikan sebagai **instrumen pembinaan**, bukan kewajiban yang memberatkan. Pemerintah mendorong penerapan ISO secara bertahap dan proporsional, sejalan dengan kemampuan pelaku usaha.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang menegaskan bahwa standardisasi bertujuan meningkatkan mutu, efisiensi produksi, daya saing, serta perlindungan konsumen dan pelaku usaha.

Dari Usaha Mikro Menuju Usaha Berdaya Saing

ISO bukan tujuan akhir, melainkan alat transformasi usaha. Bagi UMKM peternakan, ISO membantu :

- menata manajemen usaha,
- menjaga mutu produk secara konsisten,
- membuka peluang kemitraan dan ekspor,
- memperkuat keberlanjutan usaha.

Dengan dukungan pembinaan pemerintah dan komitmen pelaku usaha, ISO menjadi jembatan menuju usaha peternakan yang tangguh dan terpercaya.

ISO Itu Tidak Rumit

Pada dasarnya, ISO mengajarkan kebiasaan baik yang sebenarnya sudah dilakukan peternak, seperti:

- menjaga kebersihan kandang dan tempat produksi,
- menyimpan alat dan bahan secara rapi,
- membuat catatan sederhana (jumlah ternak, panen, penjualan),
- mencatat masalah agar tidak terulang.

ISO is designed to help UMKM "level up" gradually, from traditional businesses into more organized, efficient, and professional ones. Some real benefits of implementing ISO include:

- increasing consumer and business partner trust,
- facilitating access to modern markets, government procurement, and exports,
- improving process efficiency and reducing waste,
- becoming the basis for fulfilling regulations and SNI.

ISO as a Guidance Tool, Not a Burden In national policy

ISO is positioned as an "instrument of guidance," not a burdensome obligation. The government encourages the implementation of ISO gradually and proportionally, in line with the capabilities of business actors.

This is consistent with Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, which affirms that standardization aims to improve quality, production efficiency, competitiveness, as well as protection for consumers and business actors.

From Micro Enterprises to Competitive Businesses

ISO is not the end goal, but a tool for business transformation. For livestock UMKM, ISO helps to:

- organize business management,
- maintain consistent product quality,
- open opportunities for partnerships and exports,
- strengthen business sustainability.

With government guidance support and business actor commitment, ISO becomes a bridge toward a resilient and trusted livestock business.

ISO Is Not Complicated

Basically, ISO teaches good habits that farmers already practice, such as:

- maintaining the cleanliness of pens and production areas,
- storing tools and materials neatly,
- making simple records (number of livestock, harvests, sales),
- recording problems so they do not recur.

Prinsip dasarnya sederhana:

“Tulislah Apa Yang Kamu Kerjakan. Kerjakan Apa Yang Kamu Tulis”

ISO dan SNI: Bukan Saingan, Tapi Pelengkap

ISO dan SNI memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin mutu, keamanan, dan kepercayaan pasar. Perbedaannya terletak pada lingkup dan pengakuan. ISO berlaku internasional, sedangkan SNI berlaku nasional dan disusun oleh BSN, sering kali dengan mengadopsi standar ISO yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Bagi peternak rakyat:

- ISO membantu membuka akses pasar besar dan ekspor,
- SNI membantu memenuhi regulasi dan kepercayaan pasar dalam negeri.

Penutup

ISO bukan sekadar sertifikat, melainkan cara kerja yang baik. Dengan kerja yang lebih rapi, produk menjadi lebih aman, usaha lebih dipercaya, dan peluang berkembang semakin terbuka.

Bagi peternak rakyat dan UMKM, memulai dari kebiasaan baik—bersih, rapi, dan tercatat—sudah merupakan langkah awal menuju ISO dan SNI.

The basic principle is simple:

“Write Down What You Do. Do What You Have Written”

ISO and SNI: Not Rivals, But Complementary

ISO and SNI have the same goal: ensuring quality, safety, and market trust. The difference lies in the scope and recognition. ISO applies internationally, while SNI applies nationally and is drafted by BSN, often by adopting ISO standards adapted to Indonesian conditions.

For smallholder farmers:

- ISO helps open access to large markets and exports,
- SNI helps meet regulations and domestic market trust.

Closing

ISO is not just a certificate, but a way of working well. By working more neatly, products become safer, businesses become more trusted, and opportunities to grow become wider.

For smallholder farmers and UMKM, starting from good habits—clean, neat, and recorded—is already the first step toward ISO and SNI.



Mengapa Harga Komoditas Peternakan Cenderung Naik?

Why Do Livestock Commodity Prices Tend to Rise?

Edy Pujiyanto, S.Pt, ME

(APHP Ahli Madya) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

Kenaikan harga telur ayam ras dan daging ayam potong pada minggu ke 1 bulan Oktober 2025 menjadi perhatian dalam rapat pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Mendagri.

Harga telur ayam ras dan daging ayam potong memiliki trend yang cenderung meningkat, harga rata-rata telur ditingkat nasional berkisar Rp 33.400,-/kg, sedangkan harga daging ayam potong berkisar Rp 40.300,-/kg, berada di atas Harga Acuan yang ditetapkan pemerintah.

Apa yang mempengaruhi kenaikan harga komoditas tersebut?

Dari sisi supply kenaikan harga didorong oleh meningkatnya biaya produksi seperti tingginya harga jagung ditingkat petani dan meningkatnya harga DOC. Harga jagung saat itu berkisar Rp 6.709,-/kg jauh diatas Harga Acuan yang ditetapkan sebesar Rp 5.800,-/kg, demikian juga dengan harga DOC telah mencapai Rp 9.000,- per ekor jauh di atas Harga Acuan yang ditetapkan sebesar Rp 5.500,- per ekor.

Sedangkan dari sisi demand kenaikan harga telur ayam ras dan daging ayam potong didorong oleh meningkatnya konsumsi untuk kebutuhan hajatan (catering) di masyarakat dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

The increase in prices for purebred chicken eggs and broiler meat in the 1st week of October 2025 became a focus in the inflation control meeting led by the Minister of Home Affairs. The prices of purebred chicken eggs and broiler meat have an increasing trend; the national average price for eggs is around IDR 33,400/kg, while the price for broiler meat is around IDR 40,300/kg, both of which are above the Reference Price set by the government.

What influences the price increase of these commodities?

From the supply side, the price increase is driven by rising production costs, such as the high price of corn at the farmer level and the increasing price of DOC (Day Old Chicks). The price of corn at that time was around IDR 6,709/kg, far above the Reference Price set at IDR 5,800/kg; similarly, the price of DOC reached IDR 9,000 per bird, far above the Reference Price set at IDR 5,500 per bird.

Meanwhile, from the demand side, the increase in prices for purebred chicken eggs and broiler meat is driven by increased consumption for celebration needs (catering) in the community and the Nutritious Free Meal (MBG) program.

Selain faktor supply dan demand, kenaikan harga juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga ayam potong di tingkat peternak pada bulan Mei 2025 yang lalu. Ketika itu harga livebird di tingkat peternak 'jatuh' sampai Rp 16.000,-/kg jauh di bawah Harga Acuan yang ditetapkan sebesar Rp 22.000 -Rp 24.000,-/kg. Untuk menstabilkan harga, kebijakan di sisi hulu yang diambil oleh pemerintah saat itu adalah dengan pemusnahan telur (Cutting Hatching Egg) dan afkir dini Parent Stock ayam potong.

Dalam jangka pendek kebijakan pemerintah di aspek hulu dengan Cutting Hatching Egg dan afkir dini Parent Stock mampu mendorong kenaikan harga ayam potong di tingkat peternak, namun dibutuhkan kehati-hatian terkait jumlah/volumenya yang akan berpengaruh terhadap ketersediaan supply di tingkat konsumen.

Mengapa?

Karena elastisitas penawaran ayam potong (livebird) bersifat inelastis, artinya peternak selaku produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat ketika terjadi perubahan harga. Jika terjadi kenaikan harga livebird di pasar maka dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk memenuhi kebutuhan pasar, dimulai dari penetasan telur di breeding farm sampai usaha budidaya di tingkat farm untuk menstabilkan harga.



Besides supply and demand factors, the price increase is also influenced by government policies to stabilize broiler prices at the farmer level back in May 2025. At that time, the price of livebirds at the farmer level "fell" to IDR 16,000/kg, far below the Reference Price set at IDR 22,000 - IDR 24,000/kg. To stabilize prices, the upstream policy taken by the government at that time was the destruction of eggs (Cutting Hatching Eggs) and the early culling of broiler Parent Stock.

In the short term, government policies in the upstream sector with Cutting Hatching Eggs and early culling of Parent Stock were able to drive up broiler prices at the farmer level, but caution is needed regarding the quantity/volume as it will affect supply availability at the consumer level.

Why?

Because the price elasticity of broiler supply (livebird) is inelastic, meaning that farmers as producers are unable to provide a quick response when price changes occur. If an increase in livebird prices occurs in the market, it takes about 2 months to meet market needs, starting from egg hatching at the breeding farm to cultivation at the farm level to stabilize prices.



Apakah Harga Daging Ayam di Konsumen Sudah Mengkhawatirkan?

Are Chicken Prices Already a Cause for Concern Among Consumers?

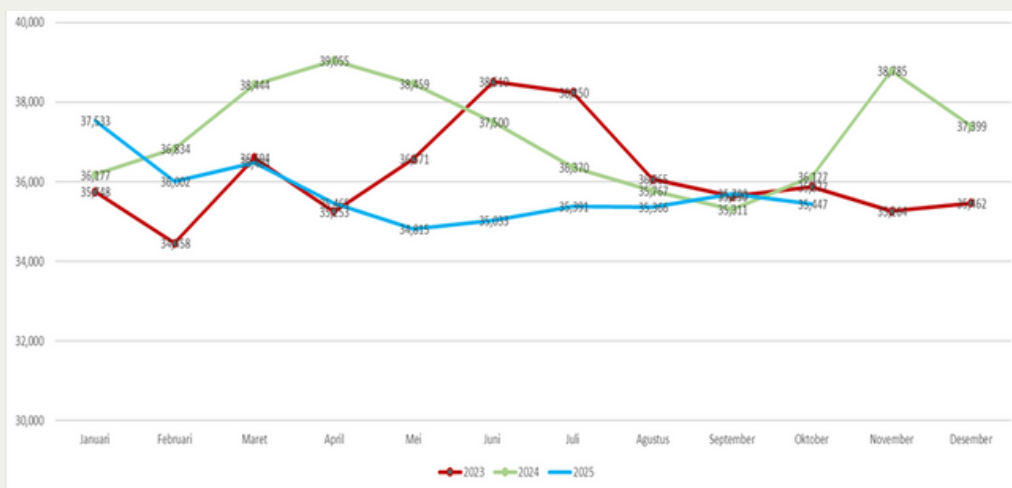


M. Imron Fuadi, S. Pt, MP
(APHP Ahli Madya)

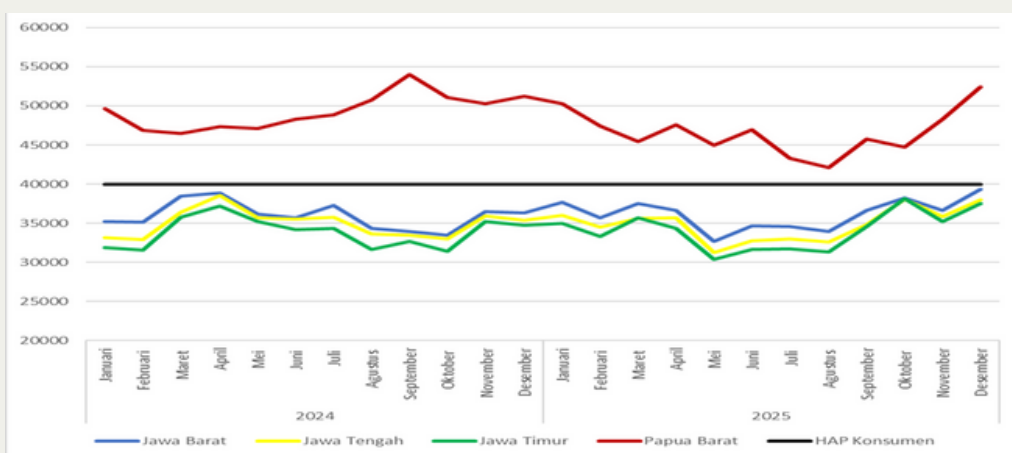
Daging ayam ras merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat strategis di Indonesia, baik dari perspektif konsumsi masyarakat, stabilitas harga pangan nasional, maupun keberlanjutan sektor usaha budidaya unggas. Sebagai sumber protein hewani yang paling terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat, komoditas ini memainkan peran sentral dalam upaya pemerintah meningkatkan kecukupan gizi dan perbaikan kualitas konsumsi rumah tangga. Dengan kontribusi mencapai lebih dari 60% total konsumsi protein hewani nasional, daging ayam bukan hanya menjadi bahan pangan pokok, tetapi juga indikator penting yang mencerminkan keseimbangan antara ketersediaan, keterjangkauan, dan efisiensi pasar pangan nasional. Kondisi harga daging ayam di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain pasokan DOC (Day-old Chick), perubahan harga DOC, mortalitas, dan kualitas bibit mempengaruhi performa pertumbuhan dan FCR, selanjutnya permintaan Musiman, hari-hari besar keagamaan, tahun baru, dan libur panjang memicu kenaikan permintaan jangka pendek. Faktor lainnya adalah Logistik dan Distribusi, dimana biaya transportasi serta akses ke RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas) menentukan perbedaan harga antardaerah. Yang tak kalah penting, adalah pengaruh pergerakan harga jagung sebagai bahan baku pakan yang sebagian masih bergantung pada impor.

Chicken meat is one of the most strategic food commodities in Indonesia, both from the perspective of public consumption, national food price stability, and the sustainability of the poultry farming sector. As the most affordable and accessible source of animal protein for the public, this commodity plays a central role in the government's efforts to improve nutritional adequacy and the quality of household consumption. Contributing to more than 60% of total national animal protein consumption, chicken meat is not only a staple food but also an important indicator that reflects the balance between availability, affordability, and efficiency of the national food market. The price of chicken meat in Indonesia is influenced by many factors, including the supply of DOC (Day-old Chick), changes in DOC prices, mortality, and seed quality affecting growth performance and FCR, as well as seasonal demand, religious holidays, New Year, and long holidays triggering short-term increases in demand. Another factor is logistics and distribution, where transportation costs and access to poultry slaughterhouses determine price differences between regions. Equally important is the influence of corn price movements as a feed ingredient, which is still partly dependent on imports.

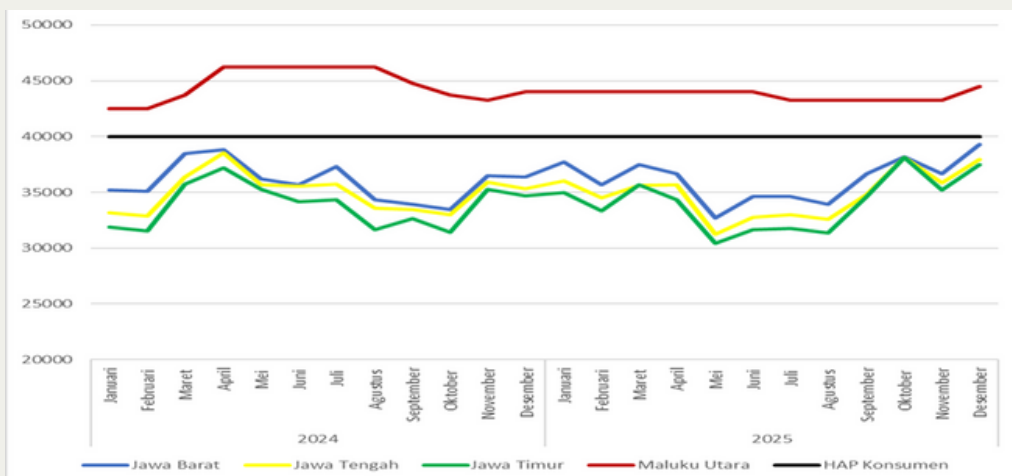
Grafik 1. Harga Daging Ayam Nasional Tahun 2023 - 2025



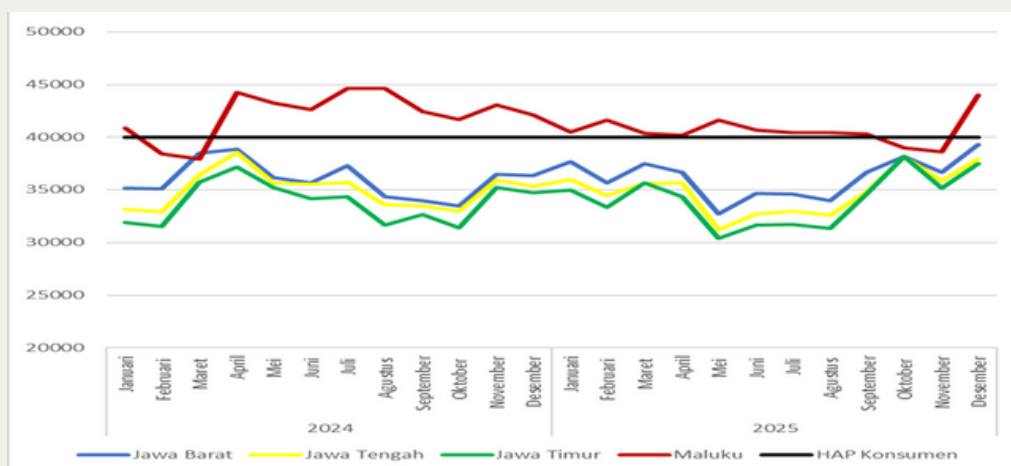
Grafik 2. Harga Daging Ayam di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua Barat



Grafik 3. Harga Daging Ayam di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Maluku Utara



Grafik 4. Harga Daging Ayam di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Maluku



Dalam upaya menjaga stabilitas harga daging ayam ras, pemerintah menerapkan instrumen kebijakan penetapan Harga Acuan Penjualan (HAP) untuk melindungi konsumen dan memastikan produsen tetap memperoleh margin usaha yang wajar. Instrumen ini menjadi pegangan bagi intervensi pasar seperti operasi pasar, penyaluran pasokan dari BUMN Pangan, atau langkah-langkah stabilisasi lainnya.

Industri ayam pedaging (broiler) memiliki karakteristik struktur yang kompleks dan terintegrasi. Di satu sisi terdapat peternakan rakyat dan kemitraan, sementara di sisi lain perusahaan integrator besar mengelola hulu-hilir mulai dari pembibitan GPS-PS, pakan, penyediaan DOC, hingga distribusi produk olahan.

Kompleksitas ini menciptakan dinamika pasar yang sensitif terhadap perubahan biaya produksi, fluktuasi permintaan musiman, serta kebijakan pemerintah. Karena rantai pasokan yang panjang, perubahan harga pada satu simpul baik pakan, DOC, obat hewan, energi, maupun biaya logistik dapat berdampak langsung pada biaya produksi dan harga jual di tingkat konsumen.

Harga Acuan Penjualan (HAP) merupakan instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman harga komoditas pangan strategis pada tingkat produsen dan konsumen. Untuk komoditas daging ayam ras, HAP memiliki dua fungsi utama:

In an effort to maintain the stability of broiler chicken prices, the government has implemented a policy instrument known as the Reference Selling Price (HAP) to protect consumers and ensure that producers continue to earn reasonable profit margins. This instrument serves as a guideline for market interventions such as market operations, supply distribution from state-owned food companies, or other stabilization measures.

The broiler chicken industry has a complex and integrated structure. On the one hand, there are smallholder farms and partnerships, while on the other hand, large integrator companies manage the upstream and downstream processes, from GPS-PS breeding, feed, DOC supply, to the distribution of processed products.

This complexity creates market dynamics that are sensitive to changes in production costs, seasonal fluctuations in demand, and government policies. Due to the long supply chain, price changes at any point, whether in feed, DOC, veterinary drugs, energy, or logistics costs, can have a direct impact on production costs and consumer prices.

The Reference Selling Price (HAP) is a policy instrument established by the government as a guideline for the price of strategic food commodities at the producer and consumer levels. For broiler chicken meat commodities, the HAP has two main functions:

- Melindungi produsen, khususnya peternak rakyat, agar tidak mengalami kerugian ketika harga livebird turun di bawah biaya produksi.
- Melindungi konsumen, terutama rumah tangga berpendapatan rendah, dari kenaikan harga yang melampaui kewajaran dan berpotensi memicu inflasi pangan.

Dengan demikian, HAP berfungsi sebagai “koridor harga” yang bertujuan menjaga keseimbangan antara efisiensi rantai pasok dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Regulasi HAP dituangkan dalam beberapa Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas), termasuk revisi aturan tahun 2022–2024 yang mempertegas mekanisme stabilisasi harga, ruang intervensi pemerintah, serta kriteria pelaksanaan operasi pasar. Regulasi ini menjadi landasan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, Bulog, dan pelaku usaha industri perunggasan.

- Protecting producers, especially smallholder farmers, from suffering losses when live bird prices fall below production costs.
- Protecting consumers, especially low-income households, from price increases that exceed reasonable levels and have the potential to trigger food inflation.

Thus, HAP functions as a “price corridor” that aims to maintain a balance between supply chain efficiency and affordability for the community. HAP regulations are outlined in several National Food Agency (Bapanas) regulations, including the 2022–2024 revision, which clarifies the price stabilization mechanism, the scope of government intervention, and the criteria for market operations. These regulations form the basis for coordination between the Ministry of Agriculture, the Ministry of Trade, local governments, Bulog, and poultry industry players.

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS

No	Komoditas		Harga Acuan Pembelian di Produsen (Rp/ Kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/ Kg)
1	Jagung Pipilan Kering*			
	- Kadar Air 15%		5.000	5.800
	- Kadar Air 20%		4.725	-
	- Kadar Air 25%		4.450	-
	- Kadar Air 30%		4.200	-
2	a. Telur Ayam Ras		26.500	30.000
	b. Bibit <i>Day Old Chick (DOC) Layer</i>	batas bawah	-	9.000/ekor
		batas atas	-	11.000/ekor
	c. Bibit <i>Pullet/ Ayam Remaja</i> (17 minggu)		-	80.000/ekor
3	a. Daging Ayam Ras**		25.000	40.000
	b. Bibit <i>Day Old Chick (DOC) Broiler**</i>	batas bawah	-	6.500/ekor
		batas atas	-	7.000/ekor

Faktor-faktor yang memengaruhi dinamika harga

a. Biaya Pakan

Pakan menyumbang 60–70% biaya produksi ayam pedaging. Kenaikan harga jagung dan kedelai secara langsung meningkatkan biaya pokok produksi.

b. Pasokan DOC (Day-old Chick)

Perubahan harga DOC, mortalitas, dan kualitas bibit mempengaruhi performa pertumbuhan dan FCR, sehingga memengaruhi harga livebird.

Factors influencing price dynamics

a. Feed Costs

Feed accounts for 60–70% of broiler production costs. Increases in corn and soybean prices directly increase production costs.

b. DOC Supply (Day-old Chick)

Changes in DOC prices, mortality, and seed quality affect growth performance and FCR, thereby affecting livebird prices.

c. Permintaan Musiman

Hari-hari besar keagamaan, tahun baru, dan libur panjang memicu kenaikan permintaan jangka pendek.

d. Logistik dan Distribusi

Biaya transportasi serta akses ke RPHU (Rumah Potong Hewan Unggas) menentukan perbedaan harga antardaerah.

e. Kebijakan Pemerintah

Program MBG, Penyesuaian HAP, operasi pasar, penyaluran cadangan pangan, dan distribusi ayam beku pemerintah berpengaruh terhadap stabilitas harga.

Apakah Kondisi Harga Saat Ini Mengkhawatirkan?

Berdasarkan data yang diolah oleh Dithilirnak, harga daging ayam tahun 2023 - 2025, menunjukkan bahwa harga eceran daging ayam secara nasional masih berada di bawah HAP Rp 40.000/kg. Dengan demikian, dari sudut pandang keterjangkauan konsumsi, tidak terlihat indikasi kedaruratan harga meskipun ada kecenderungan kenaikan menuju HAP. Harga nasional stabil dan masih di bawah HAP seperti tertera pada gambar grafik 1 tersebut diatas.

Berdasarkan data harga ayam tahun 2024 - 2025, gejolak harga yang mengarah pada situasi “mengkhawatirkan” adalah untuk Wilayah Timur Indonesia yaitu provinsi Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Harga untuk ketiga wilayah tersebut telah melampaui HAP sebesar Rp. 5.000,- sd Rp. 10.000,- sehingga perlu dilakukan langkah-langkah intervensi terutama subsidi distribusi dan gerakan operasi pasar.

c. Seasonal Demand

Religious holidays, New Year's, and long weekends trigger short-term increases in demand.

d. Logistics and Distribution

Transportation costs and access to poultry slaughterhouses determine price differences between regions.

e. Government Policy

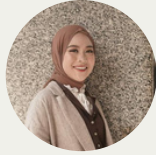
The MBG program, HAP adjustments, market operations, food reserve distribution, and government frozen chicken distribution have an impact on price stability.

Are Current Price Conditions Worrying?

Based on data processed by Dithilirnak, chicken meat prices for 2023-2025 show that the national retail price of chicken meat is still below the HAP of Rp 40,000/kg. Thus, from the perspective of affordability, there are no indications of a price emergency despite the upward trend towards the HAP. National prices are stable and still below the HAP, as shown in graph 1 above.

Based on chicken price data for 2024-2025, price fluctuations that point to an “alarming” situation are occurring in Eastern Indonesia, namely in the provinces of West Papua, Maluku, and North Maluku. Prices in these three regions have exceeded the HAP by Rp. 5,000 to Rp. 10,000, necessitating intervention measures, particularly distribution subsidies and market operations.

Slow Living, Smart Farming



Gravita Puji Lestari, S.Pt

Penelaah Teknis Kebijakan

Di tengah meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan akan pangan sehat, konsep integrated farming kembali menarik perhatian, terutama di kawasan perumahan.

Pendekatan ini bukan sekadar tren urban farming, melainkan sistem terpadu yang menghubungkan peternakan ayam, pengelolaan limbah organik, dan budidaya tanaman dalam satu siklus yang saling mendukung.

Pada skala rumah tangga, ayam menjadi komponen yang relatif mudah diadopsi. Ukurannya kecil, kebutuhan pakannya realistis, dan hasilnya—baik telur maupun daging—secara nyata membantu ketahanan pangan keluarga. Dengan pengelolaan yang tepat, peternakan ayam rumahan dapat berkembang menjadi ekosistem mini yang efisien sekaligus ramah lingkungan.

Pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah beternak ayam memungkinkan dilakukan di lingkungan perumahan yang padat. Jawabannya: sangat mungkin, asalkan didukung manajemen kandang yang baik, pengendalian bau, serta desain sistem yang terintegrasi.

Beternak Ayam di Perumahan Padat: Dari Tantangan Menjadi Peluang

Kekhawatiran utama masyarakat terhadap peternakan ayam rumahan umumnya berkaitan dengan bau dan kebisingan. Namun, dengan penerapan teknologi sederhana dan manajemen yang tepat, aktivitas beternak dapat dilakukan secara bersih, tenang, dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Amid rising living costs and the growing need for healthy food, the concept of integrated farming is once again gaining attention, particularly in residential areas.

This approach is not merely an urban farming trend, but an integrated system that connects poultry keeping, organic waste management, and crop cultivation in a single, mutually supportive cycle.

At the household scale, chickens are a relatively easy component to adopt. Their small size, realistic feed requirements, and outputs—both eggs and meat—tangibly contribute to household food security. With proper management, backyard chicken keeping can develop into an efficient and environmentally friendly mini ecosystem.

A question that often arises is whether raising chickens is feasible in densely populated residential environments. The answer is: very much so, provided it is supported by good coop management, effective odour control, and well designed integrated systems.

Raising Chickens in Densely Populated Residential Areas: From Challenge to Opportunity

The main public concerns regarding backyard chicken keeping generally relate to odour and noise. However, with the application of simple technologies and proper management, poultry raising can be carried out in a clean, quiet manner that does not disturb the surrounding environment.

- Desain Kandang yang Efisien

Kandang semi tertutup berskala kecil dapat dibuat dari rangka kayu atau besi, dilengkapi dinding jaring halus dan penutup sebagian menggunakan terpal. Sirkulasi udara tetap terjaga, sementara penyebaran bau dan debu dapat diminimalkan. Ukuran kandang sekitar 1 × 1,5 meter sudah cukup untuk memelihara 8–10 ekor ayam petelur.

- Pengelolaan Lantai Kandang (Deep Litter System)

Lantai kandang dilapisi serbuk gergaji atau sekam padi setebal 10–15 cm, kemudian difermentasi menggunakan probiotik. Sistem ini efektif menekan bau amonia, mengurangi lalat, serta menghasilkan media litter yang dapat diolah menjadi kompos berkualitas.

- Pakan Fermentasi untuk Mengurangi Bau

Pemberian pakan fermentasi membantu meningkatkan pencernaan ayam sehingga kotoran menjadi tidak menyengat. Selain itu, metode ini berpotensi menurunkan biaya pakan hingga 10–20 persen.

- Penempatan dan Kebersihan Kandang

Kandang sebaiknya ditempatkan di area yang tidak berbatasan langsung dengan rumah tetangga, seperti sudut belakang atau samping rumah. Kebersihan rutin dengan pemisahan kotoran padat dan proses fermentasi kompos mampu menghilangkan bau dalam waktu relatif singkat.

Ayam dalam Sistem Terintegrasi

Dalam konsep integrated farming, setiap komponen saling terhubung dalam satu siklus.

- Kotoran ayam → kompos tanaman

Setelah difermentasi, kotoran kaya nitrogen ini menjadi pupuk organik ideal untuk sayuran seperti kangkung, cabai, tomat, atau tanaman obat keluarga.

- Sisa dapur → pakan tambahan ayam

Sisa sayur, kulit buah, dan nasi dingin dapat difermentasi menjadi pakan tambahan yang sehat dan tidak berbau.

- Tanaman → Penyaring udara alami kandang

Menanam serai wangi, mint, atau lemongrass di sekitar kandang membantu menetralkan bau dan mengusir serangga.

- Efficient Coop Design

A small scale semi enclosed coop can be built using a wooden or metal frame, fitted with fine mesh walls and partially covered with tarpaulin. This design maintains good air circulation while minimising the spread of odour and dust. A coop measuring approximately 1 × 1.5 metres is sufficient to house 8–10 laying hens.

- Coop Floor Management (Deep Litter System)

The coop floor is layered with sawdust or rice husks to a thickness of 10–15 cm, then fermented using probiotics. This system is effective in suppressing ammonia odours, reducing flies, and producing litter material that can be processed into high quality compost.

- Fermented Feed to Reduce Odour

Providing fermented feed helps improve the chickens' digestion, resulting in manure with less offensive odour. In addition, this method has the potential to reduce feed costs by 10–20 per cent.

- Coop Placement and Hygiene

The coop should be placed in an area that does not directly border neighbouring houses, such as the back or side of the home. Routine cleanliness, combined with the separation of solid waste and compost fermentation processes, can eliminate odour within a relatively short time.

Chickens in an Integrated System

Within the integrated farming concept, each component is interconnected in a single cycle.

- Chicken Manure → Plant Compost

After fermentation, this nitrogen-rich manure becomes an ideal organic fertilizer for vegetables such as water spinach, chili, tomatoes, or medicinal herbs.

• Kitchen Waste → Supplementary Chicken Feed
Vegetable scraps, fruit peels, and leftover rice can be fermented into healthy, odour-free supplementary feed for chickens.

- Plants → Natural Air Filter for the Coop

Growing lemongrass, mint, or citronella around the coop helps neutralise odours and repel insects.

- Kompos Tanaman → Penyubur Kebun Rumah

Siklus ini menutup lingkaran, menciptakan rumah yang produktif, bukan hanya konsumtif.

Siklus ini menciptakan rumah yang produktif, bukan sekadar konsumtif, sekaligus memperkuat prinsip ekonomi sirkular di tingkat rumah tangga.

Membangun Ketahanan Pangan dari Lingkungan Rumah

Ketika satu rumah mampu menghasilkan telur 4–8 butir per hari, menanam sayuran untuk konsumsi keluarga, dan mengelola limbah dapur agar tidak terbuang percuma, maka ketahanan pangan bukan lagi konsep besar—melainkan praktik sehari-hari. Integrated farming memungkinkan keluarga di perumahan padat sekalipun untuk berdaulat atas sumber pangannya.

Dan yang terpenting, pendekatan ini mengubah persepsi: beternak ayam di kota bukan lagi kegiatan kumuh, melainkan kegiatan modern, efisien, dan bernilai ekologis. Di halaman kecil yang dikelola dengan cerdas, keluarga dapat menghadirkan ketenangan, kemandirian, dan bahkan sedikit kearifan “slow living” yang lama hilang dari ritme perkotaan.

Selain memperkuat ketahanan pangan keluarga, beternak ayam skala rumah tangga juga menghadirkan nilai ekonomis yang nyata. Dalam skema sederhana 10 ekor ayam petelur, satu rumah tangga dapat menghasilkan rata-rata 6–8 butir telur per hari. Jika diasumsikan harga telur rumah tangga berkisar Rp2.000–Rp2.500 per butir, maka potensi pendapatan kotor bisa mencapai Rp360.000–Rp600.000 per bulan hanya dari telur.

Tidak berhenti di situ, limbah ternak juga memiliki nilai jual. Kotoran ayam yang telah difermentasi dapat dikemas menjadi pupuk kompos organik dan dijual ke komunitas urban farming atau tetangga sekitar. Dengan skala kecil, hasil kompos bisa mencapai 20–30 kg per bulan, dengan harga jual rata-rata Rp1.000–Rp2.000 per kg.

Artinya, peternakan ayam rumahan bukan semata aktivitas subsisten, tetapi perlahan bisa berkembang menjadi sumber pemasukan tambahan yang stabil untuk kebutuhan rumah tangga.

- Plant Compost → Enriching the Home Garden

This cycle closes the loop, creating a productive household rather than a purely consumptive one.

It simultaneously reinforces the principles of a circular economy at the household level.

Building Food Security from the Home Environment

When a single household can produce 4–8 eggs per day, grow vegetables for family consumption, and manage kitchen waste so it isn’t wasted, food security is no longer just a big concept—it becomes a daily practice. Integrated farming enables families, even in densely populated residential areas, to be sovereign over their food sources.

Most importantly, this approach changes perceptions: raising chickens in the city is no longer seen as a shabby activity, but as a modern, efficient, and ecologically valuable practice. In a small yard managed intelligently, families can cultivate calm, self-sufficiency, and even a touch of the “slow living” wisdom that urban life often erases.

Beyond strengthening household food security, backyard chicken keeping also brings tangible economic value. In a simple scheme of 10 laying hens, one household can produce an average of 6–8 eggs per day. Assuming household egg prices range from Rp2,000–Rp2,500 per egg, the potential gross income could reach Rp360,000–Rp600,000 per month from eggs alone.

It doesn’t stop there—poultry waste also has market value. Fermented chicken manure can be packaged as organic compost and sold to urban farming communities or neighbours. At a small scale, compost production can reach 20–30 kg per month, with an average selling price of Rp1,000–Rp2,000 per kg.

This means that backyard chicken farming is not merely a subsistence activity; over time, it can develop into a stable source of additional income to support household needs.

Modal Realistis untuk Memulai

Untuk memulai beternak ayam skala rumah tangga (± 10 ekor), modal yang dibutuhkan relatif terjangkau. Pembuatan kandang dan perlengkapan dasar berkisar Rp500 ribu–Rp1 juta. Dengan tambahan biaya pembelian ayam siap bertelur, total investasi awal berada pada kisaran Rp1,2 juta–Rp1,8 juta.

Biaya operasional bulanan, termasuk pakan dan perawatan, berkisar Rp300 ribu–Rp400 ribu. Dengan manajemen yang baik, usaha kecil ini umumnya mulai menutup modal dalam waktu 4–8 bulan.

Di tengah keterbatasan ruang dan dinamika kehidupan perkotaan, integrated farming menawarkan alternatif gaya hidup yang lebih pelan namun bermakna. Dari kandang kecil di sudut rumah dan kebun sederhana yang dikelola dengan cermat, ketahanan pangan keluarga dapat tumbuh — hari ini dan untuk masa depan.

Realistic Capital to Get Started

To start a small-scale household chicken farm (around 10 hens), the required capital is relatively affordable. Building the coop and basic equipment costs around Rp500,000–Rp1,000,000. With the additional expense of purchasing ready-to-lay hens, the total initial investment ranges from approximately Rp1.2 million to Rp1.8 million.

Monthly operational costs, including feed and maintenance, range from Rp300,000–Rp400,000. With proper management, this small-scale venture typically begins to recoup its investment within 4–8 months.

Amid limited space and the dynamics of urban life, integrated farming offers an alternative lifestyle that is slower yet meaningful. From a small coop tucked in a corner of the home and a carefully managed simple garden, household food security can grow—today and for the future.



LAMIRAPE OL SHOP



Kabupaten Bone

Sulawesi Selatan

Membanjirnya banyak toko modern yang berjejaring media sosial, masih belum sepenuhnya termanfaatkan di sektor peternakan.

Sektor peternakan sebagian masih menggunakan cara konvensional untuk pemasaran produknya, dan sebagian belum memanfaatkan media digitalisasi. Hal tersebut di berbagai daerah disikapi beragam oleh masing-masing Pemda. Di Kabupaten Bone, untuk memberdayakan usaha kecil, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu kelompok tani ternak, Pemkab khususnya Dinas Peternakan Kabupaten Bone membentuk Layanan Milik Peternak Rakyat, yaitu Ol Shop untuk memberdayakan Kelompok Tani sektor pertanian/peternakan (UMKM). Sebagai salah satu inovasi, sesuai dengan visi misi Bupati Bone Bone Yang Mandiri, Berkeadilan dan Berkelanjutan. Ol Shop sebagai solusi alternatif yang sejalan dengan fokus pembangunan kabupaten Bone yang Mandiri, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Pasokan dan penjualan produk-produk lokal Kelompok Tani disektor Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bone 100 % dari barang usaha milik rakyat yang berasal dari hasil binaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri dan status pemasok dari produk lokal juga di Layanan Milik Rakyat Peternakan Ol Shop seperti Ayam Kampung, Ayam Buras, Telur Asin Aneka Rasa, Telur Asap, Pupuk,, Mesin Tetras, Nugget, Bakso dan banyak lainnya. Diharapkan dengan sistem ini, produk-produk lokal yang bermutu terangkat dan layak dijual dalam pangsa pasar modern bukan hanya di toko-toko tapi dilayanan www.Lamirape.com yang baru saja dibentuk.

The proliferation of modern stores with social media networks has not yet been fully utilised in the livestock sector.

In many areas, livestock businesses still rely partly on conventional methods to market their products, and some have not yet embraced digital platforms. Local governments (Pemda) have responded to this situation in various ways. In Bone Regency, to empower micro, small, and medium enterprises (MSMEs), particularly livestock farmer groups, the Regency Government, through the Bone Regency Livestock Service, established the People's Livestock Service (Layanan Milik Peternak Rakyat)—an online shop aimed at empowering farmer groups in the agriculture and livestock sectors. This initiative aligns with the regent's vision and mission of a Self-Reliant, Fair, and Sustainable Bone. The online shop serves as an alternative solution that supports Bone Regency's development focus on independence, equity, and sustainability.

The supply and sales of local products from farmer groups in the agriculture and livestock sectors of Bone Regency come 100% from community-owned businesses fostered by the Regency Livestock and Animal Health Service. The local products available through the People's Livestock Service online shop include native chickens, buras chickens, various types of salted eggs, smoked eggs, fertiliser, incubators, nuggets, meatballs, and many more.

This system is expected to elevate high-quality local products, making them suitable for sale in modern markets—not only in stores but also through the newly established platform www.Lamirape.com.

Selain memberikan kesempatan produk lokal dari Kelompok Tani/ Ternak untuk bisa sejajar penjualannya di dalam toko modern serta layanan berjejaring sosial lainnya, tentunya kedepan diharapkan adanya kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sektor peternakan. Sehingga bisa memberikan fasilitasi berupa pelatihan, pendampingan dan juga bantuan alat serta pengemasan untuk Kelompok Tani/ Ternak lokal yang ada di Kabupaten Bone.

Tahapan inovasi / penggunaan produk / spesifikasi produk

A. Pelaksanaan Persiapan

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu kegiatan besar, seperti mengaplikasikan LAMIRAPE ONLINE SHOP. Kegiatan utama dalam perencanaan adalah menyiapkan perangkat lunak seperti penyusunan pedoman, identifikasi lokasi, penyiapan SDM untuk melakukan koordinasi, dan merencanakan penganggarannya.

B. Pembentukan

1) Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone melaksanakan penyuluhan peternakan di setiap kelompok binaan dan membentuk kerjasama untuk mengawal dan mendampingi Lamirape Online Shop di wilayah calon Lamirape Online Shop yang akan di bina. Adapun peserta sosialisasi adalah kelompok peternak yang tergabung dalam Lamirape Online Shop.

2) Peternak yang bergabung di Lamirape Online Shop adalah peternak (baik individu maupun kelompok) yang bersedia mematuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratan yang dimaksud, adalah:

1. Memiliki Kelompok Ternak
2. Bersedia menjadi anggota Lamirape Online Shop
3. Bersedia untuk mengelola ternaknya dalam satu manajemen
4. Melakukan pencatatan secara teratur dalam produk peternakan
5. Bersedia bergabung dalam satu pintu bisnis bersama

In addition to providing opportunities for local farmer and livestock groups to sell on par with modern retailers and social media networks, the initiative is expected to expand future collaborations with other stakeholders in the livestock sector. This could include facilitation in the form of training, mentoring, and support with equipment and packaging for local farmer and livestock groups in Bone Regency.

Stages of Innovation / Product Use / Product Specifications

A. Implementation Preparation

1). Planning

Planning is a crucial step when carrying out a major activity, such as implementing the LAMIRAPE ONLINE SHOP. Key activities in this stage include preparing software tools, drafting guidelines, identifying suitable locations, preparing human resources for coordination, and planning the budget.

B. Formation

1). Socialisation and outreach are carried out by the local government, specifically the Bone Regency Livestock and Animal Health Service, which provides livestock extension services to each assisted group and establishes partnerships to support and guide the Lamirape Online Shop in prospective areas. Participants in the socialisation activities include livestock groups that will join Lamirape Online Shop.

2). Farmers joining Lamirape Online Shop—whether as individuals or groups—must agree to comply with the specified requirements, which include:

1. Having a livestock group
2. Willingness to become a member of Lamirape Online Shop
3. Willingness to manage their livestock under a unified management system
4. Keeping regular records of livestock products
5. Willingness to participate in a joint business platform

C. Tujuan

Tujuan Lamirape Online Shop adalah terselenggaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesempatan kerja yang bersifat online disertai bantuan dan penguatan kepada Kelompok Tani/ Ternak melalui program kemitraan dan terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bone yang Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, sehingga mewujudkan usaha peternakan berbasis online secara kolektif dan dikelola dalam satu manajemen yang disebut Lamirape Online Shop. Dengan hadirnya inovasi La'Mirape Online Shop melalui strategi Inovasi Layanan Milik Peternak Rakyat, diharapkan mampu merubah perilaku para petani peternak secara signifikan sehingga menjadikan para petani ternak yang berdaya saing serta mampu meningkatkan pendapatan peternak melalui penjualan sistem online.

C. Purpose

The aim of Lamirape Online Shop is to enable community economic empowerment and create online work opportunities, accompanied by assistance and support for farmer/livestock groups through partnership programs. It also seeks to realise the vision and mission of Bone Regency: Self-Reliant, Fair, and Sustainable.

The initiative establishes a collectively managed online livestock business under a single management system, called Lamirape Online Shop. With the innovation of La'Mirape Online Shop, through the People's Livestock Service Innovation Strategy, it is expected to significantly change farmers' behaviour, making them more competitive and increasing farmers' income through online sales.



Kilas Balik Kelompok Penerapan, Pengawasan, dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan

A Retrospective on the Group for Implementation, Supervision, and Quality Certification of Livestock Products



Muhammad Muhaimin Marta



Tutty Alawiyah

Peningkatan mutu hasil peternakan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan subsektor peternakan nasional.

Amanat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang menegaskan peran Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan dalam penjaminan mutu produk peternakan, baik pangan maupun nonpangan. Penugasan ini sebelumnya berada pada kelompok pengolahan hasil peternakan. Sejalan dengan dinamika organisasi, melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103 Tahun 2025, tugas tersebut secara resmi dilaksanakan oleh Kelompok Penerapan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan. Kelompok ini menjadi ujung tombak dalam memastikan mutu produk peternakan siap edar memenuhi standar yang ditetapkan.

Menjawab Target RPJMN 2025–2029

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan 100 persen produk peternakan siap edar memenuhi persyaratan mutu sejak tahun 2025 hingga 2029. Pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Kelompok Penerapan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan di lingkungan Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan. Sebagai langkah strategis, kelompok ini menyusun Petunjuk Teknis Pedoman Pendampingan Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Peternakan sebagai acuan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat pusat dan daerah.

Enhancing the quality of livestock products is a key pillar in the development of Indonesia's national livestock subsector.

This mandate is outlined in Minister of Agriculture Regulation No. 25 of 2023 on Increasing Added Value, Strengthening Competitiveness, and Marketing Livestock Products, which affirms the role of the Livestock Downstreaming Directorate in ensuring the quality of both food and non-food livestock products. Previously, this responsibility was managed by the Livestock Product Processing Group. In line with organisational dynamics, through Minister of Agriculture Decree No. 103 of 2025, these responsibilities were officially assigned to the Group for Implementation, Supervision, and Quality Certification of Livestock Products. This group serves as the frontline in ensuring that livestock products meet the required standards before entering the market.

Meeting RPJMN 2025–2029 Targets

Under the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), the government aims for 100 percent of market-ready livestock products to meet quality requirements from 2025 onward. Achieving this target is the responsibility of the Group for Implementation, Supervision, and Quality Certification of Livestock Products within the Livestock Downstreaming Directorate. As a strategic measure, the group developed the Technical Guidelines for the Implementation and Supervision of Livestock Product Quality as a reference for quality assurance at both central and regional levels.

Memperkuat Rantai Pasok Susu Nasional

Pendampingan serap susu koperasi dilaksanakan sebagai upaya memperkuat rantai pasok susu nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Kegiatan ini difokuskan pada fasilitasi penyerapan susu segar oleh koperasi, peningkatan penerapan standar mutu di tingkat hulu, serta penyesuaian mutu susu dengan kebutuhan industri dan program pemerintah. Melalui pendampingan ini, koperasi didorong untuk memperkuat tata kelola mutu, kepemilikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta kesiapan pemenuhan persyaratan pengolahan dan distribusi susu.

Momentum Hari Susu Nusantara 2025

Peringatan Hari Susu Nusantara (HSN) 2025 pada 18 Juni 2025 di Kawasan Usaha Ternak Bogor, menjadi momentum strategis untuk mendorong peningkatan konsumsi dan produksi susu lokal. Mengusung tema “Susu Lokal untuk Generasi Sehat dan Cerdas” dan diinisiasi bersama oleh Kementerian Pertanian, Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), pelaku industri susu, serta koperasi peternak.

Berbagai aktivitas edukatif—mulai dari pembagian susu gratis, lomba mewarnai anak, hingga permainan bertema gizi—menjadi sarana kampanye pentingnya konsumsi susu sejak dini, sekaligus mendukung program strategis seperti P2SDN, School Milk Program, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Antusiasme masyarakat yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumsi susu sekaligus mendorong pertumbuhan industri susu nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Mendorong Hilirisasi Susu Organik

Penguatan susu organik nasional menjadi sorotan dalam Seminar Dairypedia pada ajang Indo Livestock 2025. Dengan tema “Sustainable Organic Milk Value Chain”, seminar ini mempertemukan pakar, koperasi peternak, pelaku industri, dan mitra internasional untuk membangun rantai nilai susu organik yang berkelanjutan.

Strengthening the National Milk Supply Chain

Assistance in cooperative milk procurement is implemented to strengthen the national milk supply chain while improving the welfare of smallholder farmers. This activity focuses on facilitating the absorption of fresh milk by cooperatives, improving upstream quality standards, and aligning milk quality with industrial and government program requirements. Through this support, cooperatives are encouraged to strengthen quality management, obtain Veterinary Control Numbers (NKV), and meet processing and distribution requirements.

Momentum of Indonesian Milk Day 2025

The commemoration of Indonesian Milk Day (HSN) 2025 on 18 June 2025 at the Bogor Livestock Business Area served as a strategic momentum to boost local milk production and consumption. With the theme “Local Milk for Healthy and Smart Generations”, the event was initiated jointly by the Ministry of Agriculture, the Indonesian Dairy Processing Association (AIPS), the Indonesian Milk Cooperative Union (GKSI), the dairy industry, and farmer cooperatives.

Various educational activities—including free milk distribution, children’s colouring contests, and nutrition-themed games—served as campaigns to promote early milk consumption, while supporting strategic programs such as P2SDN, the School Milk Program, and the Free Nutritious Meal Program (MBG). High public enthusiasm is expected to increase awareness of milk consumption and promote inclusive, sustainable growth in the national dairy industry.

Promoting Organic Milk Downstreaming

The strengthening of national organic milk was highlighted at the Dairypedia Seminar during Indo Livestock 2025, under the theme “Sustainable Organic Milk Value Chain”. The seminar brought together experts, farmer cooperatives, industry actors, and international partners to build a sustainable organic milk value chain.

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara KPSP Setia Kawan dan Sweet Sundae sebagai offtaker susu organik, sekaligus rencana peluncuran es krim dan gelato organik pertama di Indonesia pada Agustus 2025—sebuah tonggak penting bagi hilirisasi susu organik nasional.

Belajar dari Denmark

Dalam kerangka Strategic Sector Cooperation (SSC) Indonesia–Denmark, workshop kerja sama internasional di Denmark menjadi sarana peningkatan kapasitas dan pembelajaran lintas negara. Indonesia memperoleh referensi penting terkait strategi komunikasi, pemasaran, kebijakan pendukung, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga riset dalam pengembangan susu organik.

Menjamin Mutu Susu untuk Program MBG

Sebagai dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan mengusulkan perbaikan parameter mutu susu kepada Badan Gizi Nasional, khususnya terkait kandungan kalsium dan komposisi susu segar. Langkah ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam memastikan manfaat gizi, keamanan, dan mutu produk peternakan bagi masyarakat.

Mendorong Ekonomi Sirkular dan Literasi Mutu

Pendampingan sertifikasi pupuk organik dilakukan untuk memperkuat sistem peternakan berkelanjutan dan penerapan ekonomi sirkular. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan sertifikasi, standar mutu, dan kepatuhan regulasi agar produk samping peternakan memiliki nilai tambah yang diakui.

Penguatan kapasitas juga dilakukan melalui Bimbingan Teknis CPPOB dan Pendaftaran Produk MD pada 6–7 Agustus 2025 secara daring, yang diikuti 494 peserta dari berbagai unsur. Kegiatan ini menegaskan pentingnya penerapan CPPOB dan percepatan perizinan bagi koperasi dan UMKM persusuan.

The event included the signing of a Letter of Intent (LoI) between KPSP Setia Kawan and Sweet Sundae as organic milk offtakers, alongside plans to launch Indonesia’s first organic ice cream and gelato in August 2025—a milestone for the national organic milk downstream sector.

Learning from Denmark

Within the framework of the Indonesia–Denmark Strategic Sector Cooperation (SSC), an international workshop in Denmark provided capacity-building and cross-country learning opportunities. Indonesia gained valuable insights on communication strategies, marketing, supportive policies, and collaboration among government, industry, and research institutions in organic milk development.

Ensuring Milk Quality for the MBG Program

In support of the Free Nutritious Meal (MBG) Program, the Livestock Downstreaming Directorate proposed improvements to milk quality parameters to the National Nutrition Agency, particularly regarding calcium content and fresh milk composition. This reflects cross-sectoral synergy in ensuring nutritional benefits, safety, and quality of livestock products for the public.

Promoting Circular Economy and Quality Literacy

Assistance in organic fertiliser certification strengthens sustainable livestock systems and the application of circular economy principles. This activity enhances business actors’ understanding of certification requirements, quality standards, and regulatory compliance, ensuring that livestock by-products have recognised added value.

Capacity building was also conducted through CPPOB Technical Guidance and MD Product Registration on 6–7 August 2025, attended online by 494 participants from various sectors. This activity emphasised the importance of CPPOB implementation and expedited licensing for dairy cooperatives and MSMEs.

Edukasi Publik dan Penguatan Sistem Sertifikasi

Upaya peningkatan literasi mutu diperluas melalui Webinar “Mutu Telur antara Preferensi Konsumen dan Standar Komersial” yang diikuti 1.376 peserta, serta kampanye kreatif seperti Lomba Jingle Minum Susu dalam rangka Bulan Bakti PKH ke-189.

Penguatan sistem penjaminan mutu ditutup dengan FGD Peran Penjaminan dan Sertifikasi Mutu Produk Peternakan pada 3 Oktober 2025 dan Rapat Koordinasi Skema Sertifikasi Mutu pada Desember 2025 sebagai tindak lanjut Permentan Nomor 27 Tahun 2025 dan dukungan terhadap target RPJMN 2025–2029.

Penutup

Rangkaian kegiatan tersebut menegaskan peran strategis Kelompok Penerapan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Hasil Peternakan dalam membangun sistem penjaminan mutu yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Mutu bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan fondasi kepercayaan pasar, kesejahteraan peternak, dan daya saing produk peternakan Indonesia.

Public Education and Strengthening the Certification System

Quality literacy efforts were expanded through the webinar “Egg Quality between Consumer Preferences and Commercial Standards”, attended by 1,376 participants, as well as creative campaigns such as the Milk Jingle Contest during the 189th PKH Service Month.

The quality assurance system was reinforced with a Focus Group Discussion (FGD) on the Role of Quality Assurance and Certification of Livestock Products on 3 October 2025, and a Quality Certification Scheme Coordination Meeting in December 2025 as follow-up to Minister of Agriculture Regulation No. 27 of 2025 and in support of RPJMN 2025–2029 targets.

Conclusion

These activities underline the strategic role of the Group for Implementation, Supervision, and Quality Certification of Livestock Products in building a strong, inclusive, and sustainable quality assurance system. Quality is not merely a matter of regulatory compliance; it is the foundation of market trust, farmer welfare, and the competitiveness of Indonesian livestock products.



Hilirisasi yang Bertumbuh: Cerita Perjalanan Satu Tahun Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan

Growing Downstreaming: A One-Year Journey of Post-Harvest and Livestock Product Processing

Tahun 2025 menjadi periode yang penuh perkembangan bagi sektor hilirisasi hasil peternakan. Berbagai agenda strategis, pembinaan teknis, hingga koordinasi

lintas lembaga dilakukan untuk memperkuat rantai nilai produk peternakan, khususnya di bidang persusuan dan pengolahan pangan asal ternak. Subdirektorat Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan berperan aktif memastikan bahwa setiap program berjalan terpadu, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.

Hilirisasi hasil peternakan kini tidak lagi sekadar berbicara tentang pengolahan produk, tetapi juga menyentuh aspek ketersediaan bahan baku, standarisasi mutu, keberlanjutan industri, dan perluasan peluang usaha bagi UMKM serta koperasi. Terlebih, pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) menuntut tersedianya pasokan susu yang aman, berkualitas, serta memenuhi standar teknis. Hal ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem persusuan dalam negeri.

Sepanjang tahun 2025, berbagai kegiatan strategis telah dilakukan. Berikut rangkuman perjalanan kerja satu tahun Subdit Pascapanen dan Pengolahan Hasil Peternakan.

1. Koordinasi Persusuan untuk Penyerapan SSDN Mendukung Program MBG

Pada 21 Juli 2025 telah dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), BPOM, serta dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

The year 2025 marked a period of significant development for the downstreaming of livestock products. Various strategic agendas, technical guidance, and cross-agency coordination were carried out to strengthen the value chain of livestock products, particularly in dairy and animal-based food processing. The Post-Harvest and Livestock Product Processing Sub-Directorate played an active role in ensuring that every program was implemented in an integrated, measurable manner, aligned with national policy directions.

Today, livestock product downstreaming goes beyond mere product processing; it also encompasses raw material availability, quality standardisation, industry sustainability, and the expansion of business opportunities for MSMEs and cooperatives. Moreover, the implementation of the national Free Nutritious Meal (MBG) Program requires the supply of safe, high-quality milk that meets technical standards, serving as a crucial momentum to strengthen the domestic dairy ecosystem.

Throughout 2025, numerous strategic activities were undertaken. The following is a summary of the one-year journey of the Post-Harvest and Livestock Product Processing Sub-Directorate.

1. Coordination of Dairy Supply for SSDN Absorption to Support the MBG Program

On 21 July 2025, a coordination meeting was held with the National Nutrition Agency (BGN), BPOM, and regional livestock and animal health offices.

Pertemuan ini membahas percepatan penyerapan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kesempatan tersebut, BGN menyosialisasikan Petunjuk Teknis Standar, Penyediaan, dan Distribusi Susu pada program MBG. Susu menjadi menu wajib di wilayah sentra sapi perah atau daerah yang memiliki stok susu segar, baik berasal dari sapi perah maupun kambing, selama produk memenuhi spesifikasi teknis serta ketentuan harga.

2. Koordinasi Penyiapan Database Koperasi/UPH Susu untuk Program MBG

Pertemuan koordinasi dengan koperasi sapi perah, kelompok peternak, pengepul, dan unit pengolahan susu dari berbagai provinsi sentra produksi digelar pada 31 Juli 2025.

Agenda ini bertujuan mengkonsolidasikan data produksi, produktivitas, penyerapan, pengolahan, dan pemasaran susu baik segar maupun olahan untuk mendukung integrasi data nasional MBG.

Dalam pertemuan ini juga disosialisasikan tata cara pengisian formulir pendataan. Data sementara menunjukkan terdapat 72 koperasi sapi perah dengan total produksi sebanyak 976,708 liter per hari dan sebanyak 17 koperasi telah mengolah susu pasteurisasi. Sementara itu, berdasarkan database SiUPIN, terdapat 252 UPH yang memproduksi susu pasteurisasi.

3. Lomba Kreasi Memasak Berbahan Baku Tepung Telur

Dalam rangka peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-189, diselenggarakan lomba kreasi memasak berbahan tepung telur. Selain menjadi ajang kreativitas, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan tepung telur sebagai bahan pangan serbaguna yang bernilai ekonomi.

Pendaftaran dibuka 1–14 September 2025, sementara pengiriman video resep berlangsung hingga 19 September 2025 melalui Instagram peserta. Beragam menu kreatif mulai dari nugget, fuyunghai, bolu ketan hitam, pie, martabak hingga selai mewarnai kompetisi ini. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir inspirasi baru bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis tepung telur dan memperkuat industri pangan kreatif lokal.

The meeting focused on accelerating the absorption of Domestic Fresh Milk (SSDN) to support the implementation of the Free Nutritious Meal (MBG) Program.

During the meeting, BGN socialised the Technical Guidelines for Milk Standards, Supply, and Distribution for the MBG program. Milk is a mandatory menu item in dairy cow production centres or areas with fresh milk stocks, whether from cows or goats, provided that the products meet technical specifications and pricing regulations.

2. Coordination for the Preparation of Milk Cooperatives/Processing Units Database for MBG

On 31 July 2025, a coordination meeting was held with dairy cooperatives, farmer groups, milk collectors, and milk processing units from various production provinces.

The agenda aimed to consolidate data on milk production, productivity, absorption, processing, and marketing of both fresh and processed milk to support the integration of national MBG data. Guidelines for filling out data collection forms were also socialised. Preliminary data showed 72 dairy cooperatives with a total production of 976,708 litres per day, of which 17 cooperatives processed pasteurised milk. Meanwhile, according to the SiUPIN database, there are 252 UPH units producing pasteurised milk.

3. Egg Flour Cooking Creativity Competition

In celebration of the 189th Month of Livestock and Animal Health Service, a cooking creativity competition using egg flour was held. Besides encouraging creativity, the event aimed to introduce egg flour as a versatile food ingredient with economic value.

Registrations were open from 1–14 September 2025, and recipe videos were submitted via Instagram until 19 September 2025. Creative dishes ranged from nuggets, fuyunghai, black glutinous rice sponge cake, pies, martabak, to spreads. This activity is expected to inspire the public to develop egg flour-based businesses and strengthen the local creative food industry.

4. Pendampingan Sertifikasi HACCP bagi UMKM Tepung Telur

PT SIPAMAN, salah satu UMKM pengolahan tepung telur, tengah mempersiapkan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai jaminan mutu dalam meningkatkan daya saing produk. Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan bekerja sama dengan PT Sucofindo menyelenggarakan bimbingan teknis HACCP, Good Manufacturing Practices (GMP), dan internal audit pada 11 September 2025. Pendampingan berlanjut hingga UMKM tersebut memenuhi seluruh persyaratan dan memperoleh sertifikat HACCP.

5. Koordinasi Persusuan untuk Dukungan MBG di Sumatera Barat

Menindaklanjuti kesiapan PT Sirukam Lumbung Nagari dalam mensuplai susu pasteurisasi untuk wilayah Solok dan sekitarnya, pertemuan koordinasi persusuan digelar pada 30 September 2025 secara hybrid. Kegiatan ini diikuti BGN, SPPG Sumatera Barat, koperasi sapi perah, UPH susu, serta dinas peternakan setempat. Dalam pertemuan disampaikan bahwa koperasi atau UPH yang telah memenuhi standar mutu memiliki NKV, halal, serta sertifikat CPPOB dapat memasok susu pasteurisasi untuk kebutuhan program MBG.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah preferensi SPPG terhadap susu UHT yang dianggap lebih aman dan mudah didistribusikan. Karena itu, diperlukan dukungan kebijakan tingkat daerah, termasuk arahan gubernur untuk mendorong penggunaan susu lokal sebagai menu MBG.

6. Penyusunan Handbook Persyaratan Izin Edar, NKV, dan Sertifikasi Halal

Untuk memudahkan pelaku usaha, khususnya UMKM, memahami prosedur perizinan produk olahan hasil peternakan, sedang disusun handbook persyaratan izin edar MD, NKV, dan sertifikasi halal. Pada 1 Oktober 2025 dilakukan rapat pembahasan dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Kesmavet, BPOM, dan BPJPH guna menyempurnakan substansi panduan tersebut.

4. HACCP Certification Assistance for Egg Flour MSMEs

PT SIPAMAN, an egg flour processing MSME, is preparing to implement Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) as a quality assurance measure to improve product competitiveness. The Livestock Downstreaming Directorate, in collaboration with PT Sucofindo, held technical guidance on HACCP, Good Manufacturing Practices (GMP), and internal audits on 11 September 2025. Assistance continues until the MSME meets all requirements and obtains HACCP certification.

5. Dairy Coordination for MBG Support in West Sumatra

To follow up on PT Sirukam Lumbung Nagari's readiness to supply pasteurised milk for Solok and surrounding areas, a hybrid dairy coordination meeting was held on 30 September 2025. Participants included BGN, SPPG West Sumatra, dairy cooperatives, UPH milk units, and local livestock offices.

The meeting noted that cooperatives or UPH units meeting quality standards—holding NKV, halal certification, and CPPOB certification—are eligible to supply pasteurised milk for MBG. However, a challenge arises from SPPG's preference for UHT milk, considered safer and easier to distribute. Regional policy support, including guidance from the governor, is needed to encourage the use of local milk in the MBG menu.

6. Preparation of Handbook on Distribution Permits, NKV, and Halal Certification

To facilitate business actors, particularly MSMEs, in understanding licensing procedures for processed livestock products, a handbook on MD product distribution permits, NKV, and halal certification is being drafted. On 1 October 2025, a discussion was held with speakers from the Directorate of Animal Health (Kesmavet), BPOM, and BPJPH to refine the guide's content.

7. Pendampingan Sertifikasi CPPOB dan Izin Edar bagi Koperasi/UPH Susu

Sebagai upaya memastikan mutu susu pasteurisasi yang akan digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan pendampingan intensif kepada sejumlah koperasi dan Unit Pengolahan Hasil (UPH) dalam memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta izin edar MD. Pendampingan ini mencakup beberapa lokasi, antara lain:

- UPH Rumah Susu Indonesia di Kabupaten Bogor yang telah menjalani pra-audit pada 24 Juli 2025 dengan temuan tujuh mayor dan sepuluh minor, yang saat ini sedang dalam proses perbaikan untuk memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi.
- Di Kota Metro, Lampung, UPH Rumah Susu juga telah menjalani pra-audit dengan hasil sebelas temuan minor dan delapan mayor, dan pendampingan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pemenuhan CPPOB, NKV, serta izin edar MD.
- Sementara itu, KUD Mitrayasa di Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan nilai A berdasarkan audit BPOM sehingga dinyatakan memenuhi persyaratan CPPOB, dan saat ini tengah menyiapkan proses perizinan halal serta penerbitan NKV.

7. Assistance for CPPOB Certification and Distribution Permits for Cooperatives/UPH

To ensure the quality of pasteurised milk used in the MBG Program, intensive guidance was provided to several cooperatives and milk processing units to comply with Good Processed Food Manufacturing Practices (CPPOB), Veterinary Control Numbers (NKV), and MD distribution permits.

This assistance covered several locations:

- UPH Rumah Susu Indonesia in Bogor Regency underwent a pre-audit on 24 July 2025, with 7 major and 10 minor findings, which are currently being addressed to meet all certification requirements.
- In Metro City, Lampung, UPH Rumah Susu underwent a pre-audit with 11 minor and 8 major findings, with ongoing guidance to ensure readiness for CPPOB, NKV, and MD permits.
- KUD Mitrayasa in Tasikmalaya Regency received an A rating from BPOM audits, meeting CPPOB requirements, and is currently preparing for halal certification and NKV issuance.





hilirnak



BerAKHLAK²

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

SALAM HILIRISASI

Follow us for more



hilirnak



Direktorat Hilirnak



hilirnak



Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

